

- ISRAEL - POLITICS
- POLITICAL PARTICIPATION
- CONFLICT MANAGEMENT

ADJIN Persepsi dan Universitas Airlangga

# FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PM ARIEL SHARON TETAP MELAKSANAKAN KEBIJAKAN *DISENGAGEMENT PLAN*

SKRIPSI

Fis HI 16/07

Mar  
f

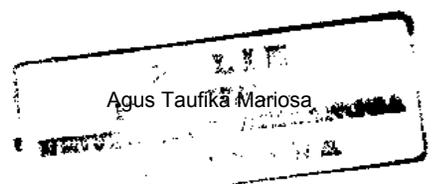


OLEH

AGUS TAUFIKA MARIOSA

NIM : 079915956

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
SEMESTER GASAL TAHUN 2006/2007



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PM ARIEL SHARON TETAP MELAKSANAKAN  
KEBIJAKAN *DISENGAGEMENT PLAN***

**SKRIPSI**



**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menyelesaikan Studi pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Airlangga**

**OLEH**

**AGUS TAUFIKA MARIOSIA  
NIM : 079915956**

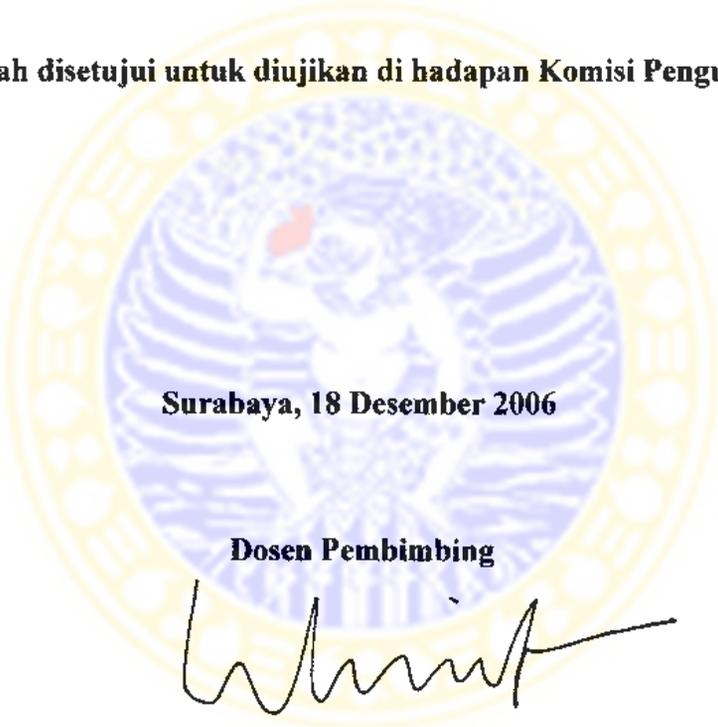
**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
SEMESTER GASAL TAHUN 2006/2007**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul

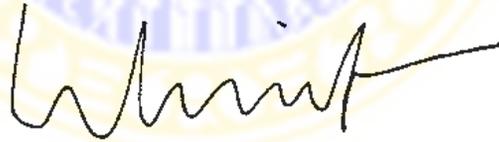
**Faktor-faktor Yang Mempengaruhi PM Ariel Sharon Tetap  
Melaksanakan Kebijakan *Disengagement Plan***

telah disetujui untuk diujikan di hadapan Komisi Penguji



Surabaya, 18 Desember 2006

Dosen Pembimbing



**I Gede Wahyu Wicaksana, S.IP, M.Si**  
**(NIP 139050635)**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Faktor-faktor Yang Mempengaruhi PM Ariel Sharon Tetap  
Melaksanakan Kebijakan *Disengagement Plan***

Telah dipertahankan di hadapan Komisi Penguji  
pada hari Rabu, 10 Januari 2007 pukul 10.00-12.00 WIB

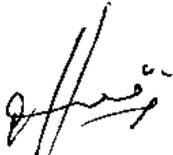
Komisi Penguji

Ketua,



Siti Rokhmawati, SIP., MIR  
(NIP 132 255 147)

Anggota,



Dra. Lilik Salamah, MS  
(NIP 131569360)

Anggota,



Moch. Yunus, S.IP  
(NIP. 132308498)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya skripsi yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi PM Ariel Sharon tetap melaksanakan kebijakan *disengagement plan*” ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Penulis memilih topik ini atas dasar ketertarikan terhadap PM Ariel Sharon sebagai sosok yang unik dan tidak sengaja, dimana sebelumnya topik yang akan diteliti adalah dukungan AS terhadap Israel berupa veto di dalam sidang keamanan PBB. Disaat penulis mencari data guna topik penelitian tersebut ada sebuah kalimat yang menyatakan kebijakan sepihak PM Ariel Sharon berupa *disengagement plan* (DP). Kemudian berangkat dari rasa keingintahuan penulis mengenai DP dan kata sepihak yang selalu menyertai kebijakan tersebut, penulis memutuskan untuk membahas mengenai penarikan mundur sepihak Israel atas Jalur Gaza dan Tepi Barat yang berdasar atas proposal PM Ariel Sharon.

Karya ini adalah hasil terbaik yang mampu penulis persembahkan, meskipun penulis merasa bahwa tulisan ini masih jauh dari kata baik yang dikarenakan keterbatasan waktu, biaya, dan kemampuan penulis sendiri. Adapun keberhasilan atas penulisan skripsi ini tidak lepas dari do’a dan bantuan dari orang-orang terdekat, khususnya para dosen jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bpk. I Gede Wahyu Wicaksana, S.IP, M.St., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar membimbing dan membantu penulis baik secara akademis, perkuliahan maupun moral, hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Ibu. Siti Rokhamawati, S.IP, M.IR., atas kesediannya menjadi ketua komisi penguji skripsi ini, bantuan beliau dalam perkuliahan yang di jalani penulis, serta kesediaan beliau memberikan bimbingannya setiap semester untuk memudahkan studi yang dijalani penulis menggantikan Bpk. M. Muttaqien, S.IP selaku dosen wali.
3. Ibu. Dra. Lilik Salamah, MS dan Bpk. Moch. Yunus, S.IP., atas kesediannya menjadi anggota komisi penguji serta atas bantuannya dalam perkuliahan yang selama ini di jalani penulis
4. Seluruh dosen dan staff pengajar jurusan Ilmu Hubungan Internasional atas ilmu, bimbingan, dan bantuan yang selama ini telah diberikan kepada penulis baik secara formal maupun informal guna pengembangan diri kearah yang lebih baik.
5. Keluarga tercinta, Ibu saya Ibu. Mami Chaniago, SE., atas do'a, kasih sayang, kepercayaan, dukungan baik materi maupun moral, bantuan, bimbingan yang telah diberikan selama ini, yang tidak pernah mengenal lelah melewati masa-masa sulit. Almarhum Bapak saya Bpk. H. Rochim Slamet, M.Soc.sc., atas bimbingan, dukungan, kepercayaan, bantuan yang telah diberikan beliau semasa hidup. Paman saya Bpk. Rachman Wahyudi, atas bimbingan dan bantuan beliau selama penulis di Surabaya, baik moral, ilmu, materi, dan kasih sayang. Adik-adik saya Arianugraha Maroisa dan Altauzian Rizky Slamet atas kesabaran, dukungan, dan kepercayaannya yang telah di berikan selama ini.

6. Teman-teman di Pandean, Jayus, Qnoy, Ndoweh, P. Cuk, Janrong, Botel, Jemmy, Ambon, Suwadi, Recho, Mas Novi, Budi ST, Dilla, Dimas, atas waktu, pengorbanan, kesempatan, kepercayaan, nasihat, dukungan, dan bantuannya kepada penulis selama ini.
7. Teman-teman HI angkatan '99, Buffon, Iit, Gusti, Alda, Anik, Oreo, Nadia, Nusa, Wulan, Luluk, Emon, Firda, Renita, Emy, Sadin, Wahab, Mojo, Kobo, Hari, Antok, Maskot, Doni, Budi, TJ, Manto, Umar, dan lainnya yang mungkin tidak disebutkan atas perhatiannya, dukungan, bantuan, dan pengalaman yang diberikan selama ini.
8. Teman-teman HI lainnya, Paung, Nanang, Yusli, Mahmud, Yayak, Teddy, Anda, Andri, Kacong, Nurdin, Bejo, Asep, Mas Hendrik, Aven, Adi, Imam, Memi, Ginanjar, Nona, Yudith, Wulan, Yono, Rois, Juned, Repsi, Dina, Pinky, Stephani, Tito, Hendra, Bimo, Lana, Jupri, Anggun, Cacing, Pipit, Lia, Ivon, Widi, Haris, Billy, Icha, Gembul, Nana, Vian, Ichal, Winny, Mia, Afif, Zaki, Wisnu, Ketek, Brian, Indri, Sugeng, Nisya, dan lainnya yang mungkin terlewatkan atas waktu, nasihat, perhatian, dukungan, bantuan, yang selama ini diberikan.
9. Teman-teman kampus, Rico, Tri, Deta, Arbil, Puput, Kresek, Bendot, Kunyit, Lengky, Benu, Aret, Gabon, Wawan, Candra, Niken, Mbah, Ludfi, Uyik, Bulus, Vita, Dila, Bertus, Dinar, Mansyur, Zaki, Fawas, Yayak, Doni Yayak, Amil, Slamet, Gondrong, Yoshuar, Andik, Ari, Bayu, Satrio, Komeng, Tole, Gogon, Sokran, Belo, Andik, Riri, Subik, Doni, Erik, Anik, Inem, Didi, Cahyo, Carlo, Hari, Aji, Bumbok, Gentong, Ayik, Dodit, dan lainnya yang tidak disebutkan atas perhatian, bantuan, dukungan, nasihat, waktu, yang diberikan selama ini.

10. Teman-teman Corner, Pak Ali, Gimbal, Temmy, Mas Adi, Praja, Yayan, Rombong, Dino, Pras, Ullhak, dan lainnya yang terlewatkan atas waktu, perhatian, nasehat, dukungan, bantuan yang telah diberikan selama ini.

Akhirnya penulis berharap smoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukannya.



**PENULIS**

Surabaya, 23 Januari 2007

## DAFTAR ISI

<i>Halaman Persetujuan</i> .....	i
<i>Halaman Pengesahan</i> .....	ii
<i>Kata Pengantar</i> .....	iii
<i>Daftar Isi</i> .....	vii
<i>Daftar Tabel</i> .....	ix
<i>Daftar Gambar</i> .....	x
<i>Abstrak</i> .....	xi

### **BAB I: PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH.....	9
1.3. TUJUAN PENELITIAN.....	9
1.4. KERANGKA PEMIKIRAN	
1.4.1 Peringkat Analisis.....	9
1.4.2 Kerangka Teoritik.....	12
1.4.2.a. Teori Pembuatan Keputusan.....	13
1.4.2.b. Teori Persepsi.....	15
1.4.2.c. Teori Pengambilan Keputusan secara Rasional.....	18
1.4.2.d. Konsep Strategi.....	20
1.5. ARGUMEN.....	22
1.6. METODOLOGI PENELITIAN	
1.6.1. Tipe Penelitian.....	23
1.6.2. Ruang Lingkup Penelitian.....	23
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data.....	23
1.6.4. Teknik Analisis Data.....	24
1.6.5. Sistematika Penulisan.....	24

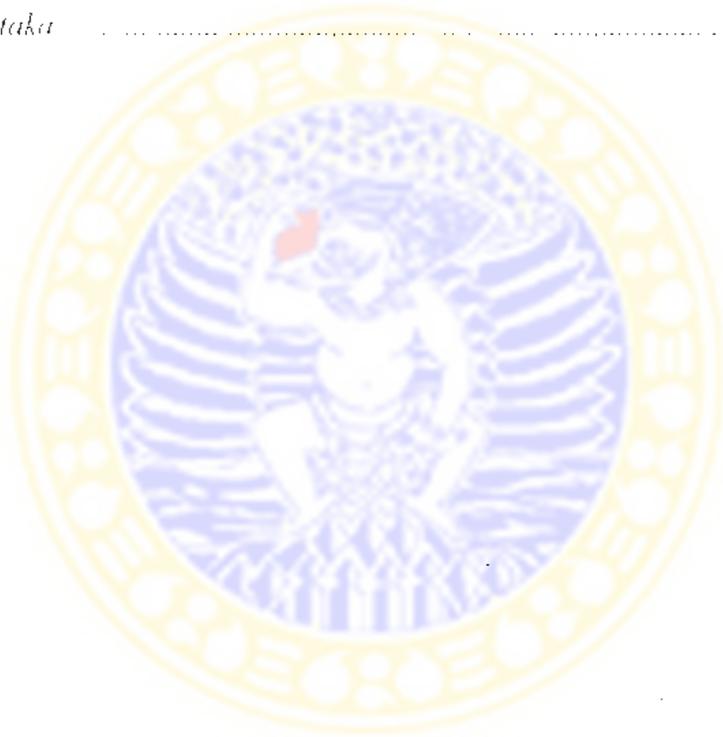
### **BAB II: PRAGMATISME KEBIJAKAN PM ARIEL SHARON**

II.1. POLITIK LUAR NEGERI ISRAEL DI MASA PM ARIEL SHARON.....	26
II.2. MASALAH KEAMANAN MENDOMINASI KEBIJAKAN PM ARIEL SHARON.....	27
II.3. PETA JALAN DAMAI SEBAGAI SOLUSI PERDAMAIAN ANTARA ISRAEL-PALESTINA.....	36
II.4. TEMBOK PEMISAH SEBAGAI SOLUSI KEAMANAN ISRAEL ...	39
II.5. HANCURNYA KOALISI KABINET PEMERINTAHAN PM ARIEL SHARON.....	42
II.6. KEMENANGAN PM ARIEL SHARON DALAM PEMILU 2003.....	50
II.7. STATUS WILAYAH JALUR GAZA DAN TEPI BARAT.....	51

### **BAB III: PERAN ELIT POLITIK DI SEKITAR PM ARIEL SHARON DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN *DISENGAGEMENT PLAN***

III.1. PM ARIEL SHARON.....	58
-----------------------------	----

III.1.a. Latar belakang PM Ariel Sharon .....	58
III.1.b. Ideologi PM Ariel Sharon .....	60
III.1.c. Persepsi PM Ariel Sharon terhadap lingkungan sekitarnya .....	63
III.2. PERAN DAN DUKUNGAN ELIT POLITIK ISRAEL TERHADAP <i>DISENGAGEMENT PLAN</i> .....	94
III.2.a. Ehud Olmert .....	94
III.2.b. Shimon Peres .....	99
III.2.c. Shaul Motáz.....	103
III.2.d. Silvan Shalom.....	107
<b>BAB VI: KESIMPULAN</b> .....	112
<i>Daftar Pustaka</i> .....	116



## DAFTAR TABEL

Gambar I.1: Diagram Hubungan antara Sistem Keyakinan dengan Pembuatan Keputusan Politik Luar Negeri.....	17
Gambar II.1: Tabel Partai dan Pemerintahan Dalam Parlemen Israel ke-16.....	50



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Jalan Garis	50
Gambar 1.2. Peta Topografi	57



## ABSTRAK

Dengan melihat kondisi dalam negeri Israel serta banyaknya hambatan dan pihak yang menentang *Disengagement Plan* (DP), penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor apa sajakah yang mendorong PM Sharon tetap melanjutkan DP yang berupa penarikan mundur pasukan militer, pengosongan fasilitas umum dan militer, serta pangevakuasian pemukiman Yahudi dari Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat (utara Samaria).

Guna lebih memudahkan pemahaman mengenai tindakan PM Sharon mengeluarkan kebijakan sepihak yang berupa DP, peneliti melihat fenomena tersebut dengan menggunakan pendekatan mikro dimana pendekatan tersebut berasumsi bahwa pengetahuan politik adalah pengetahuan manusia dan studi politik adalah kebutuhan, kehendak, citra, nilai, dan keyakinan manusia. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori persepsi dan *decision making theory* sebagai landasan dasar guna memudahkan menganalisa dan menggambarkan fenomena serta permasalahan yang ada. Teori pembuatan keputusan mengarahkan perhatian tidak sekedar pada negara atau pemerintah atau bahkan institusi eksekutif yang ada, namun memfokuskan perhatiannya pada perilaku spesifik dari para pembuat keputusan yang secara aktual membentuk kebijakan pemerintah. Dimana PM Sharon merupakan aktor kunci dari rencana dan keberhasilan kebijakan penarikan mundur dari Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat, yang berdasar pada pengalaman pribadi, kemampuan personal, dan persepsinya dalam sebuah proses kebijakan politik luar negeri Israel. Dan Kabinet, Parlemen, partai politik, kelompok kepentingan, media, serta peran dari para elit politik yang mempengaruhi, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan berupa *Disengagement Plan*. Serta bagaimana mereka mendefinisikan dan menerjemahkan situasi internasional, yaitu mencakup persepsi, choice, dan ekspektasi (*expectation*). Persepsi didefinisikan sebagai cara pandang seseorang dalam melihat lingkungan (dunia) di sekitarnya baik internal maupun eksternal. Konsep Strategi digunakan untuk menjelaskan dan memberikan gambaran yang jelas terhadap sikap dan perilaku dari PM Ariel Sharon dalam mengatasi permasalahan yang ada, yang berdasar pada kemampuan personal dan hasil pengamatannya serta langkah-langkah yang diambil PM Ariel Sharon guna tetap menjalankan kebijakan *disengagement plan*.

Pada kesimpulannya faktor-faktor yang mempengaruhi PM Ariel Sharon tetap melanjutkan kebijakan sepihak DP antara lain faktor individu dari PM Sharon sebagai seseorang yang berwatakkan keras, unik, keras kepala, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya sebagai seorang pemimpin sehingga beliau dapat mengatasi ancaman dan tekanan dari para penentang DP. Faktor persepsi, merupakan faktor yang sangat mendukung DP tetap eksis, melalui pengamatan PM Sharon terhadap kemungkinan-kemungkinan, peluang, dan kesempatan yang ada guna tetap menerapkan DP memungkinkan beliau mendapatkan dukungan dari para elit. Terakhir adalah faktor peranan elit politik Israel dimana Shaul Mofaz sebagai eksekutor dari DP, Silvan Shalom sebagai negosiator guna pernormalisasian hubungan Israel-Arab dan Israel-Eropa setelah DP berjalan, dan Ehud Olmert sebagai pencetus ide dari kebijakan sepihak penarikan mundur Israel dari Jalur Gaza dan Tepi Barat.

**Kata kunci:** Israel, PM Ariel Sharon, *Disengagement Plan*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada bulan Agustus 2005, Israel melakukan penarikan mundur dari wilayah Jalur Gaza dan sebagian dari Tepi Barat (Utara Samaria). Penarikan tersebut meliputi penarikan atas pasukan dan fasilitas militer Israel, fasilitas umum atau sipil, dan pemukiman Yahudi yang berada di kawasan tersebut.<sup>1</sup>

Penarikan mundur ini terdiri dari 21 daerah di Jalur Gaza, antara lain Bedolah, Bene Azmon (Atzmona), Dugit, Elei Sinai, Gadid, Gan Or, Ganei Tal, Katif, Kfar Darom, Kfar Yam, Kerem Atzmona, Morag, Neveh Dekalim, Netzarim, Netzer Hazani, Nisanit, Pe'at Sade, Rafiah Yam, Slav, Shirat Hayam, Tel Katifa. Dan empat daerah di Tepi Barat (Utara Samaria), yaitu Kadim, Ganim, Homesh, Sa-Nur.<sup>2</sup>

Penarikan mundur merupakan kebijakan pemerintah Israel, yang berdasar pada proposal kebijakan sepihak (unilateral) yang ditawarkan Perdana Menteri (PM) Israel Ariel Sharon dengan nama *Disengagement Plan* (DP). Kebijakan penarikan mundur tersebut berjalan setelah mendapatkan persetujuan dari parlemen (Knesset) Israel, dengan memberikan tanggung jawab terhadap pemerintah sebesar 870 milyar Dollar AS guna proses evakuasi 9000 pemukim yang berada di Jalur Gaza dan Tepi Barat, serta memberikan waktu lima bulan guna penyelesaian seluruh proses penarikan mundur tersebut.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Anthony Cordesman, "From Peace to War: Land for Peace or Settlements for War," (DC: Center for Strategic and International Studies), pp. 17-21, diakses dari [www.jewishvirtuallibrary.org](http://www.jewishvirtuallibrary.org), tanggal 15 Agustus 2003.

<sup>2</sup> *Israel's Disengagement Plan: Renewing Peace Process*, diakses dari <http://www.unhcr.org>, tanggal 6 Februari 2006.

<sup>3</sup> *Knesset Approves Disengagement Plan Law*, diakses dari [www.jpost.com](http://www.jpost.com), pada tanggal 16 Februari 2005.

Adapun poin-poin penting dari *Disengagement Plan* tersebut, antara lain:<sup>4</sup>

1. Israel akan menarik mundur dari Jalur Gaza beserta semua pemukiman Yahudi yang berada disana, dan perelokasian pemukiman tersebut akan ditempatkan diluar wilayah Jalur Gaza.
2. Penarikan tersebut tidak termasuk *Philadelphia Route* (perbatasan Mesir dan Gaza) dan militer Israel akan tetap berada di sepanjang perbatasan ini.
3. Israel memiliki hak untuk menggunakan Gaza guna operasi militer.
4. Israel secara eksklusif mengontrol wilayah udara Gaza dan tetap melakukan operasi militernya di laut.
5. Gaza akan didemiliterisasi dan dilakukan pelucutan senjata yang tidak sesuai dengan berdasarkan pada perjanjian antara kedua belah pihak.
6. Israel tetap memiliki status quo atas daerah perindustrian Erez, dimana masalah keamanan akan disepakati bersama beserta pengakuan komunitas internasional akan tindakan tersebut bukanlah merupakan usaha untuk mengontrol kawasan ini.
7. Secara alternatif, zona industri yang ada akan diberikan kepada Palestina atau otoritas internasional yang ada guna bertanggung jawab atas fasilitas ini, sesuai dengan kesepakatan dengan pihak Israel.
8. Israel akan mempertimbangkan kerjasama dengan Mesir guna mewujudkan *joint industrial zone* (zona industri bersama) di perbatasan antara Gaza, Mesir, dan Israel.
9. Israel akan mengosongkan pemukiman dan instalasi militer permanen di Ganim, Kadim, Homesh, dan Sanur.

---

<sup>4</sup> *The Main Points of Israeli Prime Minister Ariel Sharon's Disengagement Plan*, diakses dari <http://www.iaa.gov.il>, pada tanggal 16 April 2004.

10. Otoritas Palestina diperbolehkan menggunakan dan menguasai daerah utara Tepi Barat.
11. Israel akan terus membangun tembok pemisah di Tepi Barat.
12. Militer Israel akan terus berada dan melakukan aktifitasnya di Tepi Barat, jika diperlukan Israel akan mengurangi aktifitasnya di kota yang menjadi wilayah otoritas Palestina.
13. Israel akan mengurangi pos-pos pemeriksaan (checkpoint) di Tepi Barat.
14. Israel akan berusaha untuk menjaga aset-aset dari pemukiman beserta fasilitas yang ada.
15. Israel mengusulkan peranan internasional guna pengambil alihan pemukiman dan fasilitas yang ada sesuai dengan persetujuan Israel dengan Amerika Serikat.
16. Israel memiliki hak untuk meminta kompensasi atas nilai atau pengeluaran atas segala aset ekonomi yang masih ada di daerah yang telah dikosongkan.
17. Semua infrastruktur air, listrik, fasilitas limbah dan fasilitas komunikasi pemukiman akan tetap berada di area yang telah dikosongkan.
18. Secara garis besar semua perjanjian yang ada antara Israel dengan Palestina akan terus berjalan, termasuk masuknya tenaga kerja Palestina dan bahan kebutuhan dasar ke dalam negara Israel.
19. Dalam jangka panjang Israel akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang berasal dari Palestina untuk dapat masuk ke negara Israel.
20. Perjanjian kerjasama bersama antara Mesir dengan Gaza dan Tepi Barat dengan Jordan masih tetap berjalan.

21. Israel menekankan bahwasannya tidak akan ada keberadaan militer asing di Gaza dan Tepi Barat, tanpa koordinasi dan perjanjian dengan negara Israel<sup>5</sup>.
22. Israel berhak melindungi dirinya sendiri, termasuk melakukan tindakan pencegahan dengan kekuatan terhadap ancaman yang berasal dari Gaza dan Tepi Barat.

PM Sharon menjelaskan rancangan dan rencana penarikan mundur pertama kali pada konferensi Herzliya IV, dimana beliau menjelaskan perlunya sebuah upaya yang harus dilakukan guna meningkatkan keamanan serta menciptakan kedamaian guna kesejahteraan negara dan bangsa Israel.<sup>5</sup> Kebuntuan *Road Map* yang dibekukan pemerintah Israel atas dasar serangan teroris Palestina terhadap Israel, serta keraguan akan pemerintahan otoritas Palestina guna menciptakan kondisi yang aman sesuai dengan kesepakatan peta jalur damai pun menjadi salah satu alasan PM Sharon menawarkan kebijakan tersebut.

PM Sharon menjelaskan mengenai isu terorisme yang selama ini menciptakan kondisi sangat mengawatirkan guna kelangsungan hidup bangsa Yahudi, serta eksistensi negara Israel yang berdaulat. Beliau kemudian menekankan bahwasannya penarikan mundur tersebut merupakan tindakan sepihak yang berusaha menciptakan suatu proses perdamaian dan keamanan semata, tanpa adanya unsur politik yang dilibatkan.

Bagi PM Sharon, DP merupakan sebuah solusi keamanan, dengan mereduksi atau mengurangi tindakan atau serangan teroris dan cara guna meningkatkan perekonomian dengan memperbaiki kualitas hidup bangsa dan negara Israel.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Israel's Disengagement Plan: Selected Document*, diakses dari [www.mfa.gov.il](http://www.mfa.gov.il), tanggal 17 Juli 2005.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Isu keamanan bagi negara Israel menjadi sangat penting artinya, selain sebagai penopang kehidupan berbangsa dan bernegara, masalah keamanan juga penting artinya guna mewujudkan tujuan nasional negara Israel itu sendiri. Berdasarkan data dari kemiliteran Israel, sebanyak 5,301 serangan yang dilancarkan teroris dan memakan korban 451 orang baik sipil maupun militer pada tahun 2002, 3,838 serangan yang memakan korban 213 orang (163 sipil dan 50 personel militer) pada tahun 2003, dan 2,990 serangan yang memakan korban 117 orang (76 sipil dan 41 personel militer) pada tahun 2004 di setiap penjuru negara Israel.<sup>7</sup>

Masalah keamanan membawa dampak yang sangat mengawatirkan bagi iklim perekonomian di Israel, dimana menurunkan atau mengurangi devisa negara dengan turunnya minat para investor asing guna menanamkan modalnya di Israel dan minat turis asing yang ingin berwisata ke Israel. Selain daripada itu, konflik yang berkepanjangan tersebut menciptakan lebih dari 10 persen pengangguran, dan 20 persen masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.<sup>8</sup>

Rencana penarikan mundur yang ditawarkan PM Sharon mendapatkan hambatan berupa tentangan, kritik, dan kecaman dari berbagai pihak, diantaranya dari tubuh Partai Likud yang merupakan partai dari PM Sharon sendiri. Partai Likud selama ini dikenal dengan sikapnya yang mendukung perluasan dan pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jalur Gaza serta bersikap keras terhadap Palestina.<sup>9</sup> Bagi Partai Likud.

<sup>7</sup> "Terorism Review", diakses dari [www.aljazeera.com](http://www.aljazeera.com), pada tanggal 8 Januari 2004.

<sup>8</sup> "The Middle East in Transition", Lesson 3: The Arab-Israeli Conflict, dari U.S. Department of Commerce, "Israel Country Commercial Guide," *STAT-USA*, 2003 and "Budget cuts to impact on Israel's poverty," *Australian Broadcasting Corporation*, diakses dari [www.jewishvirtuallibrary.org](http://www.jewishvirtuallibrary.org), tanggal 25 Maret 2003.

<sup>9</sup> "Israel Akui Delapan Pemukiman Ilegal", diambil dari *Koran Tempo*, 25 Oktober 2003.

dengan adanya proposal penarikan mundur yang ada. PM Sharon dianggap melalaikan kewajiban dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya.

Perpecahan di dalam tubuh Partai Likud terlihat dari dipecatnya beberapa menteri kabinet dan pejabat tinggi negara yang berasal dari partai ini, diantaranya adalah Menteri Kabinet Uzi Landau, Wakil Menteri Keamanan Internal Michael Ratzon, dan mundurnya Menteri Keuangan Israel Benyamin Netanyahu.<sup>10</sup>

Mundurnya Netanyahu dari kabinet pemerintahan PM Sharon membuat posisi PM Sharon semakin sulit dalam merealisasikan rencana penarikan mundur tersebut. Karena selain Netanyahu dikenal sebagai rival utama PM Sharon dalam memperebutkan posisi ketua dari Partai Likud, beliau juga memiliki pengaruh yang cukup besar di dalam Partai Likud dan para pembuat keputusan di Amerika Serikat.<sup>11</sup>

Mundurnya Partai National Union (NU) dan Partai National Religious (NRP) dari pemerintahan koalisi PM Sharon menambah kesulitan bagi DP untuk dapat diterima oleh *Knesset* (Parlemen Israel). Mundurnya Partai NU dan NRP dipicu oleh tidak sepakatnya kedua partai tersebut terhadap rencana penarikan mundur yang ditawarkan oleh PM Sharon, karena mereka menganggap rencana tersebut merupakan sebuah kebijakan yang salah dan dapat membawa Israel kedalam suatu kondisi yang semakin terpuruk baik dalam sektor ekonomi maupun permasalahan keamanan yang ada.

Selain daripada itu, pemecatan yang dilakukan PM Sharon terhadap menteri dan anggota kabinet Avigdor Liberman dan Binyamin Elon dari Partai NU, dan mundurnya Menteri Perumahan Efi Eytan dan Menteri Muda Yitzhak Levy yang berasal dari Partai

<sup>10</sup> "Usulan Sharon Disetujui" Soal Pemindahan Pemukiman di Gaza., diambil dari Kompas, 28 Oktober 2004.

<sup>11</sup> Mustofa B. Santoso, "Krisis DP = Krisis Politik Sharon", diakses dari [www.pelita.or.id](http://www.pelita.or.id), tanggal 4 Juli 2005.

NRP juga menjadi penentu keluarnya kedua partai tersebut dari koalisi pemerintahan Sharon.<sup>12</sup>

PM Sharon membutuhkan 61 kursi dari 120 kursi di Parlemen, sedangkan mundurnya kedua partai tersebut menjadikan kedudukan anggota Parlemen yang mendukung rencana penarikan tersebut menjadi 59 kursi.

Solusi permasalahan ini terdapat pada dukungan Amerika Serikat (AS) sebagai mitra Israel guna persetujuan Kabinet dan koalisi Partai Buruh yang merupakan partai terbesar kedua setelah Partai Likud di Israel guna persetujuan di tingkat Parlemen.

Namun hubungan Partai Buruh dan Partai Likud sedang dalam masalah yang sangat kritis, karena setelah mundurnya Partai Buruh dari pemerintahan persatuan PM Sharon pada tahun 2002,<sup>13</sup> akibat isu *budget* (keuangan) negara, Komite Sentral Partai Likud memutuskan untuk melarang (memveto) segala bentuk kerjasama dan koalisi dengan Partai Buruh.<sup>14</sup>

Hambatan terhadap DP juga dirasakan dari pihak AS, dimana AS sebagai salah satu motor dan perumus *Road Map*, menekankan kepada Israel dan Palestina agar segera melaksanakan kesepakatan sesuai dengan peta jalan damai yaitu mewujudkan *two-state-solution* rumusan tim kwartet (PBB, Uni Eropa, AS, dan Rusia).<sup>15</sup>

Kecaman terhadap kebijakan kontroversial PM Sharon juga dinyatakan oleh mantan Menteri Kehakiman sekaligus sebagai salah satu pemrakarsa dan perumus non formal *Geneva Accord*, Yossi Beilin menyebutkan penarikan mundur yang dilakukan

<sup>12</sup> "Hezbollah Serang Pos Israel", diambil dari Kompas, tanggal 10 Juni 2004.

<sup>13</sup> "Di Tengah Burannya Wajah Timur Tengah", diambil dari Kompas, tanggal 25 Desember 2002.

<sup>14</sup> "Sharon Berhasil Raih Dukungan Likud", diambil dari Kompas, tanggal 11 Desember 2004.

<sup>15</sup> "Exchange of Letters between PM Sharon and President Bush", diakses dari [www.mfa.gov.il](http://www.mfa.gov.il), tanggal 14 April 2004.

akan semakin menguatkan para teroris.<sup>16</sup> Pimpinan partai ultra-orthodoks Yahudi, Shas, Eli Yishai menyatakan bahwasannya PM Sharon telah melarikan diri dari kesepakatan semula, yaitu pengrealisasian "*The Promise Land*" (tanah yang dijanjikan).<sup>17</sup>

Penentangan dari rencana penarikan mundur PM Sharon juga terlihat dari para pemukim Yahudi yang tinggal di wilayah Jalur Gaza dan Tepi Barat beserta para rabbi yang mewakili penduduk pemukiman Yahudi. Diantaranya adalah Rabbi Avraham Shapira, Rabbi Ovadia Yosef, Rabbi Mordechai Eliyahu, dan Avi Dichter perwakilan dari ekstremis sayap kanan yang menyebut PM Sharon sebagai *Din Rodef* yaitu sebutan untuk Yahudi yang membahayakan Yahudi lainnya dan boleh dibunuh jika perlu.<sup>18</sup>

Dunia Internasional pun turut mengecam tindakan Israel dan sikap Amerika Serikat yang dianggap tidak tegas dan benderung memihak Israel dengan adanya kebijakan unilateral PM Sharon serta diteruskannya pembangunan tembok pemisah yang dianggap menghambat proses perwujudan *two-state-solution* yang terumuskan dalam *Road Map* (peta jalan damai), dinyatakan oleh Sekretaris Jendral PBB Koffi Annan dan Juru bicara Uni Eropa, Menteri Luar Negeri Irlandia Brian Cowen.<sup>19</sup>

Pernyataan serupa dinyatakan oleh Presiden Lebanon, Presiden Mesir begitu pula Perdana Menteri otoritas Palestina Ahmed Qorei, yang menyebutkan perlunya sebuah kesepakatan bersama dan perundingan diantara kedua belah pihak guna terciptanya Palestina merdeka, pengakuan atas perbatasan masing-masing wilayah, di kembalikannya

<sup>16</sup> "*Middle East: Disengagement Plan*", diakses dari [www.cfr.org](http://www.cfr.org), tanggal 16 Oktober 2004.

<sup>17</sup> "Sharon Pertimbangkan Percepat Pemilu", diambil dari Media Indonesia, tanggal 5 Februari 2004.

<sup>18</sup> "Israel Khawatirkan Ekstremisme Yahudi", diambil dari Media Indonesia, tanggal 6 Juli 2004.

<sup>19</sup> "Israel Kosongkan Gaza pada Akhir 2005", diambil dari Media Indonesia, tanggal 17 April 2004.

para tahanan Palestina, dan tidak adanya tindakan dari salah satu pihak guna memaksakan kehendak atas lainnya.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dengan melihat kondisi dalam negeri Israel serta banyaknya hambatan dan pihak yang menentang *Disengagement Plan* (DP) tersebut, dapat dirumuskan sebuah permasalahan yang mempertanyakan faktor-faktor apa sajakah yang mendorong PM Sharon tetap melanjutkan DP yang berupa penarikan mundur pasukan militer, pengosongan fasilitas umum dan militer, serta pemukiman Yahudi dari Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat (utara Samaria).

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan atau pengambilan keputusan (*decision making*) di Israel, untuk kasus kebijakan PM Sharon berupa *Disengagement Plan*.

## 1.4. Kerangka Pemikiran

### 1.4.1. Peringkat Analisis

Dalam menjelaskan permasalahan yang tersebut diatas, selain menggunakan alat analisis teori dan konsep yang relevan, masih diperlukan juga pemakaian peringkat analisis yang tepat. Ada dua hal yang harus dilaksanakan dalam menentukan peringkat analisis yaitu menentukan unit analisa dan unit eksplanasi. Unit analisa merupakan fenomena yang hendak dideskripsikan, dijelaskan, dan diramalkan atau disebut variabel dependen. Sedangkan unit eksplanasi adalah variabel independen yang pengaruhnya hendak diamati atau berpengaruh terhadap unit analisis.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 39.

Dalam hal ini, yang menjadi unit analisa dalam penelitian ini adalah individu, yaitu keputusan Ariel Sharon sebagai Perdana Menteri Israel (*top decision maker*) dengan kebijakan sepihaknya yang berupa penarikan mundur Israel atas segala fasilitas baik sipil maupun militer beserta pemukiman Yahudi di Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat (*Disengagement Plan*) guna menciptakan suatu kondisi keamanan yang kondusif bagi Israel, serta meningkatkan perekonomian Israel guna kualitas hidup bangsa yang lebih baik.

Kemudian unit eksplanasi dari penelitian ini adalah individu dimana menjelaskan tentang persepsi akan kondisi domestik Israel (peranan kelompok kepentingan atau orang-orang disekitar Ariel Sharon, keamanan dan perekonomian Israel, dan partai-partai politik di Israel) dan persepsi terhadap peranan lingkungan luar (dukungan Presiden AS Goerge W. Bush, tekanan Uni Eropa, PBB, dan tekanan negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Mesir, Jordania, dan kondisi kawasan Timur Tengah) dari PM Ariel Sharon, latar belakang dari perumusan *disengagement plan* serta latar belakang dari PM Sharon sendiri sebagai pengambil keputusan tertinggi di Israel, dan tujuan dari perumusan kebijakan yang dilakukan Ariel Sharon meliputi langkah-langkah strategis yang dilakukannya guna disepakatinya rencana penarikan mundur atas Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat.

Peringkat analisis yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada apa yang dikemukakan oleh Patrick Morgan, yang membagi peringkat analisis menjadi lima peringkat, yaitu perilaku individu, perilaku kelompok, negara-bangsa, kelompok negara-bangsa, dan sistem internasional.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Patrick Morgan, *Theories and Approaches to International Politics* (Transaction, 1982), hal. 40-42.

Dimana yang menjadi fokus perhatian dan penjelasan dalam penelitian ini adalah perilaku individu, yaitu PM Ariel Sharon dengan kebijakannya berupa penarikan diri secara sepihak dari Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat. Adapun perilaku kelompok, negara-bangsa, kelompok negara-bangsa, dan sistem internasional di gunakan untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap perilaku individu dalam perumusan kebijakan berupa *disengagement plan*.

Tingkat analisis perilaku individu berasumsi bahwasannya fenomena hubungan internasional dianggap sebagai akibat perilaku-perilaku individu yang saling berinteraksi di dalamnya. Oleh karena itu, untuk memahami ilmu hubungan internasional perlu dilihat sikap dan perilaku tokoh-tokoh utama pembuat keputusan.

Tingkat analisis perilaku kelompok berasumsi bahwasannya individu umumnya melakukan tindakan hubungan internasional dalam kelompok. Hubungan internasional sebenarnya adalah hubungan antar berbagai kelompok kecil di berbagai negara, dalam hal ini seperti kabinet, dewan penasehat keamanan, politbiro, dan sebagainya.

Tingkat analisis negara-bangsa berasumsi bahwasannya semua pembuat keputusan, dimanapun berada, pada dasarnya akan berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama. Analisa perlu ditekankan pada perilaku unit negara-bangsa karena hubungan internasional pada dasarnya didominasi oleh perilaku negara-bangsa. Perilaku individu, kelompok, organisasi, lembaga, dan proses perpolitikan mereka hanya akan diperhatikan sejauh perilaku mereka berkaitan dengan tindakan internasional negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, proses pembuatan keputusan tentang hubungan internasional yang dilakukan melalui politik luar negeri oleh suatu negara-bangsa merupakan satu unit yang utuh.

Tingkat analisis kelompok negara-bangsa berasumsi bahwasanya seringkali negara-bangsa tidak bertindak sendiri-sendiri melainkan sebagai suatu kelompok, dimana hubungan internasional merupakan sebuah interaksi yang membentuk pola dan pengelompokan seperti pengelompokan regional, aliansi, persekutuan ekonomi dan perdagangan, blok ideologi, pengelompokan dalam PBB, dan lain sebagainya.

Tingkat analisis sistem internasional berasumsi bahwasannya bangsa-bangsa di dunia dan interaksi diantara mereka merupakan suatu sistem. Sistem internasional sangat menentukan perilaku negara-bangsa, oleh sebab itu pengetahuan tentang dinamika sistem yang beranggotakan negara-bangsa dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku aktor-aktor hubungan internasional yang terlibat didalamnya.

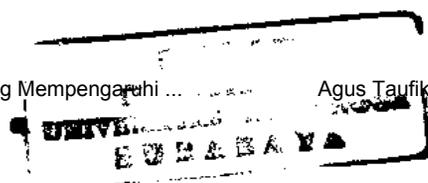
#### 1.4.2. Kerangka Teoritik

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena social secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.<sup>22</sup>

Guna lebih memudahkan pemahaman mengenai tindakan PM Sharon mengeluarkan kebijakan sepihaknya yang berupa DP, peneliti melihat fenomena tersebut dengan menggunakan pendekatan mikro,<sup>23</sup> dimana pendekatan tersebut berasumsi bahwa pengetahuan politik adalah pengetahuan manusia dan studi politik adalah kebutuhan, kehendak, citra, nilai, dan keyakinan manusia.

<sup>22</sup> Sofian Effendi, "Unsur-unsur Penelitian Survey" dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, ed, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1989), hal. 37.

<sup>23</sup> Mohtar Mas'oeed, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*, (Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Universitas Gajah Mada, 1989), hal. 1.



Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori persepsi dan decision making theory sebagai landasan dasar guna memudahkan menganalisa dan menggambarkan fenomena serta permasalahan yang ada.

#### 1.4.2.a. Teori Pembuatan Keputusan

Yang menjadi pertimbangan penjelasan unit eksplanasi melalui teori ini bahwasannya aktor pembuat kebijakan yakni negara tidak dapat dipisahkan dari para pembuat keputusan itu sendiri (*decision makers*). Hal ini dapat diumpamakan negara dan para elit yang ada di pemerintahan laksana dua gambar pada sekeping mata uang yang tidak dapat dipisahkan melainkan menjadi satu kesatuan.

Teori pembuat keputusan ini mengarahkan perhatian tidak sekedar pada negara atau pada pemerintah atau bahkan institusi eksekutif yang ada, namun menfokuskan perhatiannya pada perilaku spesifik dari para pembuat keputusan yang secara aktual membentuk kebijakan pemerintah.<sup>24</sup>

James N. Rosenau melihat suatu keputusan atau kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh 5 variabel, antara lain idiosinkretik, peranan, birokrasi, nasional, dan sistemik.<sup>25</sup>

Variabel idiosinkretik (individual) berkaitan dengan persepsi, *image*, dan karakteristik pribadi pembuat keputusan. Variabel ini sangat sukar diukur, namun dapat diasumsikan bahwa variabel ini berpengaruh besar pada keputusan-keputusan yang sifatnya pragmatis, karena selama masa krisis beban keterbatasan waktu dan ancaman terletak di bahu pemimpin negara serta para penasehat yang bisa secara cepat

<sup>24</sup> James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff Jr., *Contending Theories of International Relations*. (Philadelphia: JB. Lippincott Co., 1991), hal. 458.

<sup>25</sup> Theodore A. Coulombis dan James H. Wolf, *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*, terj., (Bandung: CV Putra A Bardin, 1999), hal. 129-135.

dikumpulkan. Variabel ini lebih mudah menjelaskan keputusan-keputusan negara otoriter dan totaliter.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan bahasannya pada variabel ideosinkretik (individu), dimana PM Sharon merupakan aktor kunci dari rencana dan keberhasilan kebijakan penarikan mundur dari Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat, yang berdasar pada pengalaman pribadi, kemampuan personal, dan persepsinya dalam sebuah proses kebijakan politik luar negeri Israel.

Variabel peranan didefinisikan sebagai gambaran pekerjaan atau sebagai aturan-aturan perilaku yang diharapkan bagi presiden, menteri-menteri kabinet, birokrat tingkat tinggi, wakil-wakil di kongres, wartawan, kelompok penekan, serta elit-elit lain yang mempengaruhi, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan. Variabel ini lebih operatif dalam sistem demokrasi-kompetitif karena para pelaku pembuat keputusan lebih dapat terlihat dan terbuka terhadap kritikan-kritikan.

Peneliti juga mencermati mengenai variabel peranan, baik dari PM Sharon, Kabinet, Parlemen, partai politik, kelompok kepentingan, media, serta peran dari para elit politik yang mempengaruhi, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan berupa *Disengagement Plan*.

Variabel birokratis didefinisikan sebagai sesuatu yang menyangkut struktur dan proses pemerintahan serta efeknya terhadap politik luar negeri. Variabel ini meliputi struktur organisasi pemerintah, standar prosedur pelaksanaan perwakilan-perwakilan birokratis yang besar, proses pembuatan keputusan dan berbagai peringkat perumusan kebijakan, berbagai teknik implementasi keputusan politik, dan sikap para pejabat yang

menyangkut dampak politik luar negeri terhadap domestik dan kesejahteraan umum negara.

Variabel nasional berbicara mengenai atribut nasional yang mempengaruhi hasil politik luar negeri. Variabel ini lebih dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan yang pragmatis taktis dibandingkan keputusan krisis.

Variabel sistemik meliputi kebijakan-kebijakan dan tindakan negara-negara lain yang dapat merangsang respon politik luar negeri negara yang sedang dipelajari.

Keputusan politik luar negeri dalam kaitannya atau hubungannya dengan variabel-variabel diatas, dibagi menjadi tiga kategori:<sup>26</sup>

1. Keputusan pragmatik, yaitu keputusan besar dengan konsekwensi jangka panjang berdasarkan pada studi yang mendetail, pertimbangan yang matang, dan evaluasi secara seksama dengan melihat seluruh pilihan alternatif yang ada.
2. Keputusan krisis, yaitu keputusan yang dibuat pada saat adanya ancaman yang gawat dimana waktu yang tersedia amatlah singkat guna memberi tanggapan dan ada unsure mendadak yang memerlukan tanggapan dari *ad hoc* (tanpa terencana).
3. Keputusan taktis, keputusan penting yang terprogram atau terencana dan dapat direvaluasi, direvisi, serta dibatalkan.

#### 1.4.2.b. Teori Persepsi

Menurut teori ini, naluri dan kepribadian adalah segi-segi individual yang bersifat statik, sedangkan persepsi atau "*citra*" yang dimiliki individu bersifat dinamik, karena persepsi seringkali berubah.

<sup>26</sup> Mochtar Mas'ood, *Op. Cit.*, hal. 143-144

Menurut Kenneth Boulding, pada saat kita bereaksi terhadap dunia sekitar kita, sebenarnya kita bereaksi terhadap citra kita tentang dunia. Sedangkan dunia nyata dan persepsi kita tentang dunia nyata itu mungkin berbeda.<sup>27</sup>

Walaupun tidak tertutup kemungkinan adanya kesalahan, persepsi itu memainkan peran dalam menentukan perilaku negara. Menurut Thomas Franck dan Edward Weisband, yang menekankan pentingnya citra, berpendapat bahwa orang melakukan tindakan berdasarkan apa yang mereka ketahui dan tanggapan seseorang pada suatu situasi tergantung pada bagaimana ia mendefinisikan situasi itu.<sup>28</sup> Perbedaan dalam perilaku manusia berkaitan dengan perbedaan dalam cara memandang kenyataan.

Kemudian Bruce Russett dan Harvey Starr menjelaskan hubungan antara citra, persepsi, dan perilaku internasional sebagai berikut :<sup>29</sup>

Tahap pertama dalam proses pembuatan keputusan politik luar negeri adalah munculnya sebuah situasi (masalah), namun sebelum situasi itu muncul dan ditanggapi oleh para pembuat keputusan, ada tiga hal yang terjadi (diperhatikan). Pertama, adanya semacam stimulus atau rangsangan dari lingkungan yang disebut dengan "*trigger event*". Kedua, adanya upaya mempersepsi (proses yang diterapkan oleh individu untuk menyeleksi, menata, dan menilai informasi yang masuk tentang dunia sekitarnya) stimulus tersebut. Ketiga, harus ada upaya menafsirkan atau mendefinisikan stimulus yang telah dipersepsikan tersebut. Persepsi dan penafsiran itu sangat tergantung pada citra yang ada dalam benak si pembuat keputusan.

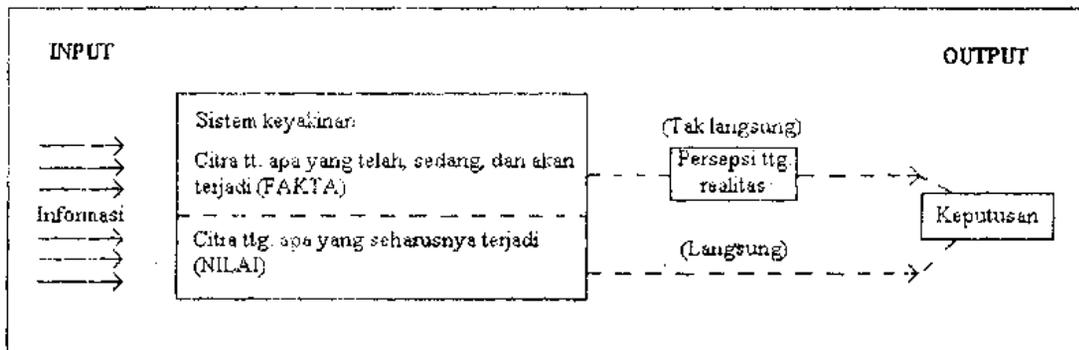
Ole R. Holsti membuat diagram yang menggambarkan persepsi dan hubungannya dengan citra dan system keyakinan (*believe system*) seperti terlihat dalam gambar I.1.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 19.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 20.

Gambar 1.1:  
Hubungan antara Sistem Keyakinan dengan Pembuatan Keputusan Politik Luar Negeri.



Sumber: Ole R. Holsti, "The Belief System and National Images: A Case Study", dikutip dalam Bruce Russett and Harvey Starr, *World Politics*, (New York: Freeman, 1985), hal. 30-1.

Tanggapan seseorang terhadap suatu situasi, atau stimulus, didasarkan pada persepsinya tentang situasi itu. Para pembuat keputusan seperti halnya manusia lainnya, dipengaruhi oleh berbagai proses psikologik yang mempengaruhi persepsi (misalnya, kehendak untuk merasionalisasikan tindakan, untuk mempertahankan pendapat sendiri, untuk mengurangi kecemasan, dsb.) dan proses psikologik lain yang membentuk kepribadiannya. Sistem keyakinan adalah sekumpulan keyakinan, citra, atau "model" tentang dunia yang dianut oleh seseorang.<sup>30</sup>

Menurut Holsti, sistem keyakinan terdiri dari serangkaian citra yang membentuk seluruh kerangka acuan atau sudut pandang (*universe*) seseorang. Citra-citra yang berkembang meliputi realitas masa lalu, masa kini dan realitas yang diharapkan di masa depan, serta preferensi nilai tentang apa yang seharusnya terjadi. Sistem keyakinan tersebut dapat membantu para pengambil keputusan berorientasi terhadap lingkungan, mengorganisasikan persepsi sebagai penuntun tindakan, menentukan tujuan, dan bertindak sebagai saringan dalam menyeleksi informasi dalam setiap situasi.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 21-22.

Agar para pembuat keputusan dapat melakukan tindakan dalam situasi dimana informasi sangat kompleks dan begitu berlimpah, mereka harus dapat menyaring segala informasi yang masuk, termasuk saringan persepsi atau dapat berupa persepsi selektif, yaitu proses dan mekanisme psikologik yang diterapkan oleh para pembuat keputusan untuk memproses informasi dan menyeleksi berdasar citra yang dipegangnya.<sup>31</sup> Adapun tiga mekanisme yang dapat mempengaruhi sebuah persepsi, antara lain:

1. Konsistensi kognitif, yaitu suatu cara yang dilakukan agar berbagai citra yang mereka pegang tidak saling bertentangan.
2. *The Evoked Set*, yaitu pembangkitan kembali kenangan akar peristiwa yang terjadi di masa lalu.
3. *Wishful thinking*, yaitu proses dengan mana seseorang secara sadar atau tidak menginterpretasikan suatu fakta sedemikian rupa sehingga sesuai dengan keinginan dan kayakinannya.

#### **I.4.2.c. Teori Pengambilan Keputusan Secara Rasional (*Rational Decision Making in Foreign Policy Analysis*)<sup>32</sup>.**

Menurut teori ini, politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual yang dapat dipengaruhi system. Negara sebagai aktor diartikan para *decision makers* negara tersebut yang bertindak sebagai aktor. Tindakan mereka berdasarkan pada bagaimana mereka mendefinisikan dan menerjemahkan situasi internasional, yaitu mencakup persepsi, choice, dan ekspektasi

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 23-24.

<sup>32</sup> Mengenai *foreign policy analysis*, dapat dilihat pada buku *Encyclopedia of American Foreign Policy*, volume 1, pengarang Alexander deConde, Richard Dean Burns, and Fredrick Lovegall, (New York: Charles Scribner's Sons, 2002), hal. 427-437. Dalam buku ini tertera dengan jelas tentang berbagai perspektif dalam analisa kebijakan luar negeri dan pembuatan keputusan termasuk teori rational choice.

(*expectation*). Persepsi didefinisikan sebagai cara pandang seseorang dalam melihat lingkungan (dunia) di sekitarnya baik internal maupun eksternal.

K.J. Holsti meneliti bahwa manusia bertindak dan bereaksi berdasarkan persepsinya terhadap lingkungan. Lingkungan eksternal secara keseluruhan mencakup faktor-faktor dan kondisi di luar batas-batas negara termasuk perilaku negara lain, maupun masyarakat internasional. Sedangkan faktor internal termasuk politik dalam negeri, opini publik, atau posisi geografi. Aktor merumuskan sebuah tindakan atau kebijakan berdasarkan pandangannya terhadap situasi, peristiwa, dan aktor lain yang terlibat. Persepsi terdiri dari tiga komponen, yaitu:<sup>33</sup>

1. Nilai (*values*), sesuai yang mendorong individu untuk menentukan dan memilih suatu kondisi, situasi atau obyek dari orang lain.
2. Keyakinan (*beliefs*), tanggapan terhadap realitas tertentu yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang konsisten dalam menyikapi lingkungan yang dihadapi.
3. Pengamatan (*cognition*), tanggapan terhadap berbagai informasi yang diterima dan dirasakan oleh individu tentang lingkungan sekitar yang dirasakan atas nilai dan keyakinan.

Teori *rational decision making* digunakan untuk menjelaskan individu sebagai pemegang peranan dalam perumusan sebuah kebijakan luar negeri.<sup>34</sup> Teori ini berasumsi bahwa seorang individu mengambil sebuah keputusan berdasarkan pada situasi internasional yang dipersepsikan secara logis. Ia menggunakan seluruh informasi yang

<sup>33</sup> Daniel S Papp, *Contemporary International Relations: Frameworks for Understanding*, second edition, (New York: Macmillan Publishing Company, 1984), hal. 154.

<sup>34</sup> Richard C. Snyder, H.W. Bruck, and Burton Sapin, "The Decision-Making Approach to the Study of International Politics", James N. Rosenau (ed), *International Politics and Foreign Policy: A Reader on Research and Theory*, (New York: The Free Press, 1969), hal. 199.

diterima kemudian meresponnya secara agresif untuk memaksimalkan tujuan tanpa melibatkan unsur-unsur psikologisnya. Dalam teori ini, pengambil keputusan mengikuti sejumlah prosedur yang harus dilakukan dalam membuat suatu keputusan, yaitu keharusan menetapkan situasi berdasarkan informasi yang diperoleh, kemudian menetapkan tujuan serta alternatif.

#### 1.4.2.d. Konsep Strategi

Strategi merupakan konsep yang didefinisikan sebagai seni dan ilmu untuk menggunakan segala daya yang dimiliki baik ekonomi, militer, maupun diplomasi dalam semua situasi dan kondisi untuk mencapai tujuan nasional.<sup>35</sup> Strategi dapat juga diartikan sebagai usaha untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan, dimana dalam proses pencapaiannya dibutuhkan seni tersendiri termasuk bagaimana mengelola kekuatan yang dimiliki dengan baik dan benar.

Cathal J. Nolan mendefinisikan strategi sebagai suatu rencana besar untuk mencapai tujuan utama militer atau politik dengan cara apapun baik politik, ekonomi, militer atau diplomasi.<sup>36</sup>

Sedangkan Robert Nield mendefinisikan strategi sebagai suatu seni meraih tujuan politik dengan penggunaan alat-alat militer.<sup>37</sup> Lebih lanjut, Nield mengemukakan dalam menformulasikan strategi langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan politik. Tanpa tujuan politik, kerusakan yang dihasilkan dari perang akan menjadi sia-sia dan kepemilikan atas alat-alat militer dalam masa damai akan menjadi tak berarti.

<sup>35</sup> Douglas J. Murray dan Paul R. Viotti, *The Defence Policies of Nations: A Comparative Study*, (London, 1982), hal. 21.

<sup>36</sup> Cathal J. Nolan, *The Greenwood Encyclopedia of International Relation vol. 4 S-Z*, (London: Greenwood Press, 2002), hal. 1602.

<sup>37</sup> Robert Nield, *An Essay on Strategy: As It Affects the Achievement of Peace in a Nuclear Setting*, (London: The Macmillan Press Ltd, 1990), hal. 1.

Setelah tujuan politik ditentukan, alat-alat militer harus diseleksi dan disesuaikan dengan tujuan yang dikehendaki.

Strategi menggambarkan rencana operasional terpadu pemerintah suatu negara memanipulasi semua instrumen yang ada, militer maupun non militer, dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh negara tersebut atas negara lain, baik itu sekutu, negara netral, dan musuh mereka yang potensial dan aktual.<sup>38</sup>

Hadi Soesastro mendefinisikan strategi dalam dua jenis pengertian, yaitu secara sempit dan luas. Secara sempit, strategi adalah kiat atau seni dengan menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh politik, dan secara luas strategi adalah kiat untuk menggunakan semua jenis kekuatan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh politik.<sup>39</sup>

Asumsi dari strategi menurut Mochtar Mas'ood, bahwa perilaku pembuat keputusan politik luar negeri adalah rasional, artinya pemilihan suatu strategi sungguh-sungguh didasarkan pada pertimbangan untung rugi dalam pencapaian tujuan yang jelas.<sup>40</sup>

Patrick Morgan mengemukakan beberapa asumsi dasar strategi, yaitu:<sup>41</sup>

1. Perilaku politik luar negeri suatu negara-bangsa pasti diarahkan untuk mencapai satu atau beberapa tujuan nasional. Setiap tindakan yang diambil pasti dimaksudkan ke arah pencapaian tujuan itu.

<sup>38</sup> J. Harould dan Margareth Sprouch, *Foundation of International Politics*, (New Jersey: D. Van Nostrad Company Inc, 1962), hal. 58.

<sup>39</sup> Hadi Soesastro, *Strategi Hubungan Internasional Indonesia di Kawasan Asia Pasifik*, (Jakarta: CSIS, 1988), hal. 171.

<sup>40</sup> Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 246.

<sup>41</sup> Patrick Morgan, *Op.Cit.*, hal. 90-91.

2. Para pembuat keputusan selalu berusaha memaksimalkan perolehan bagi negara-bangsanya. Hal ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai alternatif tindakan, masing-masing dinilai berdasarkan analisis biaya dan hasil. Alternatif tindakan yang diambil adalah memenuhi kriteria efisiensi (memaksimalkan perolehan).
3. Dalam dunia yang saling bergantung ini berarti bahwa para pembuat keputusan itu harus memperhitungkan juga tujuan dan strategi berbagai negara-bangsa lain.

### 1.5. Argumen

Keputusan PM Sharon untuk tetap menjalankan atau melanjutkan kebijakan sepihaknya yang berupa *Disengagement Plan* (DP) dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, faktor ideosinkretik (individu) dari PM Ariel Sharon, faktor persepsi dari PM Sharon sebagai *top decision makers*, dan faktor peranan elit politik di Israel.

Faktor ideosinkretik berkaitan dengan karakteristik dan kemampuan personal PM Sharon dalam memimpin pemerintahan, merumuskan kebijakan, dan memutuskan sebuah kebijakan yang kontroversial yang meliputi strategi dan manuver politik yang dilakukannya dengan melihat kondisi dalam dan luar negeri. Kepentingan yang ingin dicapai yaitu menciptakan Israel Raya yang meliputi Jordan, Mesir, Suriah, Lebanon, Jalur Gaza dan Tepi barat dengan Jerusalem sebagai ibu kota negara Israel. Dan pengalaman pribadi PM Sharon saat masih kecil yang hampir tewas akibat serangan militan Palestina, bergabung dengan gerakan bawah tanah Israel (teroris, Haganah pada masa remaja, menjadi Jenderal dalam militer Israel (IDF), dan terjun dalam dunia politik dengan bergabung dengan partai Likud yang berhaluan kanan radikal terutama menyangkut penyelesaian konflik dengan Palestina.

Faktor persepsi, dalam hal ini merupakan asumsi, keyakinan, nilai, berdasarkan pengamatan PM Sharon terhadap masalah-masalah domestik Israel serta lingkungan luar seperti Palestina dan hubungan Israel dengan negara-negara lain di dunia.

Faktor peranan elit politik di Israel, lebih menekankan pada pengaruh atau dampak (dukungan) yang diakibatkan oleh para elit politik (orang-orang disekitar PM Sharon yang memiliki persamaan kepentingan) dalam sebuah proses kebijakan politik luar negeri Israel.

## **I.6. Metodologi Penelitian**

### **I.6.1. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif. Disebut dengan penelitian deskriptif karena bermaksud untuk melakukan pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, dengan mengembangkan konsep tertentu dan menghimpun data, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.<sup>42</sup>

### **I.6.2. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dibatasi sejak terpilihnya (menjabat) Ariel Sharon sebagai Perdana Menteri Israel pada awal tahun 2001 hingga dilaksanakannya kebijakan penarikan mundur yang dinamakan *Disengagement Plan* pada akhir tahun 2005.

### **I.6.3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur atau studi pustaka (*library research*).<sup>43</sup> Oleh karena itu, pembahasan studi ini didasarkan pada dukungan sumber-sumber pustaka atau data sekunder yang ada. Metode pengumpulan

<sup>42</sup> Masri Singarimbun, "Metode dan Proses Penelitian", dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed), *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hal. 4.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 57.

data sekunder diambil dari buku, artikel, situs-situs internet, jurnal ilmiah, makalah, dan surat kabar.

#### 1.6.4. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan memilah-milah data lalu kemudian dihubungkan, diberi makna, dan kemudian dianalisis.<sup>44</sup> Metode ini digunakan untuk mencari penjelasan masalah tidak dengan menggunakan data-data kuantitatif atau angka-angka, tetapi berupa pernyataan-pernyataan yang merupakan penjelas. Data yang berupa angka-angka merupakan data pendukung yang bersifat memperkuat atau mendukung fakta.

#### 1.6.5. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri atas empat bab, yang bertujuan untuk memudahkan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi PM Ariel Sharon tetap melaksanakan kebijakan *disengagement plan*. Pada bab pertama akan di paparkan mengenai pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritis, hipotesis, metodologi penelitian, tipe penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

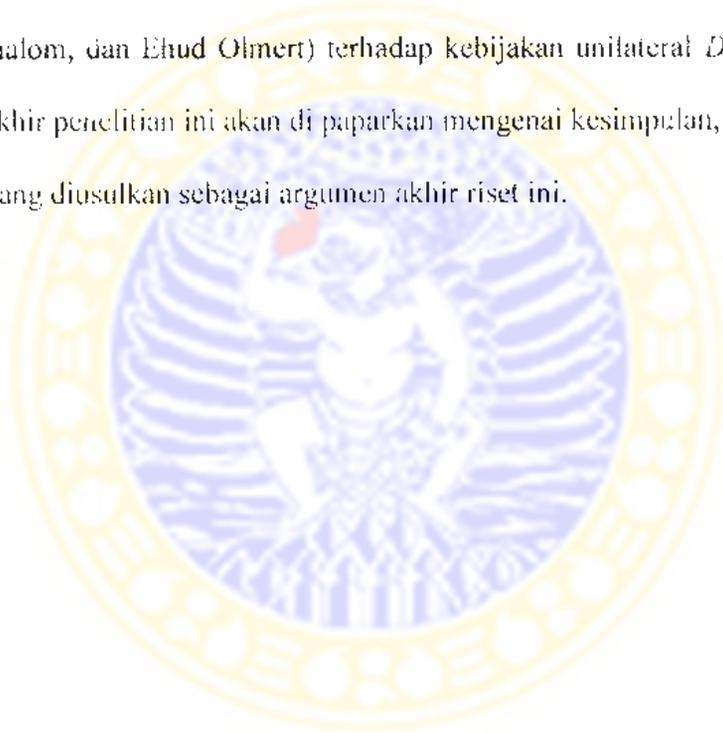
Kemudian pada bab kedua akan lebih memaparkan mengenai pragmatisme kebijakan Ariel Sharon sebagai perdana menteri Israel, yang berisi tentang penjelasan dan gambaran yang jelas mengenai politik luar negeri Israel di masa PM Ariel Sharon, masalah keamanan yang mendominasi kebijakan PM Sharon, peta jalan damai sebagai sebuah solusi perdamaian antara Israel-Palestina, tembok pemisah sebagai sebuah solusi

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 4-5

keamanan Israel, hancurnya koalisi kabinet pemerintahan PM Ariel Sharon, kemenangan PM Sharon dalam pemilu tahun 2003, dan status wilayah Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Pada bab ketiga dari penelitian ini akan di paparkan mengenai peran elit politik di sekitar PM Ariel Sharon dalam perumusan kebijakan *disengagement plan*, yang berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang dan ideologi PM Sharon sebagai perumus kebijakan tertinggi (*top decision makers*), dukungan politik dan peran dari para elit politik di Israel (khususnya orang-orang di sekitar PM Sharon, seperti Simon Peres, Shaul Mofaz, Silvan Shalom, dan Ehud Olmert) terhadap kebijakan unilateral *Disengagement Plan*. Dan pada akhir penelitian ini akan di paparkan mengenai kesimpulan, yang memuat temuan-temuan yang diusulkan sebagai argumen akhir riset ini.



## BAB II

### PRAGMATISME KEBIJAKAN PM ARIEL SHARON

#### II.1. Politik luar negeri Israel di masa PM Ariel Sharon

Pada bulan Maret 2001, PM Ariel Sharon membentuk sebuah kabinet pemerintahan persatuan nasional yang terdiri atas aliansi kaum nasionalis Yahudi radikal, penghuni pemukiman Yahudi, Yahudi ortodoks, dan imigran Yahudi asal Rusia.<sup>1</sup> Partai-partai yang tergabung dalam pemerintahan persatuan nasional PM Sharon antara lain, partai Likud, partai Buruh (Labor-Meimad), partai Shas, partai Tengah (Center Party), partai Ma'fal, partai Yahadut Hatorah, partai Yisrael B'Aliya, dan partai Ichud Leumi-Yisrael Beteinu.<sup>2</sup>

Kabinet koalisi pemerintahan PM Ariel Sharon secara umum merumuskan tujuan nasional pemerintah yang ingin dicapai,<sup>3</sup> meliputi (a) menjaga atau menjamin keamanan nasional dan keamanan pribadi setiap warga negara Israel; (b) mewujudkan keamanan dan perdamaian yang sejati antara Israel dengan negara-negara tetangga berdasarkan pada perjanjian perdamaian yang stabil; (c) menciptakan kondisi yang kondusif guna pembangunan perekonomian yang bebas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial; (d) menjamin status Jerusalem sebagai ibu kota negara Israel; (e) mengusahakan peningkatan sektor pendidikan dan melestarikan atau memperkuat koneksi warisan budaya Yahudi dan perwujudan dari zionisme; (f) menanggulangi kemiskinan dan

<sup>1</sup> Musthafa Abd. Rahman, *Dilema Israel: Antara Krisis Politik dan Perdamaian*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), hal. 128.

<sup>2</sup> *Factional and Government Make-Up of the Fifteenth Knesset*, diambil dari [http://www.knesset.gov.il/history/eng/eng\\_hist15\\_s.htm](http://www.knesset.gov.il/history/eng/eng_hist15_s.htm), diakses pada tanggal 13 desember 2006.

<sup>3</sup> *29<sup>th</sup> Government of Israel*, diambil dari [www.mfa.gov.il](http://www.mfa.gov.il), diakses pada tanggal 13 November 2006.

pengangguran, memperbaiki kesenjangan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup di kota-kota berkembang, lingkungan yang kekurangan dan daerah lainnya yang kesusahan; (g) mendukung gerakan *Aliyah* (imigrasi bangsa Yahudi ke negara Israel yang terdiaspora) dan mensukseskan usaha penyerapan imigran kedalam kehidupan sosial masyarakat Israel; (h) memperkuat, memperluas, dan mempromosikan pemukiman atau berbagai fasilitas umum lainnya keseluruh wilayah; (i) memberikan dukungan atau memperkuat demokrasi, hak asasi manusia, dan peraturan hukum; (j) mempromosikan kesetaraan atau persamaan hak diantara berbagai bidang dan kelompok suku dalam masyarakat Israel.<sup>4</sup>

## II.2. Masalah keamanan mendominasi kebijakan PM Ariel Sharon

Sejak meletusnya intifada Al Aqsa pada bulan September 2000 atas kunjungan provokatif Ariel Sharon ke kompleks peribadatan masjid Al Aqsa di Jerusalem Timur dengan membawa 1000 personel militer bersenjata,<sup>5</sup> isu-isu keamanan mendominasi bentuk-bentuk kebijakan luar negeri Israel dimasa PM Ariel Sharon, yang cenderung bersifat keras ke arah perang terbuka guna mengatasi masalah Intifadah Al Aqsa dan serangan-serangan militan Hamas, Islam Jihad, dan Hizbulah terhadap Israel.<sup>6</sup>

Untuk pertama kalinya sejak perang enam hari tahun 1967, pesawat tempur Israel mengebom wilayah Palestina pada bulan Mei 2001 dan menewaskan lima warga Palestina.<sup>7</sup> Serangan yang dilakukan Israel ini membawa reaksi balasan dari para militan Hamas pada bulan Juni 2001 dengan melakukan bom bunuh diri di Tel Aviv yang

<sup>4</sup> *Guidelines of the Government of Israel - March 2001*, diakses dari [www.mfa.gov.il](http://www.mfa.gov.il), tanggal 13 November 2006.

<sup>5</sup> "Intifadah Al-Aqsa", diakses dari [www.infopalestine.com](http://www.infopalestine.com), tanggal 29 September 2005.

<sup>6</sup> "Dampak Kemenangan Ariel Sharon", diambil dari *Republika*, 8 Maret 2003.

<sup>7</sup> "Jejak Berdarah Intifadah", diambil dari *Koran Tempo*, tanggal 5 Oktober 2004.

menewaskan sedikitnya 23 warga Israel.<sup>8</sup> Guna menghentikan atau meredam serangan para militan Palestina, pada bulan Agustus 2001 Israel kemudian memounuh pemimpin kelompok radikal Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP) Abu Ali Mustafa.<sup>9</sup>

Perubahan situasi politik internasional akibat serangan teroris terhadap gedung WTC dan Pentagon AS pada bulan September 2001, dimanfaatkan oleh PM Sharon guna lebih mengintensifkan serangan militer Israel dengan eskalasi yang lebih massif guna memburu dan membunuh para militan Palestina.<sup>10</sup>

Aksi saling balas membalas diantara pihak Israel dengan Palestina terus berlanjut dengan adanya pembunuhan yang dilakukan sayap militer PFLP terhadap menteri pariwisata Israel ekstrimis Rehavam Zeevi di restoran Rejinsy di Jerusalem pada bulan Oktober 2001.<sup>11</sup>

PM Ariel Sharon menerapkan politik baru yang sangat konfrontatif terhadap Palestina. Terlihat dengan adanya kunjungan PM Sharon ke Washington guna berusaha meyakinkan pusat-pusat penentu kebijakan di AS, khususnya Presiden George W Bush, bahwa aksi kekerasan berdarah di wilayah Palestina diatur dan didalangi oleh otoritas Palestina di bawah pimpinan Yasser Arafat. PM Israel itu juga berupaya memberi kesan bahwa Yasser Arafat merupakan teroris yang mengancam keamanan kawasan. PM Sharon pun memberikan syarat, bahwa perundingan damai hanya bisa digelar lagi setelah terhenti aksi kekerasan.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> "Dampak Kemenangan Ariel Sharon", *Op.Cit.*

<sup>11</sup> Ibrahim Al Said, "Intifada Hancurkan Masyarakat Zionis", diakses dari <http://www.infopalestina.com/analisa/intifadah%20hancurkan%20masyarakat%20zionis.htm>, tanggal 8 Oktober 2005.

<sup>12</sup> "Liga Arab: Antara Harapan dan Keniscayaan", diakses dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak/010401/liga03.htm>, tanggal 1 April 2001.

PM Sharon bahkan tidak cuma akan bersikap keras terhadap Palestina, tetapi juga Suriah dan Lebanon. Beliau mengatakan, Lebanon telah menjadi pusat teroris dan Suriah ikut melindunginya. Presiden Suriah Bashar Assad balik membalas cukup keras tuduhan Israel itu. Dalam pidato di forum KTT Arab, Bashar menyebut Israel lebih rasialis dari Nazi.

PM Sharon kemudian melancarkan aksi ambisius yang diberi nama operasi 100 hari untuk meredam intifada Palestina. Salah satu bentuk operasi tersebut adalah aksi blokade total atas kota-kota Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Dan puncaknya gempuran Israel atas kota Gaza dan Ramallah, yakni setelah beberapa jam berakhirnya KTT Arab di Amman.

PM Sharon menyatakan bahwa pasukan Israel yang sekarang mengepung enam kota Palestina di kawasan Tepi barat akan ditarik mundur. Janji tersebut dikeluarkan Sharon setelah tiga orang Palestina tewas dalam bentrokan dengan tentara Israel di dekat kota Bethlehem. PM Sharon berkata kepada kabinetnya, tentara Israel akan tetap ditempatkan di Tepi barat guna mencegah serangan baru terhadap Israel, seperti pembunuhan atas menteri pariwisata Rehavam Zeevi.

Meskipun PM Sharon sudah menyatakan akan menarik pasukannya dari Palestina, namun agresi yang dilakukan pasukan Israel masih tetap beroperasi, seperti pengepungan Yasser Arafat di Ramallah pada bulan desember 2001, dan sejak saat itu Arafat tidak pernah meninggalkan Ramallah karena dicegah oleh pihak Israel.<sup>13</sup>

PM Israel Ariel Sharon menegaskan bahwa dirinya tidak akan melanjutkan perundingan damai dengan Palestina, hingga pimpinan Palestina mengadakan

<sup>13</sup> "Jejak Berdarah Intifadah". *Op.Cit.*

pembaharuan organisasi yang menyeluruh, dan menghentikan semua serangan teroris atas Israel.<sup>14</sup>

Sharon mengatakan dalam pidatonya di parlemen menyatakan, bahwa otoritas Palestina adalah pemerintahan yang korup dan diktatorial, dan karenanya harus diadakan perombakan struktural, supaya bisa diadakan perdamaian Israel-Palestina yang permanen. PM Sharon menyatakan guna perumusan perjanjian perdamaian sementara, yang nantinya dapat mejurus kepada pembentukan sebuah negara Palestina, semua syarat tersebut harus dapat dipenuhi.

Kebijakan garis keras yang dilakukan militer Israel berdasarkan pada keputusan sidang kabinet terbatas Israel urusan politik dan keamanan pemerintahan PM Sharon pada awal juli 2001, yang menyatakan akan meningkatkan aksi memburu dan membunuh para aktivis pejuang Palestina.<sup>15</sup>

Media massa Israel mengungkapkan, sedikitnya 26 aktivis Palestina akan diburu dan dibasmi dimanapun mereka berada. Pada bulan juli 2001, Israel dengan menggunakan helikopter tempur Apache berhasil membunuh tiga anggota Jihad Islam di kota Jenin (Tepi Barat) dan berselang tiga hari kemudian Israel menembak aktivis Fatah Azzam Atnache di Hebron. Meskipun tidak tewas, namun kondisi Azzam sekarat dirawat si rumah sakit Alia di Hebron.<sup>16</sup>

PM Sharon melalui keputusan kabinet Israel urusan politik dan keamanan tersebut telah menguburkan dua perangkat usaha damai yaitu dokumen direktur CIA George Tenet dan rekomendasi komisi komisi pimpinan mantan senator AS George Mitchell

<sup>14</sup> "Ariel Sharon Tolak Perundingan Damai Sampai Ada Reformasi Struktural di Palestina", diakses dari <http://voanews.com/indonesian/archive/2002-05/02-05-15-1-1.cfm>, tanggal 15 Mei 2002.

<sup>15</sup> Musthafa Abd. Rahman, "Dilema Israel: Antara Krisis Politik dan Perdamaian", (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), haf. 167.

<sup>16</sup> *Ibid.*

mengenai gencatan senjata antara Israel dengan Palestina dan membawa kedua belah pihak ke meja perundingan guna penyelesaian konflik antara Israel-Palestina sejak meletusnya intifadah Al Aqsa.<sup>17</sup>

Keputusan kabinet tersebut juga menggagalkan misi kunjungan menteri luar negeri AS Colin Powell, yang mengagendakan kunjungannya ke Timur Tengah pada awal juli 2001 guna mengukuhkan kesepakatan gencatan senjata dan membuat agenda waktu bagi pelaksanaan rekomendasi komisi Mitchell.

Menlu AS Collin Powel menyatakan menolak kebijakan Israel memburu dan membunuh para aktivis Palestina, begitu pula dengan menteri perencanaan dan kerjasama internasional Palestina Nabil Shaath dan Menlu Mesir Ahmed Maher yang menyebutkan mengutuk kebijakan yang telah diputuskan kabinet pemerintahan PM Sharon karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta bertentangan dengan etika kehidupan demokrasi.

Meskipun banyak tekanan dari dunia internasional yang menghendaki dihentikannya kebijakan garis keras yang diterapkan PM Sharon, namun beliau tidak memperdulikan dan cenderung tetap mempertahankan kebijakannya tersebut dengan alasan keamanan dan terorisme.

Keputusan pemerintah Israel untuk meningkatkan serangannya atas Palestina itu telah menimbulkan keretakan dalam tubuh kabinet pemerintahan PM Sharon, dan karenanya beberapa anggota partai buruh mengisyaratkan akan keluar dari koalisi pemerintahan tersebut. Para pejabat Palestina menuduh Israel melancarkan serangan-

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 168.

serangan itu untuk merebut kembali kawasan-kawasan yang dikembalikan kepada Palestina sesuai dengan perjanjian Oslo tahun 1993.<sup>18</sup>

Pada awal Juni 2002, dua anggota sayap militer Hamas, Brigade Ezzedin al-Qassam, tewas oleh serangan Israel di kota Tulkarem, Tepi Barat.<sup>19</sup> Kemudian seorang anggota Brigade Martir Al-Aqsa, sayap militer kelompok politik Pemimpin Palestina Yasser Arafat tewas dalam bentrokan dengan militer Israel di Jalur Gaza. Sehari setelah serangan tersebut, empat tentara Israel dan tiga militan Palestina tewas dalam serangan ke pos militer Israel di Erez (perbatasan Jalur Gaza dengan Israel), serta seorang serdadu Israel tewas ditembak di kota Hebron (Tepi Barat) oleh dua orang militan Palestina yang juga tewas kemudian.

Menginjak pertengahan bulan Juni 2002, Dua militan Palestina ditembak mati militer Israel saat mencoba memasuki pemukiman Yahudi di Jalur Gaza bagian utara. Seorang warga Palestina juga tewas di tembak dan tiga lainnya luka-luka dalam serangan militer Israel di Jenin (Tepi Barat). Seorang warga Palestina tewas ditembak pasukan Israel dalam insiden di pos perbatasan kota Khan Yunis, sebelah selatan Jalur Gaza.

Sebuah helikopter Israel melancarkan serangan rudal yang hampir menewaskan pemimpin politik Hamas, Abdel Aziz al-Rantissi di kota Gaza, namun membunuh dua warga Palestina lainnya. Tiga bersaudara warga Palestina tewas di rumahnya dan 17 orang luka-luka ketika helikopter Israel menembakkan rudal ke sebuah mobil di dekat kota Jabalya (Jalur Gaza).

Pertemuan antara PM Sharon dengan PM Abbas pada pertengahan Juni 2003, berakhir tanpa hasil konkret. Pertemuan kedua pemimpin yang bersengketa tersebut

<sup>18</sup> "Perpecahan Kabinet: PM Sharon Berjanji Tarik Pasukan Israel di Palestina", diakses dari <http://www.yahoo.com/indonesia/archive/2001-10-22/2001-10-22-4-1.cfm>, tanggal 22 Oktober 2001.

<sup>19</sup> "Peta Damai di Ujung Tanduk", diambil dari Koran Tempo, 14 Juni 2003.

hanya menghasilkan kesepakatan untuk melakukan pembicaraan lanjutan.<sup>20</sup> Secara otomatis, pertemuan kedua pemimpin tersebut gagal menghentikan aksi kekerasan diantara kedua belah pihak, karena pertemuan tersebut di jadwalkan sebagai titik upaya penghentian kekerasan yang mulai meningkat sejak 31 bulan yang lalu.

PM Sharon tidak akan mengizinkan seorang pun warga Arab kembali ke kampung halamannya yang sekarang menjadi wilayah Israel. Meskipun hal tersebut di syaratkan dalam peta jalan damai yang sedang dijalankan.<sup>21</sup> Beliau menyatakan, “ Saya tidak akan membiarkan pengungsi Palestina masuk Israel, tidak akan pernah”, dalam pertemuan pertemuan partai Likud. PM Sharon menambahkan, “Saya sudah menjelaskan sebelumnya, dan mengulanginya lagi di Aqaba, bahwa pemecahan masalah pengungsi palestina tidak akan di temukan di wilayah Israel, dimana pemerintah Amerika sangat memahami ancaman keberadaan Israel jika pengungsi Palestina kembali ke Israel”.

PM Sharon membatalkan rencana pertemuan dengan PM Palestina Ahmad Qorei, setelah adanya serangan bom bunuh diri di pelabuhan Ashdod, yang menewaskan 10 warga Israel.<sup>22</sup> PM Sharon menegaskan pada akhir bulan Oktober 2002, akan membalas jika Presiden Irak Saddam Hussein menyerang. Ini adalah pernyataan publik pertama yang disampaikan PM Sharon mengenai Irak.<sup>23</sup>

Beliau menyatakan, “Israel tak tertarik terlibat dalam kampanye menentang Irak. Kami akan mendukung keputusan AS (agar tidak akan ikut campur dalam masalah Irak, guna mempermudah dukungan Timur Tengah terhadap AS dalam penyerangannya ke

<sup>20</sup> “Pertemuan Abbas-Sharon tanpa Hasil”, diambil dari Koran Tempo, 19 Juni 2003.

<sup>21</sup> “Sharon Tolak Pengungsi Palestina”, diambil dari Koran tempo, 10 Juni 2003.

<sup>22</sup> “Sharon Batal Bertemu Qorei”, diambil dari Republika, 16 Maret 2004.

<sup>23</sup> “ Israel akan Balas Irak”, diambil dari Republika, 22 Oktober 2002.

Irak) dan menunjukkan sensitivitas terhadap kepentingan AS dengan menerapkan pengendalian diri secara maksimal”.

Kemudian beliau menekankan, “Di saat bersamaan, bila warga kami diserang oleh senjata pemusnah massal, kimia, biologi, atau oleh aksi teror lainnya dan jatuh korban, maka Israel akan membalas”. Pada saat yang sama, PM Sharon juga menyinggung bahaya yang disebutnya dilancarkan oleh Suriah dan Iran karena dianggap memicu ketegangan di perbatasan utara Israel. Untuk Iran, tuduhan PM Sharon menggambarkan Iran memberikan para teroris sekitar 9.000 hingga 10 ribu roket, termasuk yang terbaru dengan jangkauan hingga 200 mil.

PM Sharon menolak terbetuknya negara Palestina pada pertengahan Juni 2002. Penolakan tersebut disampaikan setelah terjadi aksi bom syahid yang menewaskan 17 orang. “Apa negara Palestina yang Anda maksud?”, ujar PM Sharon dengan nada skeptis.<sup>24</sup> Beliau menambahkan, “Apa yang kita saksikan hari ini adalah aksi terorisme Palestina yang terus berlanjut, dan kita harus memerangi terorisme tersebut. Kita harus bertindak, bergerak dan itulah yang akan kita lakukan”. Hanya beberapa jam sebelum pertemuan PM Sharon dengan Presiden AS George W. Bush di Washington, sekitar 70 tank, kendaraan lapis baja, dan jip militer Israel dengan perlindungan udara dari helikopter tempur Apache pada pertengahan Juni 2002 kembali menyerang kota Ramallah, Bira, dan kamp pengungsi Amari.<sup>25</sup>

Israel tolak tim pencari Fakta PBB atas kejadian di Jenin. Penolakan tersebut disampaikan Menlu Israel Shimon Peres dalam siaran radio Israel, beberapa saat sebelum tim pencari fakta tiba di ibu kota Israel, Tel Aviv.

<sup>24</sup> “Sharon Tampik Usul Negara Palestina”, diambil dari Republika, 19 Juni 2002

<sup>25</sup> “Israel Kembali Serang Ramallah”, diambil dari Kompas, 11 Juni 2002.

Israel pada awal April 2002, memperluas serangannya ke wilayah Tepi Barat dan merebut Nablus(kota terbesar bangsa Palestina), dan hanya menyisakan Jericho dan Hebron sebagai kawasan damai.<sup>26</sup> Perundingan antara Israel-Palestina pada akhir April 2002 untuk mengakhiri pengepungan selama tiga minggu yang dilakukan pihak Israel atas gereja tempat kelahiran Yesus di Bethlehem, dimana di dalamnya terdapat warga Palestina bersenjata gagal mencapai kesepakatan.<sup>27</sup>

Pasukan Angkatan Darat Israel pada awal Maret 2002, melancarkan operasinya di kamp-kamp pengungsi di Tepi Barat dan Gaza. Beberapa helikopter Israel menghajar markas-markas keamanan Palestina di Ramallah, dekat kompleks kantor Yasser Arafat. Setidaknya 16 warga Palestina tewas menyusul serangan berdarah militan Palestina yang merenggut 22 jiwa warga Israel.<sup>28</sup> Israel pada pertengahan bulan Maret 2002 mengklaim telah menarik pasukannya dari kota Ramallah, Tulkarem, Kalkiya, dan Bethlehem di Tepi Barat dan kamp pengungsi Al Boriej di Jalur Gaza, setelah mendapat tekanan dari pemerintah AS.<sup>29</sup>

Setelah bertemu dengan utusan AS Anthony Zinni pada bulan Maret 2002, kantor PM Sharon mengeluarkan pernyataan yang isinya menyinggung soal pertemuan antara Israel dengan Palestina. Disebutkan, akan ada pertemuan tiga arah antara PM Sharon, pejabat Palestina, dan Zinni.<sup>30</sup> Menurut pemerintah Israel, pertemuan ini bertujuan untuk menetapkan tanggal deklarasi gencatan senjata. Namun pemerintah Israel menyatakan mundur dari rencana pertemuan yang dilontarkan Zinni. Bahkan mereka menuding pers

<sup>26</sup> "Israel Caplok Nablus", diambil dari *Republika*, 5 April 2002.

<sup>27</sup> "Perundingan Israel Palestina Gagal", diambil dari *Suara Pembaharuan*, 24 April 2002.

<sup>28</sup> "Kamp Pengungsi di Tepi Barat Jadi Sasaran Operasi Israel", diambil dari *Suara Karya*, 5 Maret 2002.

<sup>29</sup> "Israel Tarik Pasukannya dari Wilayah Palestina", diambil dari *Kompas*, 16 Maret 2002.

<sup>30</sup> "Israel-Palestina Tolak Berunding", diambil dari *Republika*, 18 Maret 2002.

sebagai pemicu kekisruhan ini. Sebelumnya PM Sharon menetapkan berbagai syarat untuk perundingan gencatan senjata, termasuk tujuh hari masa tenang.

AS dan Israel pada awal bulan Agustus 2002, menandatangani sebuah kesepakatan yang ditujukan untuk melindungi warga negara masing-masing negara agar tidak dapat diseret ke Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) di Den Haag Belanda.<sup>31</sup> Israel dan Yordania bertemu membahas kemungkinan membangun kembali jaringan pipa minyak dari Irak ke Israel melalui Yordania setelah ditutup selama 55 tahun.<sup>32</sup>

Hasil muktamar partai Likud pada pertengahan bulan Mei 2002, menegaskan penolakan pembentukan negara Palestina merdeka. Sikap keras partai Likud ini menjadi pukulan keras terhadap usul perdamaian Arab Saudi, yang diadopsi sebagai rencana perdamaian Arab dalam pertemuan puncak Liga Arab bulan Maret 2002 di Beirut, Lebanon.<sup>33</sup> Usul perdamaian Arab Saudi berintikan seruan penarikan mundur Israel dari wilayah Arab-Palestina yang diduduki sejak perang tahun 1967. Sebagai imbalannya Arab-Palestina menormalisasi hubungan dengan Israel dan mengakui eksistensinya sebagai negara.

### II.3. Peta jalan damai sebagai solusi perdamaian antara Israel-Palestina

Saat pertama menduduki kursi kepresidenan Amerika Serikat, George W. Bush tampaknya menghindari keterlibatan yang lebih substansial dalam konflik Israel-Palestina.<sup>34</sup> Namun kejadian pemboman menara WTC pada tanggal 11 September 2001, eskalasi kekerasan di Timur Tengah, pembentukan opini publik oleh Israel untuk

<sup>31</sup> AS-Israel Teken Perjanjian Antiekstradisi", diambil dari *Republika*, 6 Agustus 2002.

<sup>32</sup> "Israel dan Yordania Bahas Jaringan Pipa Minyak di Irak", diambil dari *Suara Pembaharuan*, 10 April 2003.

<sup>33</sup> "Langkah Mundur, Partai Likud Tolak Pembentukan Negara Palestina", diambil dari *Kompas*, 14 Mei 2002.

<sup>34</sup> Noah T. Winner, *Introduction: Where Does the Road Map Lean?*, diakses dari <http://www.iss.org/issweb/iss.htm>, tanggal 15 Mei 2004.

mengait-ngaitkan peristiwa 11 September dengan aksi bom bunuh diri pejuang Palestina, pendekatan tiada henti oleh Israel serta kalangan Kristen-kanan, dan keinginan untuk meningkatkan pengaruh Amerika Serikat terhadap kawasan kaya minyak seperti Timur Tengah, telah memaksa Bush untuk mengambil peranan aktif dalam perumusan sebuah perjanjian perdamaian.<sup>35</sup> Perjanjian yang dirumuskan itu sendiri bernama peta jalan damai (*Road Map*).<sup>36</sup>

*Road Map* merupakan rencana perdamaian yang diajukan oleh kuartet yang terdiri dari Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa, dan Russia.<sup>37</sup> Konsep peta jalan damai yang diprakarsai kuartet perantara perdamaian Timur Tengah merupakan upaya akhir dari rangkaian inisiatif damai yang bertujuan mengakhiri konflik berdarah di Timur Tengah, khususnya Israel-Palestina, setelah gagalnya inisiatif damai sebelumnya, seperti laporan komite George Mitchel dan konsep damai George Tenet.<sup>38</sup>

Kuartet perantara perdamaian Timur Tengah tersebut beranggotakan Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, PBB, dan Rusia. Nilai konsep peta jalan damai menjadi sangat strategis, bukan hanya lantaran akan melahirkan negara Palestina pada tahun 2005, melainkan karena merupakan bagian dari kebijakan politik baru AS di Timur Tengah pascatragedi 11 September 2001 di New York dan Washington DC.

Dalam upaya AS membujuk pihak-pihak terkait bersedia menerima konsep damai tersebut, Deputi Menteri Luar Negeri AS urusan Timur Tengah William Burns mengadakan lawatan ke Timur Tengah pada Oktober 2002 untuk meminta pendapat para

<sup>35</sup> *Bush's Failed Mideast Policy is Creating More Terrorism*, oleh Senator Ernest F. Hollings diakses dari [http://www.williamerikansknew.org/us\\_intesp-hollings.html](http://www.williamerikansknew.org/us_intesp-hollings.html) pada tanggal 25 Agustus 2004

<sup>36</sup> Noah T. Winner, *Loc. Cit.*

<sup>37</sup> Nomi Bar Yaacov, *New Imperatives for Israeli-Palestinian Peace*, (Vol. 45, No. 2, 2003) hal. 73

<sup>38</sup> "Amerika Serikat dan Konsep Peta Jalan Damai", diakses dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak/030512/hf303107.htm>, tanggal 12 Mei 2003.

pemimpin kawasan tersebut tentang konsep damai itu. Hasil lawatan William Burns tersebut kemudian dilaporkan pada kuartet perantara perdamaian pada bulan Desember 2002 untuk dijadikan masukan baru dalam menetapkan draf final konsep damai itu.

Konsep peta jalan damai tersebut yang berpedoman pada pidato Presiden AS George W Bush pada 24 Juni 2002 tentang solusi konflik Israel-Palestina terdiri atas tiga tahap yang akan berakhir dengan berdirinya negara Palestina. Tahap pertama, dari Oktober 2002 hingga Mei 2003 adalah berhentinya serangan Palestina, kembalinya koordinasi keamanan Israel-Palestina, pelaksanaan reformasi Palestina, penarikan pasukan Israel dari wilayah A di Tepi Barat, mencabut boikot atas kota-kota Palestina, dan pembekuan pembangunan permukiman Yahudi.

Tahap kedua, dari Juni 2003 hingga Desember 2003 adalah proses lanjutan pelaksanaan reformasi Palestina dan penarikan pasukan Israel ke posisi sebelum meletusnya intifadah Al Aqsa pada 28 September 2000 serta kembalinya Dubes Mesir dan Jordania untuk Israel ke Tel Aviv. Selain itu, pada tahap kedua, akan digelar konferensi damai Timur Tengah pertama dan membahas tentang berdirinya negara Palestina dengan perbatasan sementara. Tahap ketiga, dari tahun 2004 hingga 2005 adalah menggelar konferensi damai Timur Tengah kedua dan mendeklarasikan berdirinya negara Palestina dengan perbatasan sementara. Konferensi damai tersebut juga membahas jalur Suriah-Israel dan Lebanon-Israel.

Pascapendeklarasian negara Palestina sementara, akan langsung dibuka perundingan membahas isu-isu krusial seperti status Kota Jerusalem, permukiman Yahudi, pengungsi Palestina dan perbatasan akhir negara Palestina-Israel yang diproyeksikan berakhir pada tahun 2005. Pascatercapainya kesepakatan final Israel-

Palestina, seluruh negara Arab membuka hubungan diplomatik dengan Israel sesuai dengan proposal damai Arab yang disahkan pada forum KTT Arab di Beirut bulan Maret 2002.

Perundingan damai yang dinegosiasikan tersebut akan menghasilkan negara Palestina yang merdeka, demokratis, serta hidup berdampingan dalam aman dan damai dengan Negara Israel beserta negara-negara tetangganya yang lain. Perundingan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan konflik Israel-Palestina serta penjajahan yang bermula pada tahun 1967, yang didasarkan pada Konferensi Madrid, prinsip-prinsip "Tanah untuk Perdamaian", Resolusi Dewan Keamanan PBB 242, 338, dan 1397.<sup>39</sup>

PM Israel Ariel Sharon dalam wawancara dengan harian The Jerusalem Post, menegaskan masalah permukiman Yahudi tidak bisa dibahas. "Semua Pemerintah Israel melakukan kebijakan politik pembangunan permukiman Yahudi dengan segala bentuknya meskipun pada saat berjalannya proses diplomasi," kata Sharon.<sup>40</sup> Radio Israel juga mengungkapkan, Pemerintah Israel tak akan melegalisasi peta jalan damai kecuali Palestina tidak menuntut hak kembali pengungsi Palestina dan pembekuan pembangunan permukiman Yahudi.

#### II.4. Tembok pemisah sebagai solusi keamanan Israel

Pada juni 2002 Israel mulai membangun dinding pemisah untuk menahan serangan militan Palestina. Juli 2002, kepala militer Hamas dan 16 warga Palestina tewas akibat rudal Israel.<sup>41</sup> Kementerian Pertahanan Israel akan mengeluarkan peta baru tembok

<sup>39</sup> Press Statement, *A Performance Based Roadmap to a Permanent Two-State Solution to the Israeli-Palestinian Conflict*, Office of the Spokesman of the State Department, Washington DC, 30 April 2003.

<sup>40</sup> "Tolak Bahas Permukiman", diakses dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak/030514/Pln312506.htm>, tanggal 14 Mei 2003.

<sup>41</sup> "Jejak Berdarah Intifadah", *Op.Cit.*

pemisah di Tepi Barat. Peta yang akan dipresentasikan di depan Menhan Israel Shaul Mofaz itu akan melewati wilayah Green Line (Jalur Hijau), perbatasan Israel dengan Tepi Barat sejak perang Timur Tengah tahun 1967 lalu. Setelah mendapat tekanan internasional, Mahkamah Agung Israel meminta departemen pertahanan setempat mengubah sekitar 30 kilometer dari rute sebelumnya. Terutama rute yang menuju Jerusalem barat. Dikatakan, pembangunan dinding sepanjang 680 kilometer itu membawa penderitaan cukup banyak bagi Palestina.<sup>42</sup>

Setelah hampir tiga tahun namanya sempat menghilang dari isu konflik Israel-Palestina, Masjid Al-Aqsa kembali ke dalam agenda politik keduanya. Hal itu menyusul keputusan pemerintah Israel yang membuka izin masjid di kota Jerusalem itu dimasuki kalangan non muslim pada awal bulan September 2003.<sup>43</sup> Pada akhir Oktober 2003, Israel diguncang kontroversi soal kebijakannya terhadap Palestina.<sup>44</sup> Kritik Kepala Staff Angkatan Bersenjata Israel Moshe Yaalon yang bocor ke luar mengenai tindakan tak kenal kompromi PM Sharon terhadap Palestina telah menimbulkan debat panas di lingkaran politik dan militer negeri Israel.

Untuk pertama kalinya sejak terjadi serangan bom bunuh diri di Haifa awal Oktober lalu, ribuan pedagang dan pekerja-pekerja lainnya diizinkan masuk ke Israel, pihak militer Israel mengatakan izin tersebut merupakan itikad baik Israel untuk menyambut Ramadhan. Pemerintahan sayap kanan PM Sharon menunjukkan ke tidak senyangganya dengan di sebarkannya kritikan Yaalon mengenai kegagalan pemerintahan

<sup>42</sup> "Peta Baru Dinding Pemisah", diakses dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0407/27/ln/1169861.htm>, tanggal 27 Juli 2004.

<sup>43</sup> "Ketegangan Baru di Al-Aqsa", diambil dari Koran Tempo, 2 September 2003

<sup>44</sup> "Militer, Pemerintah Israel Berselisih soal Palestina", diambil dari Media Indonesia, 31 Oktober 2003.

PM Sharon meredakan kekerasan dan melakukan pendekatan dengan mantan PM Palestina Mahmud Abbas yang mengundurkan diri bulan lalu.

Menteri Perdagangan Ehud Olmert mengatakan, “Kepala Staff sangat serius dan bertanggung jawab. Bila dia menganggap situasi di kawasan itu berbahaya, dia harus mengatakannya, tetapi tidak dengan cara seperti itu”. Sementara itu, PM Sharon diinterogasi polisi atas tuduhan skandal korupsi yang melibatkan dua putranya. PM Sharon ditanyai seputar tuduhan bahwa dia menggunakan pinjaman sebesar \$1,5 juta dollar AS dari perusahaan asal Afrika Selatan Cyril Kern untuk mengembalikan kontribusi bagi kampanyenya untuk menjadi pemimpin partai Likud pada 1999 lalu yang dianggap ilegal.

Putra PM Sharon, Omri, yang juga anggota parlemen partai Likud diyakini sebagai orang yang menjadi penghubung pinjaman tersebut. Gilad dituduh telah membantu kontraktor David Appel untuk membeli sebuah resor di Yunani yang nilainya jutaan dollar AS. Bantuan ini merupakan imbalan atas kesediaan Appel untuk mengucurkan uang bagi pertanian keluarga PM Sharon di gurun Negev.

Israel pada akhir bulan November 2003, menggelar operasi militer di Ramallah, Tepi Barat. Dalam operasi yang melibatkan 60 kendaraan lapis baja dan kendaraan militer lainnya, tentara Israel menggeledah setiap rumah, membunuh 3 warga Palestina, dan menahan 30 orang lainnya.<sup>45</sup> Pengamat politik menilai operasi tersebut merupakan provokasi yang dilakukan Israel. Pasalnya operasi tersebut digelar bertepatan dengan kunjungan utusan khusus Presiden AS untuk Timur Tengah William Burns dan sehari menjelang pertemuan pemerintah otoritas Palestina dengan kelompok militan di Kairo Mesir.

<sup>45</sup> “Israel Serbu Ramallah”, diambil dari *Republika*, 2 Desember 2003.

Israel memperingatkan Suriah dan Iran yang mendukung para militan Lebanon bahwa pihaknya tidak mengesampingkan kemungkinan akan melancarkan serangan baru ke negara itu, menyusul serangan helikopter Israel ke sebuah tempat di Suriah yang menurut Israel sebagai kamp pelatihan teroris.<sup>46</sup> Sementara itu, Presiden AS Bush menolak mengkritik Israel yang telah melancarkan serangan ke sebuah kamp teroris di Suriah. Menurut Presiden Bush, Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri, dimana Washington juga akan berusaha menggagalkan sebuah resolusi yang ditawarkan Suriah untuk menghukum Israel.

Pertengahan bulan Oktober 2004, Israel menyulut konfrontasi baru ketika menyatakan akan membatasi umat Muslim yang akan beribadah di Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadhan.<sup>47</sup> Polisi Israel dan para arkeolog mengingatkan, karena gempa bumi yang terjadi pada bulan Februari 2004 lalu, sebagian halaman Masjid Al-Aqsa dinyatakan tidak kokoh menampung jumlah umat Muslim saat memasuki bulan suci Ramadhan (melabihi kapasitasnya). Puncak bukit tempat masjid itu berdiri diakui Israel sebagai tempat suci mereka, tempat kitab suci berada. Karena itu, kawasan ini menjadi salah satu titik sensitif dalam konflik Israel-Palestina.

#### **II.5. Hancurnya koalisi kabinet pemerintahan PM Ariel Sharon.**

Isu anggaran Israel tahun 2003, telah mengempaskan pemerintah koalisi pimpinan Perdana Menteri (PM) PM Ariel Sharon yang dianggap pemerintah terkuat sejak berdirinya negara Israel tahun 1948. Pada pemilu bulan Februari 2001, Ariel Sharon memperoleh kemenangan sekitar 25 persen suara dengan skor 62,5 persen suara untuk Sharon dibanding 37,5 persen suara untuk mantan PM Ehud Barak dari Partai Buruh.

<sup>46</sup> "Israel Peringatkan Suriah dan Iran", diambil dari Suara Pembaharuan, 7 Oktober 2003.

<sup>47</sup> "Israel Batasi Akses ke Masjid Al-Aqsa", diambil dari Suara Pembaharuan, 14 Oktober 2004.

Setelah meraih kemenangan gemilang, Sharon berhasil membentuk pemerintah persatuan nasional dengan Partai Buruh, yang mengantarkan koalisi Sharon menguasai kursi terbesar dari Knesset, yaitu 80 kursi.<sup>48</sup>

Kekuatan terbesar di Knesset itu berhasil digenggam oleh Sharon selama 21 bulan terakhir ini, lantaran adanya tantangan bersama yang cukup besar bagi faksi-faksi politik Israel, yaitu intifada Al Aqsa Palestina. Namun, krisis politik di Israel yang dimulai dari isu kontroversial anggaran tahun 2003 yang menyebabkan mundurnya Partai Buruh dari koalisi pimpinan Sharon itu, telah memaksa PM Ariel Sharon mengumumkan, menggelar pemilu lebih awal antara akhir Januari hingga awal Februari 2003. Jika menurut jadwal semula, pemilu Israel digelar bulan Oktober 2003.

Sejak awal sesungguhnya sudah disadari adanya kelemahan cukup serius dalam tubuh koalisi pemerintah Ariel Sharon. Kelemahan tersebut antara lain adalah kontradiksi kepentingan dari basis politik pendukung koalisi Ariel Sharon. Basis politik Sharon itu merupakan aliansi campuran dari kubu kiri, kaum nasionalis Yahudi radikal, penghuni permukiman Yahudi, Yahudi ortodoks, dan imigran Yahudi asal Rusia. Aliansi mereka sangat lemah dan temporal, yang setiap saat bisa ambruk. Kubu kiri dan kanan dalam koalisi Sharon, misalnya, hanya bersedia bertemu karena dalam rangka menghadapi Intifada Al Aqsa. Kaum nasionalis dan ortodoks Yahudi juga terkenal berbeda pendapat tajam soal merumuskan hubungan agama dan negara di Israel.

Selain itu, terjadinya pertarungan elite di tubuh Partai Likud dan Partai Buruh sendiri. Persaingan antara kubu mantan PM Benjamin Netanyahu dan Ariel Sharon di tubuh Partai Likud. Pertarungan segitiga antara kubu Benjamin Ben Eliezer dan kubu

<sup>48</sup> Musthafa Abd. Rahman, "Isu Anggaran Israel Tahun 2003: Mengempaskan Koalisi Sharon", Kompas, tanggal 8 November 2002, diakses dari <http://www.infopalestina.com/clip.php?id=20media>. Mengempaskan%20Koalisi%20Sharon.htm, tanggal 24 November 2006.

Haim Ramon serta Wali Kota Haifa Amram Mitzna di tubuh Partai Buruh. Netanyahu berambisi merebut ketua Partai Likud dari Sharon. Ramon dan Mitzna juga mengincar kursi ketua Partai Buruh. Kubu Netanyahu menginginkan pemerintah Sharon ambruk dalam beberapa bulan saja untuk membuka jalan digelarnya pemilihan umum lagi. Kubu Haim Ramon dan Amram Mitzna juga menginginkan hal sama.

Berlarut-larutnya intifada Al Aqsa, bisa dibilang menguntungkan Ariel Sharon secara politik karena membantu keutuhan koalisinya selama 21 bulan, jika di bandingkan dengan pemerintahan PM Benjamin Netanyahu dan PM Ehud Barak yang sama-sama tidak bertahan lama akibat tersandung proses perdamaian. PM Netanyahu jatuh pada tahun 1998 lantaran terlalu mengekang lajunya proses perdamaian setelah membatalkan secara sepihak kesepakatan Wye River tahun 1998. Sebaliknya, PM Ehud Barak terpaksa mengundurkan diri disebabkan gagalnya KTT Camp David II bulan Juli tahun 2000 yang mengantarkan meletusnya intifada Al Aqsa.

Isu anggaran tahun 2003 ternyata meruntuhkan kekhawatiran terhadap intifada Al Aqsa yang telah menyatukan faksi-faksi politik dalam koalisi Sharon, dimana sejak awal isu ini memang menjadi ancaman pemerintah koalisi Sharon. Pemerintah PM Sharon memang berhasil lolos dari kendala anggaran Israel tahun 2002, namun sudah mendapat kecaman keras dari partai-partai politik di negara itu dan bahkan menyebabkan Menteri David Levy dari Partai Gesher mengundurkan diri dari koalisi Sharon saat itu. Anggaran tahun 2002 yang diajukan Sharon sempat pula tidak mendapat dukungan pada voting putaran pertama di Knesset, namun kemudian berhasil lolos dalam voting putaran kedua dan ketiga.

Pengurangan anggaran pada tahun 2002 dari semua departemen, hanya sekitar 1,46 milyar dollar AS. Dana sebanyak 1,46 milyar dollar AS itu dialokasikan untuk militer Israel menghadapi intifada Al Aqsa. Menteri David Levy waktu itu memilih mundur sebagai protes atas anggaran 2002 yang dianggap sangat merugikan kaum miskin Israel yang sebagian besar berasal dari kaum Sephardim (Sephardim adalah kaum Yahudi dari Timur Tengah yang merupakan kubunya David Levy).

Mundurinya David Levy itu menimbulkan keresahan dalam koalisi Sharon, namun tidak mengantarkan jatuhnya pemerintah koalisi saat itu. Pers-pers Israel pada saat itu menyatakan mundurnya David Levy merupakan awal dari kejatuhan pemerintah Sharon. Harian *Haa'retz* menyebutkan, David Levy selalu meninggalkan pemerintah sebelum jatuh. Harian terkemuka *Yedioth Ahronoth* melukiskan, David Levy selalu berhasil menyelamatkan diri dari perahu sebelum tenggelam.

Sindiran pers-pers Israel itu kini menjadi kenyataan. Ariel Sharon tidak dapat keluar dari masalah anggaran tahun 2003. Partai Buruh yang menjadi mitra utama Partai Likud pimpinan Ariel Sharon benar-benar melaksanakan ancaman mundur dari koalisi, jika Sharon menolak melakukan revisi atas anggaran tersebut.

Pemangkasan dalam anggaran 2003 mencapai angka 1,8 milyar dollar AS, yakni lebih besar dari anggaran tahun 2002 yang hanya 1,46 milyar dollar AS. Dana sebesar 1,8 milyar dollar AS itu berasal dari pemotongan empat persen anggaran seluruh departemen, empat persen dari dana untuk anak-anak yang salah satu keluarganya menjadi anggota militer, 24 persen dari dana untuk anak-anak yang anggota keluarganya tidak masuk dinas militer, empat persen dari dana asuransi nasional, pembatalan pengurangan pajak

untuk penduduk di wilayah Israel Selatan serta kenaikan pajak sebanyak satu persen selama satu setengah tahun.

Dengan kata lain, dalam anggaran tahun 2003, rakyat Israel harus membayar pajak lebih besar dari pada fasilitas yang diterimanya demi menutupi biaya perang Israel terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Pemangkasan sebanyak 1,8 milyar dollar AS itu merupakan terbesar dalam sejarah anggaran negara Israel selama 20 tahun terakhir ini. Di samping itu pemangkasan tersebut menimbulkan guncangan sosial, di saat Israel tengah mengalami kelesuan ekonomi sejak intifada Al Aqsa.

Kondisi ekonomi Israel semakin memburuk sejak pemerintahan Ariel Sharon, dan gagalnya pemerintah tersebut meredam intifada Palestina hingga saat ini. Menteri Keuangan Israel Silvan Shalom mengakui, intifada Palestina telah membebani ekonomi Israel tahun ini sekitar lima milyar dollar AS.

Mantan Menteri Keuangan Ya'kob Niman, mengkritik keras kebijakan ekonomi pemerintah Israel sekarang yang dilukiskan terburuk selama 50 tahun terakhir ini. Menurut dia, ekonomi Israel hampir bangkrut kalau tidak mengambil keputusan reformasi segera dan substansial. Sedang Menteri Keuangan Israel sekarang, Silvan Shalom menegaskan, Israel dalam keadaan perang dan kondisi ekonomi negara dalam bahaya.

Anggota Knesset dari Partai Buruh yang juga mantan menteri luar negeri pada masa pemerintah PM Ehud Barak, Shlomo Ben Ami menuduh kementerian keuangan Israel telah membawa negeri itu pada level negara dunia ketiga. Ia menyebut Partai Buruh mengalami kebangkrutan moral dan politik, jika menyetujui anggaran tahun 2003.

Pemimpin oposisi dari partai Meretz, Yossi Sarid, melukiskan Ariel Sharon sebagai pemimpin yang membawa bencana sosial, ekonomi dan politik.

Kritik keras dari Jajam Partai Buruh sendiri dan partai-partai oposisi, diduga kuat mendorong Benjamin Ben Eliezer tidak mau kompromi dengan PM Sharon dalam masalah anggaran tahun 2003 dan memfilih mundur dari koalisi pemerintahan PM Sharon. Bifa Eliezer tidak mengambil keputusan mundur dan menerima anggaran tahun 2003 tanpa revisi, maka posisi dia sebagai ketua Partai Buruh akan terancam dalam kongres partai yang akan digelar pada 19 November 2003. Popularitas Eliezer akan jatuh bila menerima anggaran tahun 2003 di mata pengikut Partai Buruh dan pada gilirannya dipastikan akan mengalami kekalahan dalam perebutan kursi ketua partai dari kandidat Haim Ramon dan Amram Mitzna.

Jajak pendapat terakhir dalam Partai Buruh, popularitas Ben Eliezer berada di bawah Ramon dan Mitzna. Amram Mitzna meraih 28 persen suara, Haim Ramon memperoleh 35 persen suara dan Ben Eliezer hanya mengantungi 20 persen suara. Arus kritik terhadap kebijakan politik Ben Eliezer semakin kuat di dalam tubuh Partai Buruh dan popularitasnya terus menurun lantaran terlalu banyak kompromi dengan Ariel Sharon. Tuntutan agar Partai Buruh mundur dari koalisi Sharon juga makin kuat, khususnya setelah agresi Israel secara besar-besaran ke Tepi Barat mulai bulan Maret 2003 dan pengepungan markas besar Yasser Arafat.

Ben Eliezer tampaknya menyadari posisi sulit masa depan politiknya tersebut. Ia terakhir ini mencoba memperbaiki citranya dengan cara membongkar sekitar 19 permukiman Yahudi ilegal yang tersebar di seluruh Tepi Barat. Keputusan Ben Eliezer mundur dari koalisi PM Sharon tersebut dapat dilihat dari bagian pertarungan politik

menjelang kongres Partai Buruh pada November 2003. Bagi Eliezer tidak ada jalan lain kecuali menolak kompromi dengan Sharon soal anggaran tahun 2003 untuk mengangkat citra dan popularitasnya menghadapi ancaman Haim Ramon dan Amram Mitzna pada kongres partai untuk memperebutkan kursi ketua pada 19 November.

Kalkulasi politik serupa juga terjadi pada PM Ariel Sharon dalam tubuh Partai Likud yang tengah menghadapi ancaman mantan PM Benjamin Netanyahu. Sharon dituntut bersikap keras menyangkut anggaran tahun 2003 dan isu Palestina, bila popularitasnya ingin bertahan kuat dan bisa mengungguli Netanyahu. Tampaknya atmosfer politik internal di tubuh Partai Likud dan Buruh sama-sama menciptakan situasi kondusif ke arah ambuknya koalisi pimpinan Sharon yang dikenal dengan pemerintah persatuan nasional itu.

Berakhirnya koalisi PM Ariel Sharon itu tentu juga memberikan isyarat politik yang sangat mengkhawatirkan bagi masa depan proses perdamaian. Nasib konsep "Peta Jalan Damai" dengan menjanjikan berdirinya negara Palestina pada tahun 2005 yang kini sedang dipromosikan utusan khusus Amerika Serikat (AS), William Burns, menjadi tidak menentu. Bagi PM Ariel Sharon memang hanya dua pilihan, yaitu menggelar pemilu lebih cepat atau membentuk koalisi baru dengan spektrum politik terbatas dari partai kanan dan agama. Menurut konstitusi Israel, pemilu lebih cepat baru bisa digelar setelah 90 hari dari gagalnya membentuk koalisi baru. Namun, ternyata Sharon terpaksa memilih opsi pertama yakni pemilu lebih cepat, setelah gagal berusaha membentuk koalisi baru.

PM Sharon gagal membujuk Partai ultra kanan National Union-Yisrael Beiteinu pimpinan tokoh radikal Avigdor Lieberman (7 kursi di Knesset) untuk masuk koalisi baru.

Koalisi Sharon yang kini menguasai 55 kursi di Knesset, sesungguhnya sangat membutuhkan Partai Yisrael Beiteinu untuk mencapai 62 kursi Knesset, yakni memenuhi persyaratan minimal menguasai 61 dari 120 kursi Knesset untuk membentuk pemerintahan. Sedang Sharon sebenarnya ingin menghindari pemilu lebih cepat untuk mencegah saingan utamanya di Partai Likud mantan PM Benjamin Netanyahu kembali memimpin Partai Likud dan selanjutnya merebut kursi perdana menteri.

Seandainya Sharon berhasil dengan opsi kedua yakni membentuk koalisi dari kubu kanan dan agama, maka komposisi koalisi tersebut terdiri dari Partai Likud (19 kursi), Partai Shas (17 kursi), Yisrael Ba'aliya (4), Yisrael Beiteinu (7), Partai Nasional Agama-NRP (5), United Torah Judism (5), dan Center (5). Jadi, Sharon bisa menghimpun dukungan 62 kursi di Knesset, yakni melebihi persyaratan minimal 61 kursi untuk meraih legitimasi Knesset bagi pembentukan sebuah pemerintahan. Tetapi, ternyata opsi kedua tersebut tidak bisa diwujudkan.

Sementara itu otoritas Palestina menyebutkan, pemilu Israel lebih awal menunjukkan kegagalan pemerintah provokatif pimpinan Ariel Sharon. Menurut juru bicara Arafat, Nabil Abu Rudeinah, pemilu Israel lebih cepat menunjukkan gagalnya kebijakan pemerintahan Sharon dalam menciptakan stabilitas dan keamanan di kawasan ini. Rudeinah menyerukan Israel segera mundur dari tanah Palestina.

Perunding senior Palestina, Saeb Erekat menghimbau rakyat Israel pemerintah mendatang yang mampu menciptakan perdamaian bukan pemerintah perang. "Rakyat Israel punya hak memilih pemerintah yang lebih baik dari yang ada sekarang," lanjut Erekat. Ia lalu mengungkapkan kecemasannya atas nasib konsep "peta jalan damai" dengan ambuknya pemerintah Israel sekarang. Peta jalan damai itu menjanjikan

berdirinya negara Palestina pada tahun 2005 yang sedang dipromosikan Amerika Serikat dan kuartet perantara perdamaian di Timur Tengah yang beranggotakan AS, Rusia, Uni Eropa dan PBB.

Erekat juga mencemaskan, vakumnya kekuasaan di Israel sekarang akan terjadi bersamaan dengan waktu penyerangan AS atas Irak nanti, yang hal itu akan membuka peluang dan mendorong Israel melancarkan agresinya juga terhadap rakyat Palestina. Namun yang pasti, proses perdamaian selama satu dekade ini telah menjadi korban sistem politik di Israel yang tidak pernah melahirkan partai kuat tunggal dalam pemilu, sehingga partai politik yang berkuasa dari hasil koalisi dengan partai-partai kecil mudah dijatuhkan. Pemerintah koalisi pimpinan PM Ariel Sharon tidak terlepas dari realita politik tersebut dan tidak ada jaminan pemerintah hasil pemilu nanti terbebas dari fenomena politik itu.

## II.6. Kemenangan PM Ariel Sharon dalam pemilu 2003.

Pemilu pada tanggal 28 Januari 2003 adalah pemilu yang dipercepat akibat hancurnya koalisi kabinet pemerintahan PM Sharon, dipicu oleh mundurnya partai Buruh akibat isu dana tahun 2003. Partai Likud yang diketuai PM Sharon meraih suara telak dengan perolehan 38 kursi dari 120 kursi di *Knesset*.<sup>49</sup>

Gambar II.1  
Partai dan Pemerintahan dalam Parlemen Israel ke-16

Name of List	Votes in Percentage	Number of Seats Elected	Number of Seats Before Next Elections
Likud	29.4	38	27
Yisra'el Be'Emunah 1	14.5	19	21
Shas	12.3	15	2
Shas	8.2	11	11
Agudat HaLeumi 2	5.5	7	4

<sup>49</sup> Op.Cit., Republika, 8 Maret 2003.

Yisrael Beiteinu	5.2	6	6
Yisrael Be'alyah	4.2	6	4
Yisraeli Demokratik	4.3	5	0
Yisraeli Demokratik	3	3	2
Yisraeli Demokratik	2.8	3	0
Yisraeli Demokratik	2.3	3	3
Yisraeli Demokratik	2.2	2	0
Yisraeli Demokratik	2.1	2	2
Yisraeli Demokratik	0	0	3
Yisraeli Demokratik	0	0	2
Yisraeli Demokratik	0	0	2
Yisraeli Demokratik	0	0	1
Yisraeli Demokratik	0	0	14
Yisraeli Demokratik	0	0	9
Yisraeli Demokratik	0	0	4
Yisraeli Demokratik	0	0	2
Yisraeli Demokratik	0	0	1

1 Labor-Meimad changed its name to Labor-Meimad-Am Ehad when Am Ehad joined it on May 23, 2005.

2 Yisrael Beiteinu split from the Ichud Leumi on February 1, 2006 (the full name went from Ichud Leumi-Yisrael Beiteinu-Moledet-Tekuma to Ichud Leumi-Moledet-Tekuma).

3 Meretz-Democratic Choice-Shahar changed its name to Yahad and the Democratic Choice on July 27, 2005.

4 United Torah Judaism split into Agudat Yisrael and Degel Hatorah on January 12, 2005.

5 After the Arab Movement for Renewal (Ta-ah) split on February 7, 2006, the name was changed to Hadash.

6 Yisrael Be'alyah joined the Likud shortly after elections on March 10, 2003.

7 Renewed National Religious Zionism split from the National Religious Party on March 21, 2005, originally under the name "Hitchabrut".

8 MK Joseph Paritzky left Shinui on May 18, 2005 and formed Zionism Liberalism Equality.

9 Kadima split from the Likud on November 23, 2005, originally under the name "Acheiyut Leumit".

10 The Secular Faction split from Shinui on January 26, 2006.

11 Habayit Haleumi split from the Secular Faction on February 5, 2006.

Sumber dari: [http://www.knesset.gov.il/history/eng/eng\\_hist01\\_01.htm](http://www.knesset.gov.il/history/eng/eng_hist01_01.htm)

## 11.7. Status wilayah Jalur Gaza dan Tepi Barat

Israel yang resmi diproklamasikan pada 14 Mei 1948 merupakan negara yang didirikan dengan tiga sumber utama, yaitu (1) klaim teologis yang berasal dari warisan Perjanjian Lama dari Kitab Injil, (2) Deklarasi Balfour yang diumumkan Inggris Raya

pada 1917, dan (3) pembagian Palestina menjadi negara Arab dan negara Yahudi yang direkomendasi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU-PBB) pada 1947.<sup>50</sup>

Atas dasar klaim historis yang merujuk pada teks-teks Bible, tokoh Zionisme politik Theodore Herzl menggariskan bahwa wilayah Israel Raya membentang dari “Hulu Mesir sampai ke Eufrat”. Lalu, tokoh kelompok *national-religious Zionism* “Mizrachi” Rabbi Yehuda Fischman menyatakan kepada Komite Penyelidikan Khusus PBB, 9 Juli 1947, bahwa wilayah negara Israel “ membentang dari Sungai Mesir sampai Eufrat, meliputi Syria dan Lebanon”. Sementara itu, pada awal 1937, Ben Gurion merencanakan garis perbatasan Israel dengan menggunakan Bible sebagai rujukan. Menurutnya, negara Israel harus meliputi lima wilayah, yaitu Lebanon Selatan, Syria Selatan, Transyordania, Palestina, dan Sinai. Dan, pada 1956, Ben Gurion mengumumkan rencana garis perbatasannya pada Knesset (Parlemen Israel), yang kemudian diklamasi oleh Knesset, menyatakan bahwa Sinai adalah bagian dari “Kerajaan Daud dan Sulaiman”.<sup>51</sup>

Menurut Gideon Shimoni, hampir seluruh pemikir Zionis mengakui konsep hak sejarah “*historical right*” bagi bangsa Israel atas tanah Palestina. Berdasarkan klaim teologis dan historis terhadap tanah Palestina dan dukungan Deklarasi Balfour pada tahun 1917, maka warga Yahudi mulai menguasai wilayah Palestina.

Untuk memperkuat kedudukan mereka, tokoh-tokoh Zionis juga menyebarkan opini bahwa Palestina adalah tanah air tanpa rakyat yang diperuntukkan bangsa Yahudi yang tidak bertanah air. Padahal, pada tahun 1917 terdapat sekitar 600 ribu orang Arab di Palestina dan sekitar 60 ribu orang Yahudi. Bahkan ketika PBB berencana membagi

<sup>50</sup> Paul Findley, *Deliberate Deceptions: Facing the Facts about the US-Israeli Relationship*, (New York: Lawrence Hill Books, 1993), hal. 3.

<sup>51</sup> Ralph Schoenman, *Mimpi Buruk Kemanusiaan: Sisi-sisi Gelap Zionisme*, (terj.), Surabaya: Pustaka Progressif, 1998, hal. 205; Gideon Shimoni, *The Zionist Ideology*, 1995:131; Roger Garaudy, *Israel dan Praktek-praktek Zionisme*, (terj.), 1988:12-13.

wilayah Palestina pada 1947, jumlah orang Yahudi baru mencapai 608.225 jiwa, sedangkan orang Arab mencapai 1.237.332 jiwa.<sup>52</sup>

Kenyataannya, Israel menggunakan cara-cara teror dalam menguasai tanah-tanah Palestina serta melakukan pengusiran besar-besaran terhadap warga Palestina. Pada tahun 1949, kaum Zionis telah berhasil menguasai 80 persen tanah Palestina dan mengusir 770 ribu orang Palestina dari negerinya. Padahal, berdasarkan pada resolusi Majelis Umum PBB (MU-PBB) No. 181 (tentang pembagian wilayah Palestina) yang ditetapkan pada tanggal 29 November 1947, kaum Yahudi hanya diberi hak menguasai 56 persen atas wilayah Palestina.

Namun anehnya, PBB pada tanggal 11 Mei 1949 mengesahkan penguasaan kaum Yahudi tersebut dengan mengakui keanggotaan Israel di PBB. Pembagian wilayah tersebut ditentang keras oleh negara-negara Arab, sebab tidak sesuai dengan realitas yang ada, dimana kaum Yahudi yang hanya 32 persen dari jumlah penduduk Palestina menguasai 56 persen wilayah yang sebagian besar tanahnya cukup subur.<sup>53</sup>

Penguasaan Israel terhadap seluruh wilayah Palestina (Jalur Gaza dan Tepi Barat) dan Jerusalem Timur terjadi dalam perang tahun 1967. PBB tidak mengesahkan penguasaan Israel tersebut dan Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) mengeluarkan resolusi DK-PBB No. 242 pada 22 November 1967, yang isinya memerintahkan Israel keluar dari wilayah yang didudukinya dalam perang tahun 1967.<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Paul Findley, *Op.Cit.*, 1993: 5-6.

<sup>53</sup> Roger Garaudy, *Op.Cit.*, 1988: 47-49; Paul Findley, *Op. Cit.*, 1993: 7-8.

<sup>54</sup> Paul Findley, *Op.Cit.*, 1993:3.

Tepi Barat merupakan wilayah yang terletak diantara Israel dan Jordan, tepatnya disebelah barat Sungai Jordan serta Laut Mati, dengan luas wilayah 5,607 Km<sup>2</sup>.<sup>55</sup> Tepi Barat merupakan daerah yang diduduki oleh Israel semenjak perang Arab-Israel pada tahun 1967. Tepi Barat juga terdiri dari beberapa kota seperti Hebron, Jerikho, Nablus, serta Kota Tua Jerussalem.

Mayoritas penduduknya merupakan Arab-Palestina, dan setelah perang 1967, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menghimbau Israel untuk segera menarik diri dari wilayah tersebut. Perundingan *Camp David* pada tahun 1978 merangkai rencana otonomi rakyat Arab di kawasan tersebut. Perundingan antara Israel dengan PLO (*Palestine Liberation Organization*) terjadi lagi pada tahun 1993 yang menghasilkan otonomi terbatas Palestina di Jerikho dan Jalur Gaza yang diproyeksikan pada pertengahan 1994.

Fersetujuan yang ditandatangani di Washington, Amerika Serikat tersebut memiliki semboyan '*Gaza and Jericho First*' yang berarti langkah awal persetujuan untuk Gaza dan Jerikho akan diikuti persetujuan-persetujuan lanjutan yang menyangkut seluruh Tepi Barat.<sup>56</sup> Perundingan-perundingan yang diadakan seringkali baru terjadi setelah ada peningkatan skala ketegangan antara Israel dan Palestina di Wilayah tersebut. Pertambahan populasi pengungsi Israel di wilayah tersebut yang hingga hampir dua kali lipat antara tahun 1992 hingga tahun 2001 menjadi salah satu halangan dalam upaya perdamaian.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Artikel *The Country of Palestine*, diakses dari <http://www.heyleh.com/countries/palestine.html> pada tanggal 22 Desember 2004.

<sup>56</sup> Hasil penelitian Amien Rais, *Dampak Perjanjian Interim PLO-Israel terhadap Perdamaian Dunia*, (UGM, Yogyakarta, 1993), hal.2.

<sup>57</sup> <http://www.heyleh.com/countries/palestine.html>, *Log.Cit.*

Jalur Gaza merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan Laut Mediterranean, wilayah yang pada tahun 2003 tersebut diperkirakan memiliki populasi sebesar 1.200.000 jiwa tersebut terletak di atas tanah seluas 370 Km<sup>2</sup> dengan mayoritas merupakan pengungsi Palestina dan minoritas penduduk Israel.<sup>58</sup> Jalur Gaza merupakan bagian dari mandat Inggris untuk Palestina pada tahun 1917 hingga 1948, dibawah kekuasaan Mesir pada tahun 1949, dan telah menjadi wilayah pendudukan Israel semenjak perang Arab-Israel pada tahun 1967.

Gerakan Intifada<sup>59</sup> dimulai di Jalur Gaza pada bulan Desember 1987.<sup>60</sup> Perundingan antara Israel dan PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) pada tahun 1993 menghasilkan otonomi terbatas bagi Palestina di wilayah tersebut yang diproyeksikan untuk pertengahan tahun 1994, namun Otoritas Palestina tidak mampu untuk membendung konflik antara Israel dengan kelompok Hamas<sup>61</sup> yang dominan di wilayah tersebut.

Pergeseran jumlah penduduk kerap terjadi di wilayah Palestina, pada pertengahan tahun 1972 rakyat Arab Palestina yang pada tahun 1948 berjumlah 1.320.000 jiwa, telah berkembang menjadi 3 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 1.496.845 jiwa terdaftar sebagai pengungsi.<sup>62</sup> Separuh rakyat Arab Palestina pada saat itu adalah pengungsi, sehingga tidak mengherankan kalau sebelum tahun 1969 PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menyebut mereka sebagai pengungsi dan berpendapat bahwa para pengungsi itu hanya

<sup>58</sup> *Ibid.*

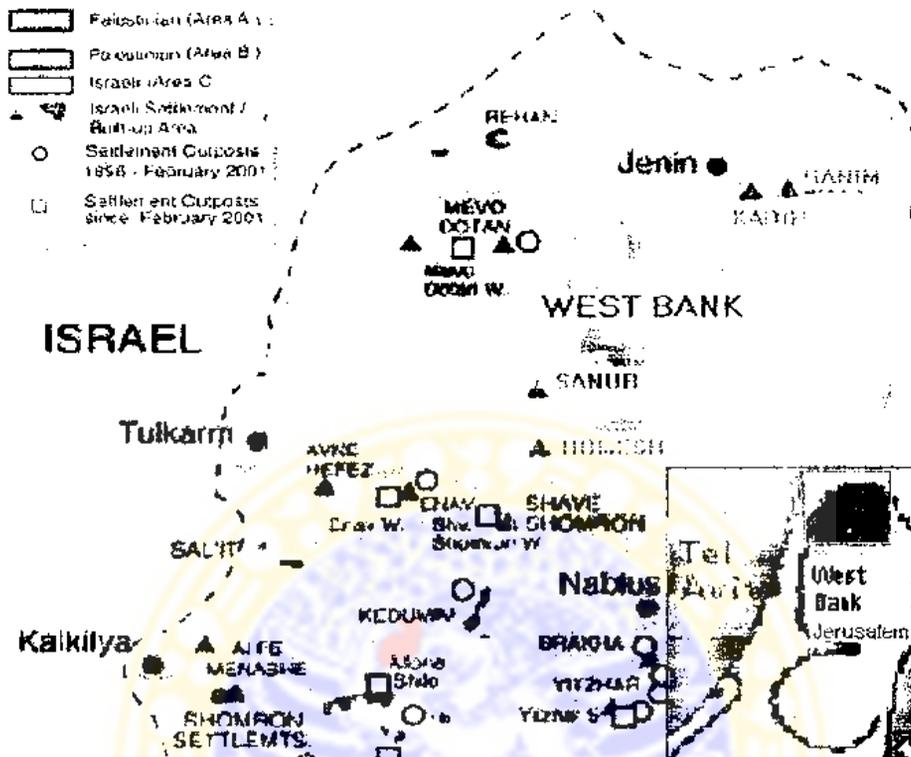
<sup>59</sup> Intifada merupakan gerakan spontanitas dari rakyat Palestina sebagai pemberontakan oleh orang-orang yang telah disakiti dan dilupakan yang berada pada komunitas sosial kelas bawah. Intifada dilakukan oleh mayoritas kaum muda dan orang-orang miskin Palestina. Kirsten E. Seultze, *The Arab-Israeli Conflict: Seminar Studies in History*, (Longman, London & New York, 1999)

<sup>60</sup> Diakses dari <http://www.palestineinfo.org/pallib/01.htm> pada tanggal 19 September 2004.

<sup>61</sup> Hamas merupakan kelompok radikal Islam yang menentang hak Israel untuk berdiri, Hamas didukung oleh 30% orang Palestina. Lihat *Life After Arafat*, mingguan Newsweek terbitan 22 November 2004.

<sup>62</sup> Kirdi Dipoyudo, *Op.Cit.*, hal.84.



Gambar II.3.<sup>65</sup> Peta Tepi Barat

Sumber: Map of Israeli Disengagement, diakses dari [www.mideastweb.com](http://www.mideastweb.com).

Jadi dalam pragmatisme PM Ariel Sharon terlihat melalui kebijakan-kebijakan garis keras yang diterapkan dalam pemerintahan. Dengan banyaknya tekanan dari pihak luar, terutama AS, PM Sharon menerima proposal perdamaian yang dinamakan dengan peta jalan damai (berdasar atas rumusan Uni Eropa, PBB, AS, dan Rusia). Instabilitas pemerintahan PM Ariel Sharon banyak disebabkan oleh faktor-faktor kepentingan dan ideologi dari masing-masing partai yang berkoalisi dalam tubuh pemerintahannya tersebut. DP merupakan kebijakan sepihak yang diterapkan pemerintah Israel atas proposal PM Ariel Sharon dengan menarik diri dari Jalur Gaza dan bagian utara Tepi Barat. Guna pemahaman lebih jelas, terutama melihat peran dari PM Sharon sebagai aktor kunci dari DP dan peran dari elit politik Israel akan dijelaskan pada bab 3.

<sup>65</sup> *Ibid.*

### BAB III

## PERAN ELIT POLITIK DI SEKITAR PM ARIEL SHARON DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN *DISENGAGEMENT PLAN*

### III.1. PM Ariel Sharon

#### III.1.a. Latar belakang PM Ariel Sharon

Ariel Sharon (juga dikenal dengan sebutan Arik) lahir 27 Februari 1928 adalah seorang mantan politisi Israel dan jenderal. Ia tampil sebagai Perdana Menteri Israel dari 7 Maret 2001 hingga 14 April 2006. Ia lahir di di Kfar Malal (Mandat British Palestina) dan tampil sebagai pemimpin politik serta militer berkebangsaan Israel. Sharon juga pernah menjadi pemimpin Likud, partai terbesar dalam koalisi pemerintah dalam parlemen Israel (*Knesset*).<sup>1</sup>

Sharon dulu merupakan anggota Angkatan Bersenjata Israel selama tiga puluh tahun. Pangkat tertingginya adalah Mayor Jenderal. Ia menjadi terkenal di Israel untuk kegiatannya dalam perang enam hari pada tahun 1967 dan Perang Yom Kippur pada tahun 1973. Ariel Sharon juga bertanggung jawab pada tragedi pembantaian Qibya pada 13 Oktober 1953 di mana saat itu 96 orang Palestina tewas oleh Unit 101 yang dipimpinya dan pembantaian Sabra dan Shatila di Libanon pada 1982 yang mengakibatkan antara 3.000 - 3.500 jiwa terbunuh, sehingga ia dijuluki sebagai 'Tukang Jagal dari Beirut'. Ia lahir dengan nama Ariel Scheinermann (Shinerman) dari sebuah keluarga yang mendukung gerakan Zionis. Pada usia 17 tahun, ia bergabung dengan kelompok mafia Haganah yang aktivitasnya meneror rakyat Palestina. Dalam melancarkan aksi teror, beliau secara bergantian berada di bawah komando Perdana

<sup>1</sup> "Ariel Sharon", diambil dari [www.knesset.gov.il](http://www.knesset.gov.il), diakses pada tanggal 17 Oktober 2005.

Menteri David Ben Gurion, Itzhak Shamir, dan Yitzhak Rabin.

Pada masa perang kemerdekaan Israel tahun 1948, di usianya yang ke 20, beliau telah menjadi seorang komandan infantri Israel dalam Brigade Alexandroni. Pada saat ia hendak membakar sebuah ladang, tiba-tiba rentetan peluru pejuang Palestina menembus tubuhnya. Luka itu hampir saja merenggut nyawanya kalau saja ia tak diselamatkan rekannya. Pada tahun itu juga, Sharon melanjutkan studi di bidang hukum di Universitas Ibrani di Yerusalem.

Pada 1953, Sharon membentuk sekaligus memimpin unit komando khusus " Unit 101" yang bertugas melakukan operasi-operasi khusus tingkat tinggi. Ia diangkat menjadi komandan dari korps para komando dan terlibat dalam perang memperebutkan Sinai pada tahun 1956. Pada tahun 1957, beliau meneruskan pendidikan kemiliterannya di Camberley Staff College, Inggris.

Selama tahun 1958-1962, Sharon pernah menjadi komandan Brigade Infantri, memimpin Pusat Pendidikan Infantri dan mengikuti sekolah hukum di Universitas Tel Aviv. Pada Perang Enam Hari (1967) yang melibatkan Israel melawan bangsa Arab, beliau menjabat sebagai komandan sebuah divisi tentara dengan Brigadir Jenderal. Kemudian, beliau mengundurkan diri dari dinas ketentaraan di tahun 1972. Ketika terjadi Perang Yom Kippur pada tahun 1973, Sharon kembali dipanggil untuk memimpin divisi tentara yang harus menyeberangi Terusan Suez.

Karir politiknya berawal pada tahun 1973 saat beliau terpilih menjadi anggota Knesset. Tetapi, Sharon mengundurkan diri setahun kemudian untuk menjadi Penasihat Keamanan bagi Perdana Menteri Yitzhak Rabin. Ia kembali ke Knesset pada tahun 1977 dan menerima jabatan sebagai Menteri Pertanian. Kemudian, beliau menjabat Menteri

Pertahanan (1981-1983) ketika terjadi perang Lebanon, tentara Israel memasuki Lebanon atas perintahnya. Ariel Sharon kemudian mengundurkan diri ketika sebuah komisi pemerintah menuduhnya terlibat secara tidak langsung dalam penyerangan September 1982 atas kaum pengungsi Palestina di Sabra dan Shatila yang dilakukan oleh milisi Maronit Lebanon.

Korban dalam peristiwa tersebut mencapai lebih 3.000 orang terbunuh. Selain itu, Sharon juga bertanggung jawab pada tragedi pembantaian Qibya 13 Oktober 1953 yang menewaskan 96 orang Palestina oleh Unit 101 yang dipimpinnya. Atas dua peristiwa tersebut, sebagian orang menjulukinya sebagai "Penjagal dari Beirut".

Periode 1984-1990, Sharon kembali memasuki kabinet dan menjabat sebagai Menteri Industri dan Perdagangan. Setelah itu, selama dua tahun, beliau menjadi Menteri Perumahan dan Konstruksi. Periode Juli 1996-Juli 1999, dan menjabat sebagai Menteri Infrastruktur Nasional serta sebagai Menteri Luar Negeri (Oktober 1998-Juli 1999).

Pada sidang Knesset bulan Mei 1999, Sharon terpilih sebagai Ketua Partai Likud menyusul mundurnya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Karier politiknya mencapai puncak ketika beliau terpilih menjadi Perdana Menteri Israel pada Februari 2001.

Di tengah penjagaan yang sangat ketat, Ariel Sharon mengangkat sumpah jabatan sebagai perdana menteri ke-11 di depan Forum Knesset pada 7 Maret 2001. Pengambilan sumpah dilakukan setelah beliau berhasil membentuk pemerintah persatuan nasional dengan spektrum politik yang paling luas dalam sepanjang sejarah Israel.

### **III.1.b. Ideologi PM Ariel Sharon**

Zionisme berasal dari kata "zion" yang berarti *The Land of israel* (tanah yang dijanjikan), banyak diantaranya (bangsa Yahudi) menyebutkan Jerusalem. Gagasan

zionisme yang dapat juga diartikan sebagai upaya pemukiman masyarakat Yahudi ke tanah leluhur, berakar dan berkaitan satu dengan yang lain di dalam kaum Yahudi dengan apa yang disebut dengan *the Land of Israel*.

Pada mulanya zionisme merupakan gerakan keagamaan murni, oleh Garaudy disebut sebagai *"religious zionism"* (zionisme religius). Zionisme ini berkaitan dengan kepercayaan dalam Judaisme, akan datangnya seorang juru selamat dari Kerajaan Tuhan di akhir zaman untuk mengumpulakan seluruh keluarga di bumi. Zionisme religius inilah yang membangkitkan tradisi berzimmah kaum Yahudi ke "tanah suci." Zionisme religius ini jauh dari program-program politik yang bertujuan membentuk sebuah negara.<sup>1</sup>

Gagasan perdanya sendiri negara sendiri bagi bangsa Yahudi mulai muncul menyusul terjadinya pemukiman anti-Yahudi di Eropa. Berbagai peristiwa yang terjadi menyebabkan kekecewaan terhadap ideologi pembaruan, dan mendorong munculnya gerakan *"hubbah zion" (Love of Zion)* yang lebih bernilai politis.<sup>2</sup>

Corak pragmatis dan sekularistik pada tokoh-tokoh zionis sekarang tampak dengan munculnya gerakan zionisme politik yang di pelopori oleh Theodore Herzl. Ideologi zionisme modern menurut Michel A. Riff, seperti banyak ideologi lainnya yang muncul sebagai perubahan dari gerakan keagamaan menjadi gerakan politik sekular. Sebagai sebuah ideologi, zionisme tidak pernah sama sekali menyingkirkan masa lalu. Jadi zionisme modern yang dikembangkan Herzl dan tokoh-tokoh Yahudi bukanlah

<sup>1</sup> Adnan Husaini MA, *Maaf Menyang Sendiri: Israel Sang Teroris Yang Pragmatis?*, (Jakarta: Pustaka Progressif, 2003), hal. 13.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 14.

<sup>3</sup> Jacob Katz, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Zionisme (1897-1914)*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 29-30.

sebuah ideologi keagamaan, melainkan sebuah ideologi sekular yang mengeksploitasi nilai-nilai dan teks keagamaan Yahudi untuk tujuan-tujuan yang pragmatis.<sup>5</sup>

Pendudukan Israel terhadap Palestina diakui oleh tokoh zionis Vladimir Jabotinsky sebagai suatu bentuk kolonialisme. Sebagai pelopor gerakan “Zionis Revisionis”, Jabotinsky menentang nilai-nilai keagamaan ortodoks Yahudi. Dengan ideologi ultra nasionalisnya, Jabotinsky menekankan simbol-simbol negara dan wilayah yang sekular dan berkeinginan membangun kedaulatan politik di seluruh Palestina perjuangan senjata. Melalui sebuah tulisan berjudul “*The Iron Wall*” (Tembok Besi), yang diluncurkan pada 4 November 1923, Jabotinsky mengajukan gagasan yang sangat realistis dan pragmatis untuk mewujudkan negara Israel di Palestina. Bagi Jabotinsky, bagaimanapun pendudukan dan pengusiran oleh Yahudi atas Palestina adalah suatu bentuk kolonisasi, yang sampai kapanpun akan ditentang oleh warga Arab Palestina. Oleh sebab itu, jalan utama untuk mewujudkan negara Israel adalah dengan kekuatan senjata. Paham “Zionisme Revisionis” inilah yang kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh partai Likud seperti Menachem Begin dan Yitzak Shamir. Menurut Shamir, nama dan spirit Jabotinsky tetap hidup pada sebagian besar tokoh-tokoh Likud.<sup>6</sup>

PM Ariel Sharon sebagai pewaris ideologi “Zionis Revisionis”,<sup>7</sup> dikenal lebih memilih menggunakan kekuatan militer dalam menghadapi konflik dengan Palestina dan negara-negara Arab. Ia memiliki keyakinan bahwa solusi terbaik bagi konflik Arab-Israel adalah dengan menggunakan kekuatan senjata. Bagi PM Sharon, kesepahaman dan saling

<sup>5</sup> Michel Riff, *Kamus Ideologi Politik Modern*, 1995:308, diambil dari Adrian Husaini, “*Mau Menang Sendiri: Israel Sang Teroris Yang Pragmatis*”, Pustaka Progressif, Jakarta., 2001, hal. 12-13.

<sup>6</sup> Ralph Schoennan, *Mimpi Buruk Kemamusan: Sisi-sisi Gelap Zionisme (terj.)*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1998, hal. 44; Shamir, *Summing Up: An Autobiography*, 1994, hal. 9; diambil dari Adrian Husaini, “*Mau Menang Sendiri: Israel Sang Teroris Yang Pragmatis*”, Pustaka Progressif, Jakarta, 2001, hal. 12-13.

<sup>7</sup> “*Dampak Kemenangan Ariel Sharon*”, diambil dari *Republika*, 8 Maret 2003.

memberi konsepsi secara imbang dipahami sebagai sikap yang lemah, yang hanya akan dijadikan kesempatan bagi bangsa Arab untuk mendapatkan konsepsi yang lebih banyak, dan pada akhirnya, dapat mengancam eksistensi negara Israel sendiri.<sup>8</sup>

Meskipun demikian, dalam prakteknya PM Ariel Sharon lebih bersifat pragmatis dalam menerapkan kebijakan domestik dan luar negerinya, meliputi langkah-langkah strategis guna menghasilkan tujuan-tujuan yang telah di rumuskannya.

### III.1.c. Persepsi PM Ariel Sharon terhadap lingkungan sekitarnya.

Dengan berdasar atas pengamatan PM Ariel Sharon yang meliputi lingkungan domestik dan luar negeri, terutama reaksi terhadap D.P, PM Sharon meyakini bahwa proposal yang diujukannya tersebut merupakan langkah yang jitu guna mengatasi permasalahan Israel selama ini (keamanan, perbatasan wilayah, pengakuan internasional, dan normalisasi hubungan dengan negara Arab).

Sejak pertama kali PM Ariel Sharon menyatakan rencana penarikan mundur Tepi Barat Israel dari Jalur Gaza dan Tepi Barat (GDP) merupakan sebuah upaya sepihak<sup>9</sup> yang perlu dilakukan guna mengatasi permasalahan keamanan dan ekonomi Israel guna kesejahteraan dan keadamaian negara Israel,<sup>10</sup> yang di sponsori oleh institusi strategi dan politik Israel pada konferensi Herzliya tahun 2004, namun rencana tersebut tidak mendapatkan dukungan dari para menteri-menteri senior di kabinet.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Musthafa Abd. Rahman, "Dilema Israel: Antara Krisis Politik dan Perdamaian", Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hal. 122.

<sup>9</sup> Palestina dianggap tidak dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan peta jalan damai dimana para militan masih hidup dengan bebas di Palestina dan Palestina belum menata atau membangun infrastruktur serta kehidupan yang layak bagi bangsanya.

<sup>10</sup> *Israel's Disengagement Plan: Selected Document*, diakses dari <http://www.mfa.gov.il>, tanggal 17 Juli 2005.

<sup>11</sup> *Israel's Disengagement Plan: Renewing Peace Process*, diakses dari <http://www.mfa.gov.il>, tanggal 6 Februari 2006.

Melihat kondisi yang sedemikian rupa, PM Sharon bersedia menerima persyaratan yang ditawarkan partai Likud, dimana akan diadakan referendum atas rencana penarikan mundur tersebut yang ditentukan dengan voting kabinet. Referendum yang diadakan pada bulan Mei 2004 tersebut berakhir dengan hasil 65 persen menolak rencana tersebut, meskipun 55 persen anggota partai Likud menerima rencana tersebut jauh sebelum referendum diadakan.

Penolakan atas rencana sepihak penarikan mundur tersebut merupakan pukulan yang amat telak bagi PM Sharon, meskipun begitu beliau menerima hasil referendum yang berdasar atas permintaan partai Likud tersebut dan membuat strategi menugaskan menteri pertahanan Shaul Mofaz mengamandemenkan rencana tersebut guna penerimaan para anggota Likud.

Reaksi Eropa terhadap DP dapat dilihat dengan adanya pernyataan Javier Solana (European Union High Representative for Common Foreign and Security Policy) atau (CFSP) menyatakan tanggapannya terhadap DP pada awal Juni 2004, beliau menyebutkan:<sup>12</sup>

*"I welcome the Israeli Prime Minister's proposals for disengagement from Gaza. This represents an opportunity to restart the implementation of the Road Map, as endorsed by the UN Security Council".*

Adapun pernyataan yang di paparkan oleh Menlu Irlandia Brian Cowen, bahwa ketidaksetujuan Uni Eropa (EU) terhadap DP terbatas pada penarikan sebagian daerah dari Tepi Barat. Beliau menyatakan EU tidak akan mengakui perubahan apapun selain perbatasan tahun 1967, selain daripada perbatasan tersebut masing-masing pihak harus

---

<sup>12</sup> *Israel's Disengagement Plan: Renewing Peace Process, Op.cit.*, diakses dari [www.ira.gov](http://www.ira.gov), tanggal 6 Februari 2006.

berunding guna kesepakatan akan perbatasan wilayah. Diakhir pernyataan beliau, Cowen menegaskan bahwa Eropa akan mendukung DP sebagai bagian *dari Road Map*.

Strategi PM Sharon dengan mengamandemenkan DP membawakan hasil, pada bulan Juni 2004 kabinet pemerintahan PM Sharon menyetujui amandemen DP namun di garis bawah bahwa pembahasan mengenai pemukiman yang akan di evakuasi akan di putuskan secara terpisah. DP disetujui dengan perbandingan suara mayoritas 14 berbanding 7, tapi setelah menteri dari National Union Avigdor Liberman dan anggota kabinet Binyamin Elon diberhentikan dari jabatannya, serta menerima tawaran kompromis dari anggota kabinet dari partai Likud Tzipi Livni di terima PM Sharon.

Tawaran tersebut antara lain menutup zona industri Erez (dikarenakan alasan keamanan, 10 tentara dan perwira tewas dalam serangan bom bunuh diri, penembakan, dan serangan roket (Qassam) dan memindahkannya ke kota pembangunan seperti Ashkelon, Dimona, Yeruham, dan Sederot. Menteri Tenaga Kerja, Perdagangan, dan Industry Ehud Olmert menyatakan bahwa penutupan tersebut merupakan bagian dari DP. Pada akhirnya penutupan ini kemudian meningkatkan pengangguran di Jalur Gaza.<sup>13</sup>

Persetujuan kabinet terhadap DP juga berdampak pada mundurnya dua anggota NRP (Mafdal) yang memiliki kedudukan minoritas di parlemen Efi Eytan dan Itshhak Levi, yang kemudian di ikuti oleh seluruh fraksi partai ini yang disebabkan oleh ditolaknya permintaan mereka atas referendum nasional terhadap DP.<sup>14</sup> Sikap PM Sharon dengan tetap mempertahankan DP dianggap para pendukungnya dari partai sayap kanan

<sup>13</sup> Diambil dari <http://www.brightonline.com/np/braking/2004/07/13/04071309.html>, diakses tanggal 13 Desember 2006.

<sup>14</sup> *Israel's Disengagement Plan: Renewing Peace Process*, Op.Cit. diakses dari <http://www.mfa.gov.il>, tanggal 6 Februari 2006.

sebagai sebuah pembelotan terhadap mandat yang telah diberikan kepada beliau, dimana PM Sharon lebih mendukung kepada pengadopsian *platform* dari partai sayap kiri.

Pada saat itu, banyak dari kedua belah kubu yang skeptis terhadap usaha PM Sharon guna melanjutkan rencana penarikan mundur dari Gaza dan bagian utara Tepi Barat tersebut. Fenomena ini kemudian dijadikan pemicu bagi PM Sharon guna menciptakan koalisi baru kabinet persatuan pemerintahannya pada bulan Januari 2005.

Bagi para penolak DP seperti Benjamin Netanyahu dan mantan menteri Natan Sharansky alasan pembuktian akan PM Sharon tetap menjalankan mandat yang telah diberikan kepadanya, PM Sharon harus menerima referendum nasional atas DP. Guna menarik persetujuan mayoritas yang kini di bayang-bayangi oleh permintaan referendum yang dikeluarkan Benjamin Netanyahu, PM Sharon mulai menaruh harapannya pada dukungan Presiden Bush, yang menganggap dengan dukungan ini para pendukung Netanyahu yang dekat dengan AS akan mendukung rencana DP tersebut.

Presiden Amerika Serikat (AS) George W. Bush memiliki peran yang cukup signifikan dalam hal perumusan kebijakan politik Israel di masa pemerintahan PM Sharon. Salah satunya dapat dilihat dengan adanya perubahan situasi politik internasional dan kebijakan pemerintah AS pasca tragedi WTC (11 September 2001), dimanfaatkan oleh pemerintahan PM Sharon untuk semakin melakukan kebijakan garis kerasnya terhadap Palestina, terutama setelah empat kelompok (Hammas, Jihad Islam, Hizbullah, dan PFLP) pejuang Palestina dimasukkan kedalam daftar teroris oleh AS dan PBB. Dukungan AS terhadap Israel dalam isu terorisme dapat dilihat dengan adanya pemberian dana secara besar-besaran terhadap Israel guna memberantas terorisme, yang mencapai dua ratus juta dollar AS pada tahun 2002. Bahkan dalam laporan departemen luar negeri AS,

pada bulan Mei 2002 yang berjudul *"Pattern of Global Terrorism"* menyebutkan bahwa Israel merupakan pendukung utama dalam memberantas terorisme.<sup>15</sup>

Presiden Bush juga memiliki peranan yang signifikan dalam masalah perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya penyelesaian konflik israel-Palestina dapat dilihat dengan adanya sebuah bentuk perumusan perjanjian perdamaian,<sup>16</sup> berupa peta jalan damai (*Road Map*). Peta jalan damai merupakan rencana perdamaian yang diajukan oleh kuartet yang terdiri dari Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa ("BB), Uni Eropa, dan Russia.<sup>17</sup> Walaupun diajukan oleh empat pihak yang melebur menjadi kuartet, Amerika Serikat tampak paling pro-aktif dalam memimpin proses perundingan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan presiden Bush tentang visi peta jalan damai yang bertujuan untuk membentuk dua negara yang hidup berdampingan.<sup>18</sup>

Atas surat yang dikirimkan PM Sharon kepada Presiden Bush guna pencarian dukungan atas rencana penarikan mundur sepihak yang dilakukan PM Sharon atas wilayah Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat (Utara Samaria) pada bulan April 2004, Presiden Bush membalas surat PM Sharon tersebut dengan isinya secara garis besar mendukung atas rencana penarikan mundur pasukan dan pemukiman Yahudi yang terdiri atas fasilitas militer maupun sipil dari Jalur Gaza dan Tepi Barat, yang merupakan bagian dari peta jalur damai (*Road Map*) guna mewujudkan dua negara yang hidup

<sup>15</sup> *Op.Cit.*, Republik, 8 Maret 2003.

<sup>16</sup> Artikel *Bush's Failed Mideast Policy is Creating More Terrorism*, oleh Senator Ernest F.Hollings diakses dari <http://www.senate.gov/record/2004/08/25/record/082504.htm> pada tanggal 25 Agustus 2004.

<sup>17</sup> Nomi Bar-Yaacov, *New Imperatives for Israeli-Palestinian Peace*, (Summer 1 the Iiss quarterly, Vol.45, No.2, 2003) hal.73

<sup>18</sup> Lihat artikel *The Road Map to Road Peace*, diakses dari <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2004/05/15/040515a.html> pada tanggal 15 Mei 2004

berdampingan secara aman dan damai (*two-state-solution*).<sup>19</sup> Dukungan inilah yang kemudian dijadikan pegangan PM Sharon guna menarik persetujuan mayoritas partai Likud.

Pada akhir bulan Juli 2004, protes terhadap DP dan memaksa pelaksanaan referendum nasional atas DP dilakukan oleh 10.000 warga Israel dengan membentuk rantai manusia berjalan dari Nisanit Jalur Gaza (yang kemudian dialihkan di persimpangan Erez karena masalah keamanan) menuju Jerusalem yang berjarak 90 kilometer (km).<sup>20</sup> Pada bulan September 2004, kabinet Israel menyetujui berdasarkan suara terbanyak 9 banding 1, untuk memberikan kompensasi kepada para pemukim yang meninggalkan Jalur Gaza kecuali daerah Mafdal dan Zevulun Orlev. Rencana pemerintah tersebut berdasarkan pada lokasi, ukuran rumah, anggota keluarga, yang rata-rata akan menerima \$200.000-\$300.000 dollar AS.

Pada pertengahan bulan September 2004, media Maariv mensurvei 69% warga Israel menyetujui referendum atas DP dan 26% lainnya menyatakan persetujuan dari Knesset sudah cukup. Dan jika referendum diadakan 58% mnsuarakan setuju serta 29% lainnya menolak.<sup>21</sup> Poling yang mendukung rencana penarikan mundur Isreal menunjukkan perbandingan 50-60% dan yang menolak antara 30-40%. Poling yang dilakukan insititusi Dahaf dan media Yedioth Ahronoth pada awal Juni 2005 menunjukkan dukungan terhadap DP mencapai 53% dan yang menolak 38%.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> "Exchange of Letters between PM Sharon and President Bush", diambil dari <http://www.mfa.gov.il>, diakses pada tanggal 21 Februari 2005.

<sup>20</sup> Diambil dari <http://www.walla.co.il>, diakses tanggal 11 Desember 2006.

<sup>21</sup> Diambil dari <http://www.walla.co.il>, diakses tanggal 11 Desember 2006.

<sup>22</sup> Diambil dari <http://www.angelsky.com/polls/index.cfm?section=ylew&itemID=7905>, diakses tanggal 11 Desember 2006.

Berdasarkan polling telepon yang diadakan media Maariv menunjukkan 54% Yahudi Israel mendukung DP dan polling yang dilakukan perusahaan polling Migdam menemukan 48% menerima dan 41% menolak kebijakan DP,<sup>23</sup> meskipun polling yang dilakukan institusi Dahaf dan Media Yedioth Ahronot menunjukkan 62% warga menerima DP dan 31% menolak kebijakan tersebut.<sup>24</sup>

Polling yang diadakan oleh institusi media, sosial, dan politik universitas Tel Aviv menunjukkan persetujuan warga Israel terhadap DP 48%, dimana 43% responden meyakini terorisme yang dilakukan Palestina akan meningkat setelah penarikan tersebut dan 25% responden meyakini terorisme terhadap Israel akan berhenti.<sup>25</sup> Pada bulan Oktober 2004, di depan sesi pembukaan rapat musim dingin parlemen *Knesset*, PM Sharon menjelaskan rencana penarikan mundur sepihaknya berharap agar DP di legalisasi pada awal bulan November. Secara simbolik *Knesset* berdasarkan atas 53-44 suara menolak rencana PM Sharon tersebut, dimana partai Buruh Israel sebagai oposisi menolak, begitu pula dengan partai Mafdal serta 10 anggota partai Likud menolak untuk memberikan dukungannya terhadap rencana PM Sharon tersebut.

Kemudian pada tahap awal pembahasan mengenai DP pada pertemuan bulan Oktober 2004, 67 berbanding 45 suara menolak, 7 abstain, dan 1 anggota tidak hadir. Netanyahu dan 3 menteri kabinet dari partai yang dipimpin PM Sharon Likud, mengancam akan mundur dari jabatannya kecuali PM Sharon setuju untuk mengadakan referendum nasional atas DP dalam 14 hari.

<sup>23</sup> Diambil dari <http://www.angus-reid.com/news.php?id=84882>, diakses tanggal 11 Desember 2006.

<sup>24</sup> Diambil dari <http://www.angus-reid.com/polls/index.cfm?insection=viewitem&id=2005>, diakses tanggal 11 Desember 2006.

<sup>25</sup> Diambil dari <http://www.angus-reid.com/polls/83416-1>, diakses tanggal 11 Desember 2006.

Pada pertengahan bulan Oktober 2004, 100.000 warga Israel melakukan aksi protes dengan berjalan ke kota-kota dengan membawa slogan 100 kota mendukung Gush Katif dan Samaria.<sup>26</sup> Pada awal Oktober 2004, pasukan militer Israel mengobrak-abrik kamp pengungsi Palestina terbesar di sebelah utara Jalur Gaza. Pasukan ini masuk sampai ke inti perkampungan dan memancing pertempuran dengan kelompok perjuangan Palestina.<sup>27</sup>

Dalam konflik bersenjata yang berlangsung selama enam jam tersebut, sedikitnya 10 warga Palestina dan 3 warga Israel tewas. Lebih dari 70 warga Palestina menderita luka-luka, kebanyakan dari mereka adalah pengungsi sipil. Masuknya tank-tank tersebut ke kamp pengungsi Jebaliya, setelah PM Sharon memerintahkan tambahan pasukan untuk menyerbu wilayah utara Gaza, dengan alasan untuk mencegah tembakan roket dari kelompok Palestina.

PM Sharon akan memperluas zona penyangga di jalur Gaza, antara enam hingga sembilan kilometer. Beliau menegaskan bahwa serangan roket ini harus dihentikan. Banyak pihak khawatir kekacauan ini akan mempengaruhi rencana penarikan Israel dari Jalur Gaza dan Tepi Barat, namun PM Sharon menegaskan rencana tersebut akan tetap dilaksanakan.<sup>28</sup>

Dalam laporan rahasia pemerintah Israel menjelaskan bahwa Israel dapat menghadapi perbenturan dengan Uni Eropa jika konflik Israel-Palestina tidak segera terselesaikan dan akan membawa Israel terkucilkan dalam kurun waktu 10 tahun kedepan

<sup>26</sup> Diambil dari <http://www.jerusalem.serveur.net/Satellite/?pagename=JPost&Article=Snow+Lull&cat=IDN/1/359272>, diakses tanggal 11 Desember 2006.

<sup>27</sup> "Israel Serbu Jantung Kamp Pengungsi", diambil dari Kompas, 1 Oktober 2004.

<sup>28</sup> "Israel Membabi Buta di Jalur Gaza, 63 Tewas", diambil dari Kompas, 4 Oktober 2004.

seperti yang terjadi pada Afrika Selatan).<sup>39</sup> Israel telah lama menghadapi hubungan bergejolak dengan Eropa, dengan para pejabat Israeli menganggap Eropa tempat berlindungnya sentimen pihak-pihak pro-Palestina. Namun situasinya telah menjadi buruk di tengah kritik terhadap tindakan operasi militer Israel di teritorial Palestina dan pembangunan pagar pembatas di Tepi Barat. Israeli menganggap dan mengeluh hal ini menunjukkan berkembangnya anti-Semite (anti Yahudi) di Eropa.

Oleh sebab itu, PM Sharon melihat adanya satu kemenangan atas hal tersebut, dimana penentuan sikap "mengindar" dari konflik dengan para gerilyawan Palestina dengan mengevakuasi seluruh pemukiman Yahudi di Jalur Gaza dan beberapa dari Tepi Barat tersebut. Hal ini juga di gunakan PM Sharon sebagai alasan beliau menentang pihak-pihak oposisi yang menentang rencana pemukiman tersebut.

Beberapa saat sebelum bertolak ke Washington, AS, pada pertengahan bulan April 2004 PM Sharon menegaskan akan tetap mempertahankan kendali di enam blok pemukiman Tepi Barat (termasuk Kiryat, Arba, dan Ariel).<sup>40</sup> PM Sharon yang semula sepakat untuk menarik diri dari Jalur Gaza dan Tepi Barat itu mengubah posisinya. Hal tersebut dilakukan dengan perhitungan Presiden Bush akan mendukung rencana pemisahan diri Israel tersebut. Hal ini juga akan menjadi salah satu jaminan memenangkan simpati dari partai Likud dan koalisinya.

Dukungan AS sangat vital bagi PM Sharon, terutama dalam menghadapi oposisi dari sayap kanan yang menentang keras evakuasi 21 pemukiman Yahudi di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Karena itu, untuk merebut kembali simpati mereka PM Sharon mencari dukungannya ke AS dalam mempertahankan enam wilayah di Tepi Barat dan renunsiasi

<sup>39</sup> "Israel Antisipasi Bertrok Politik dengan UE", diambil dari Media Indonesia, 15 Oktober 2004.

<sup>40</sup> "Palestina Peringatkan AS dan Sharon", diambil dari Kompas, 24 April 2004.

hak para pengungsi Palestina untuk kembali ke Israel. PM Sharon mengaku tidak mempunyai pilihan lain kecuali melakukan tindakan unilateral, dalam arti melanjutkan proses perdamaian tanpa kehadiran Palestina. Beliau justru mempertegas tuduhan kepada PM Palestina Ahmed Qorei dan pemimpin Palestina Yasser Arafat telah gagal dalam menghancurkan kelompok militan.

Dengan dibunuhnya pemimpin organisasi perjuangan dan pembebasan Palestina Abdul Aziz ar-Rantissi pada pertengahan bulan April 2004 oleh Israel (yang menggantikan posisi Sheikh Ahmed Yassin yang tewas dirudal pada akhir Maret 2004),<sup>31</sup> semakin menunjukkan keinginan PM Sharon untuk menduduki Palestina dengan jalan kekerasan. PM Sharon terlihat yakin bahwa jalan kekerasan itulah yang akan mampu meluaskan wilayah kekuasaannya.<sup>32</sup>

Di sisi lain PM Sharon juga merasa yakin akan mampu mengendalikan seluruh kemungkinan dari kebijakannya. Apalagi saat berkunjung ke Gedung Putih, dimana Presiden Bush menyiratkan kesiapannya untuk mendukung Israel.

Israel menggempur Desa Naameh, sekitar 20 kilometer dari Beirut ke arah selatan. Hal ini merupakan serangan Israel terdekat dengan Beirut sejak pasukan Israel menarik diri dari Lebanon selatan tahun 2000.<sup>33</sup> Israel membombardir lokasi yang diduga sebagai lokasi Komando Umum Front Populer Pembebasan Palestina (PFLP).

Sementara itu, PM Israel Ariel Sharon sedang menghadapi kekacauan politik dalam negeri setelah menteri Perumahan Efi Eitam mengundurkan diri. Kekacauan tersebut terjadi pada saat kabinet Israel mengadakan pertemuan pertama memantapkan rencana penarikan diri dari Jalur Gaza. Surat pengunduran diri Eitam di sampaikan

<sup>31</sup> "Jejak Berdarah Intifadah", diambil dari Koran Tempo, 5 Oktober 2004.

<sup>32</sup> "Jalan Kekerasan Pilihan Israel", diambil dari Republika, 20 April 2004.

<sup>33</sup> "Hezbollah Serang Pos Israel", diambil dari Kompas, 10 Juni 2004.

kepada PM Sharon dengan alasan atas persetujuan kabinet terhadap penarikan mundur dari Jalur Gaza, dimana dapat memberi peluang terbentuknya negara teroris Hamas di wilayah yang sudah di bayar dengan darah Yahudi. Langkah tersebut kemudian di ikuti menteri muda Yitzak Levy.

Merasa mendapat restu dari AS, Israel menolak pembentukan negara Palestina. Hal itu dilakukan dengan membekukan proses perdamaian kedua belah pihak.<sup>34</sup> Penegasan itu disampaikan penasehat PM Sharon, Dov Weisglass kepada harian Haaretz, yang mengatakan tujuan utama PM Sharon menarik diri secara sepihak dari Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat ialah semata-mata untuk membekukan rencana pembentukan negara Palestina berdaulat. "Israel selalu menghindari untuk berbicara dengan Palestina karena tidak ingin membahas masalah terpenting seperti masa depan Jerusalem atau nasib pengungsi Palestina, dari hal terpenting dalam rencana pelepasan ini adalah pembekuan proses perdamaian, dengan begitu tidak ada proses politik yang harus dilakukan dengan Palestina".

Namun belakangan Weisglass mengoreksi ucapannya setelah muncul berbagai komentar, terutama dari kantor PM Sharon. PM Sharon menyatakan akan tetap mempertahankan komitmennya melanjutkan proses perdamaian melalui peta perdamaian yang dilahirkan kuartet Rusia, AS, UE, dan PBB. Sebelumnya dalam berbagai wawancara, PM Sharon sempat mengatakan tidak lagi terikat dengan butir-butir peta perdamaian tersebut. PM Sharon mengancam akan bereaksi lebih keras terhadap perlawanan Palestina setelah penarikan pasukan dari Jalur Gaza.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> "Israel Tolak Pembentukan Negara Palestina", diambil dari Kompas, 7 Oktober 2004.

<sup>35</sup> "Israel Akan Lebih Keras pada Palestina", diambil dari Suara Pembaharuan, 28 April 2004.

Diwawancarai dalam televisi saluran 10 Israel, pada akhir bulan April 2004, PM Sharon menyatakan Israel akan mempertahankan rencana pemisahan unilateral termasuk penarikan pasukan dari Jalur Gaza. Beliau juga menyatakan, setelah pasukan Israel ditarik dari Jalur Gaza, maka rakyat Palestina tidak bisa lagi berdalih bahwa Israel menduduki tanah mereka. Beliau juga menambahkan bahwa respon Israel atas kekerasan yang dilakukan Palestina akan lebih keras lagi. PM Sharon menolak untuk memberikan gambaran sikap keras Israel tersebut.

Jaksa Agung Israel Menachem Mazuz meminta para *rabbi* (pendeta Yahudi) melunakkan penetangan mereka terhadap rencana pembongkaran permukiman di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Sikap keras mereka dikhawatirkan memicu kekerasan.<sup>36</sup> Polisi Israel pada akhir Desember 2004, menahan kandidat presiden otoritas Palestina Mustafa Barghouti karena berkampanye di wilayah kota tua Jerusalem Timur.<sup>37</sup> Penahanan tersebut terjadi hanya sehari setelah Israel menerapkan peraturan yang akan memfasilitasi pemilu Palestina. Peraturan tersebut antara lain mengizinkan para kandidat untuk berkampanye di Jerusalem Timur.

Menurut juru bicara polisi Israel, Barghouti ditahan untuk ditanya karena ia memang memiliki hak untuk transit melalui Jerusalem tapi tidak memiliki hak untuk berada di dalam kota Jerusalem. Di lain sisi, pemerintah Israel membebaskan 159 dari 170 tawanan Palestina yang dijanjikan akan di bebaskan sebagai imbalan langkah Mesir membebaskan mata-mata Israel Azzam Azzam. Meski demikian Israel menolak membebaskan 11 tawanan yang dianggap membahayakan Israel.

<sup>36</sup> "Israel Khawatirkan Ekstremisme Yahudi", diambil dari Media Indonesia, 6 Juli 2005.

<sup>37</sup> "Polisi Israel Menahan Mustafa Barghouti", diambil dari Kompas, 29 Desember 2004.

Pada awal bulan November 2004, Netanyahu menarik ancamannya (atas isu referendum nasional) terhadap PM Sharon dengan mengatakan bahwa dengan adanya situasi meninggalnya Yasser Arafat beliau memutuskan untuk tetap dalam pemerintahan. Dan dalam hitungan hari ke tiga menteri yang ikut mengancam PM Sharon juga menarik ancamannya tersebut.

Pada akhir Desember 2004, PM Sharon menjalin koalisi dengan partai Buruh dan menjadikan Shimon Peres sebagai wakil PM guna merestorasi pemerintahan guna peraihan suara terbanyak (mayoritas) atas DP di parlemen. Pada pertengahan bulan Februari 2005, *Knesset* mencapai keputusan final dengan 59 suara setuju, 40 menentang, dan 5 abstain, serta proposal amandemen guna mereferendum DP ditolak dengan perbandingan suara 29-72.

Pada akhir Maret 2005, *Knesset* kembali menolak rancangan undang-undang (ditawarkan oleh beberapa kelompok Likud di dalam parlemen, yang ingin memaksakan referendum terhadap DP) guna penundaan pengimplementasian DP dengan perbandingan suara 72-39.<sup>38</sup> Pada pertengahan bulan Maret 2005, komando selatan IDF mengisukan kondisi militer di Jalur Gaza guna kelangsungan perelokasian para pemukim Yahudi.

Presiden Goerge W. Bush menyatakan bahwa rencana dari penarikan mundur secara sepihak dari Israel merupakan sebuah kebijakan yang positif guna perealisasi peta jalan damai (*road map*). Dalam konferensi pers bulan april 2005 bersama PM Sharon, Presiden Bush berkata:

*"I strongly support [Prime Minister Sharon's] courageous initiative to disengage from Gaza and part of the West Bank. The Prime Minister is willing to coordinate the implementation of the disengagement plan with the Palestinians. I urge*

<sup>38</sup> Diambil dari <http://www.scribd.com/doc/1386237>, diakses tanggal 11 Desember 2006.



Pada awal Agustus 2005, Netanyahu mengundurkan diri setelah ratifikasi kabinet terhadap tahapan pertama dari DP yang disetujui dengan perbandingan suara 17-5. Netanyahu menyatakan pemerintah akan menanggung resiko dari keputusan gelap matanya yang akan meningkatnya terorisme akibat dari penerapan DP.<sup>41</sup> Kemudian Netanyahu berpidato di depan Knesset mengikuti keputusannya mundur dari jabatannya di dalam kabinet pada awal Agustus 2005, menyatakan:

*"Only we in the Knesset are able to stop this evil. Everything that the Knesset has decided, it is also capable of changing. I am calling on all those who grasp the danger: Gather strength and do the right thing. I don't know if the entire move can be stopped but it still might be stopped in its initial stages. [Don't] give [the Palestinians] guns, don't give them rockets, don't give them a sea port, and don't give them a huge base for terror"*<sup>42</sup>

Pada pertengahan Agustus 2005, PM Sharon menyatakan "saya memiliki harapan dapat mempertahankan Jalur Gaza dan seluruh pemukiman selamanya, namun kenyataan yang ada berbeda dengan apa yang diharapkan". "Ini adalah kekuatan kita dan bukan kelemahan kita saat mengambil langkah ini" yang merupakan pengulangan dari argumen PM Sharon mengenai DP sebagai pemberi inisiatif diplomatik bagi Israel.<sup>43</sup>

Kemudian pada akhir Agustus 2005, Knesset memutuskan untuk menarik mundur dari perbatasan Gaza-Mesir dan memperbolehkan pihak Mesir untuk melokasikan polisi perbatasannya sepanjang daerah demiliterisasi Mesir, serta menjalin koordinasi bersama guna kontrol Israel terhadap perbatasan.<sup>44</sup>

<sup>41</sup> Diambil dari <http://www.mideasteye.com/news.php?id=8726>, diakses tanggal 11 Desember 2006.

<sup>42</sup> Diambil dari <http://web.israeli-sider.com/Articles/Politics/6756.html>, diakses tanggal 11 Desember 2006.

<sup>43</sup> Diambil dari <http://www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=JPostJPArticle&cid=1117250&cid=1013>, diakses tanggal 11 Desember 2006.

<sup>44</sup> *Israel's Disengagement Plan: Renewing Peace Process, Op.Cit.*, diakses dari <http://www.mfa.gov.il>, tanggal 6 Februari 2006.

Reaksi positif dunia internasional terhadap DP dapat dilihat dari pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan pada pertengahan Agustus 2005 menyatakan:<sup>45</sup>

*"Israeli Prime Minister Sharon's "courageous decision" to carry through with the painful process of disengagement, expressed the hope that "both Palestinians and Israelis will exercise restraint in this challenging period", and "believes that a successful disengagement should be the first step towards a resumption of the peace process, in accordance with the Road Map," referring to the plan sponsored by the diplomatic Quartet – UN, EU, Russia, and the United States – which calls for a series of parallel steps leading to two states living side-by-side in peace by the end of the year".*

Ibrahim Gambari seorang pejabat PBB dibawah Sekretaris Jenderal untuk urusan politik menyatakan dihadapan Dewan Keamanan pada akhir Agustus 2005, bahwa:<sup>46</sup>

*"Israel has demonstrated that it has the requisite maturity to do what would be required to achieve lasting peace, and the Israeli Defence Forces (IDF) has demonstrated their ability to discharge their mission with carefully calibrated restraint. Prime Minister Sharon should be commended for his determination and courage to carry out the disengagement in the face of forceful and strident internal opposition".*

Selama absennya Palestina dalam proses perdamaian, Otoritas Palestina (PNA) menyambut dengan baik semua penarikan militer Israel dari wilayah pendudukan, namun banyak dari bangsa Arab Palestina yang menentang kebijakan DP tersebut.<sup>47</sup>

Mereka menganggap DP merupakan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk membekukan atau melewati perjanjian internasional yang telah disepakati serta menuntut untuk segera menarik diri dari Jalur Gaza dan Tepi Barat secara penuh dan menyeluruh. Kecurigaan mereka muncul setelah pernyataan pendukung setia PM Sharon Dov Weisglass pada media Haaretz pada awal bulan Oktober 2004. Weisglass menyatakan bahwa DP akan mencegah berdirinya negara Palestina untuk beberapa tahun kedepan.

<sup>45</sup> Diambil dari <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=15474&Cr=Middle&Cr1=East>, diakses tanggal 11 Desember 2006.

<sup>46</sup> Diambil dari <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=15537&Cr=Middle&Cr1=East>, diakses tanggal 11 Desember 2006.

<sup>47</sup> *Israel's Disengagement Plan: Renewing Peace Process, Op.Cit.* diakses dari <http://www.mfa.gov.il>, tanggal 6 Februari 2006.



merupakan penyerahan diri terhadap kekerasan Palestina.<sup>51</sup>

Pasukan Israel dan Palestina mulai ditempatkan untuk mengamankan evakuasi yang akan dilaksanakan atas permukiman-permukiman Yahudi di Jalur Gaza. Para pejabat keamanan Israel mengatakan polisi memasang halang-rintang jalan di Israel Selatan untuk menghambat warga Yahudi yang menentang penarikan itu menyusup ke permukiman-permukiman Gaza. Para pejabat Palestina mengatakan satu satuan tugas juga akan digelar di kawasan-kawasan dekat kantong-kantong permukiman tersebut untuk mencegah usaha kaum militan Palestina mengganggu evakuasi itu.

Israel bermaksud mengeluarkan perintah pengusiran di ke-21 permukiman di Gaza dan empat di Tepi Barat berdasarkan rencana Perdana Menteri Ariel Sharon untuk menarik diri dari wilayah-wilayah pendudukan yang ia pandang tidak memiliki banyak nilai keamanan. Para pemukim yang diperintahkan keluar akan diberi waktu dua-hari untuk berangkat sebelum regu-regu pengusiran Israel tiba untuk memindahkan paksa siapa saja yang masih menolak pergi.<sup>52</sup>

Batas waktu yang ditetapkan Israel bagi para pemukim Yahudi untuk secara sukarela meninggalkan Gaza sudah berlalu, dengan demikian menyiapkan pentas bagi pengusuran secara paksa terhadap mereka yang masih di sana.

Sebelum batas waktu itu, koordinator tertinggi Israel bagi penarikan mundur ini, Eyal Giladi, mengatakan separoh pemukim di Gaza telah keluar dari daerah itu. Ratusan tentara dan polisi Israel tanpa senjata masuk ke permukiman Yahudi yang terbesar di Jalur

<sup>51</sup> "Tentara Israel Dengan Paksa Mengevakuasi Pemukiman Yahudi dari Jalur Gaza", diambil dari <http://www.berita.com/berita/2005-08/2005-08-14-voa11.htm>, diakses tanggal 17 Agustus 2005.

<sup>52</sup> "Pasukan Israel dan Palestina Mulai Ditempatkan di Gaza Untuk Mengamankan Evakuasi", diambil dari <http://www.berita.com/berita/2005-08/2005-08-14-voa2.htm>, diakses tanggal 14 Agustus 2005.



mengatakan hari Rabu, Amerika masih menunggu Suriah bertindak menangani keprihatinan Amerika. Jihad Islam Palestina mengaku bertanggungjawab atas pengeboman bunuh diri di kota pantai Israel Netanya hari Selasa yang menewaskan empat orang warga Israel. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri yang tidak mau disebut namanya mengatakan, Suriah mengingkari janjinya kepada Amerika dua tahun yang lalu bahwa pihaknya akan menutup kantor kelompok-kelompok militan Palestina di Suriah.<sup>54</sup>

Hanya dua tokoh Israel saja yang menilai bahwa Sharon memiliki persepsi, tujuan, politik dan rencana kerja. Keduanya, Penasehatnya, Dov Faszolas dan Kepala Koordinasi "Pemisahan", colonel, Eibal Jaladi. Sementara lainnya menilai ini adalah bencana nasional atau mereka mendukung namun akan menimbulkan peristiwa yang berbalik dari keinginan Sharon, yakni kembali pada wilayah perbatasan 1967. Perlu disimpulkan, Faszolas menyampaikan dalam wawancara yang dilansir di bulan Oktober bahwa tujuan rencana ini adalah memasukkan usulan George W. Bush agar menjadi lebih formal untuk beberapa tahun ke depan, memberikan jaminan untuk mempertahankan pemukiman Israel di Jalur Gaza sehingga warga Palestina menjadi seperti warga Finlandia. Ada yang menilai sekarang bahwa jika ada orang formal seperti di atas maka ia telah melebur. Ketua gerakan kiri Yahet, Yoshe Belin yang mendukung rencana "pemisahan" mengatakan, jika rencana ini tidak mengarah kepada perundingan kompromi abadi secara langsung maka yang ada hanya bencana terhadap Israel dan Palestina dengan ukuran yang sama. Ia menilai bahwa rencana pemisahan bisa menjurus

<sup>54</sup> "Pemukim Yahudi Marah Atas Penutupan Permukiman di Gaza Oleh Tentara Israel", diambil dari <http://www.yogya.com/indonesia/berita/berita/2005-07/005-07-14-youa.com>, diakses tanggal 14 Juli 2005.

kepada dimulainya kekerasan, jika terjadi perang maka Pemerintah Otoritas Palestina akan hancur.<sup>55</sup>

Israel meningkatkan pengamanan di sekitar tempat-tempat suci Yerusalem untuk mencegah bentrokan antara umat Islam yang sedang beribadah dan ekstremis Yahudi yang menentang penarikan Israel dari Gaza. Ratusan polisi tambahan dikerahkan hari Sabtu di sekitar Temple Mount. Ribuan orang Yahudi diduga akan menghadiri upacara keagamaan di tempat itu hari Minggu, memperingati dihancurkannya tempat-tempat suci Yahudi dua ribu tahun yang lalu.

Para ulama Muslim menyerukan agar para pengikut mereka melindungi masjid-masjid di kawasan itu. Sementara itu di Gaza, para pemimpin Hamas melakukan jumpa pers, menyatakan tekad akan melanjutkan perjuangan melawan Israel. Otoritas Palestina mengatakan, pasukan keamanan siap dikerahkan untuk mencegah kaum militan mengganggu penarikan Israel dari Gaza.<sup>56</sup>

Kaum militan Palestina di jalur Gaza terus mengadakan serangan roket dan mortir ke sasaran-sasaran Israel meskipun ada janji baru oleh pemimpin Palestina Mahmoud Abbas Minggu malam, bahwa seranga itu akan dihentikan. Tidak ada korban yang jatuh atau kerusakan yang dilaporkan dari serangan terus-menerus yang ditujukan pada lima permukiman Yahudi dan terhadap pos-pos militer, dan dua roket Qassam yang ditembakkan ke kota Israel – Sderot.

Empat orang pemukim Israel menderita luka-luka akibat serangan mortir Palestina, dan pasukan Israel membunuh dua orang militan Hamas. Sementara itu,

<sup>55</sup> Hilmi Mosa. "Akhir Mimpi Israel", diakses dari <http://www.infopalestina.com/viewall.asp?id=...> tanggal 8 Juni 2005.

<sup>56</sup> "Israel Tingkatkan Pengamanan di Sekitar Tempat-Tempat Suci Yerusalem", diambil dari <http://www.voanews.com/indonesian/archive/2005-08/2005-08-14-voa3.cfm>, diakses tanggal 14 Agustus 2005.



keperluan yang telah mengepul ke udara.

Kira-kira 80 keluarga menolak untuk pergi dari permukiman Katif, satu dari tiga wilayah terakhir di Gaza di mana kelompok-kelompok orang Israel dalam jumlah banyak menunggu pemindahan secara paksa oleh tentara dan polisi. Pasukan tentara juga akan tiba di permukiman pertanian di Atsmona. PM Ariel Sharon mengusulkan penarikan dari jalur Gaza tahun lalu dengan mengatakan bahwa biaya dalam jumlah dana dan jiwa terlampau tinggi untuk Israel guna menetap di jalur Gaza, yang terdiri dari 21 permukiman Yahudi masing-masing sekitar 9000 penduduk, dikelilingi oleh lebih dari satu juta orang Palestina. Israel menduduki jalur Gaza hampir 40 tahun yang lalu, selama perang Timur Tengah tahun 1967.<sup>59</sup>

Para saksi mengatakan seorang militan Palestina tewas dalam bentrokan dengan pasukan Israel di luar kota Nablus di Tepi Barat. Sumber-sumber dalam militer Israel mengatakan tentara menembak dua orang Palestina bersenjata yang sedang mendefinisi sekelompok orang Yahudi yang hendak beribadah ketika mereka bergerak ke arah tempat suci dekat kamp pengungsi Balata. Sementara itu, para pejabat Israel mengatakan Perdana Menteri Ariel Sharon telah memerintahkan untuk mempercepat penyelesaian tembok pemisah yang menghebohkan di Tepi Barat.

Pimpinan tim perunding Palestina, Saeb Erekat, mengatakan Israel ingin menyelesaikan tembok perintang atau pemisah untuk mendikte batas-batas negara Palestina di masa depan. Pada tahun 2004, Mahkamah Internasional di Den Haag memutuskan tembok itu tidak sah dan menetapkan supaya tembok itu diruntuhkan. Tetapi, Israel mengatakan tembok itu dibutuhkan untuk melindungi warganya terhadap

<sup>59</sup> "Pasukan Israel Menasuki Permukiman Terakhir di Katif, Gaza Selatan", diambil dari <http://www.aljazeera.com/news/2005/08/2005-08-11-xiv0604.htm>, diakses tanggal 21 Agustus 2005.

militan Palestina.<sup>60</sup>

Menteri Keuangan Israel Benjamin Netanyahu mengundurkan diri dari kabinet sebagai protes terhadap rencana penarikan Israel dari Jalur Gaza. Ia meletakkan jabatan beberapa saat sebelum kabinet Israel melakukan pemungutan suara, yang berakhir 17-5 untuk memulai tahap penarikan pertama 15 Agustus dengan membongkar tiga perkampungan Gaza yang terisolir.

PM Israel Ariel Sharon mengatakan pengosongan akan dimulai sesuai rencana, meskipun adanya pengunduran diri itu. PM Sharon menunjuk Wakil PM Ehud Olmert sebagai penjabat menteri keuangan. Sementara itu, pihak berwenang Israel telah memasukkan tiga ekstremis Yahudi ke dalam tahanan administrative. Israel menyetujui langkah kontroversial untuk menahan orang tanpa pemeriksaan setelah pembunuhan empat warga Israel Arab oleh seorang ekstremis Yahudi yang menentang penarikan Gaza.<sup>61</sup>

Ribuan warga Palestina merayakan penarikan yang akan dilakukan Israel dari Jalur Gaza, di sepanjang kawasan sempit pantai Gaza PM Palestina Abbas berpidato di depan khalayak yang bergembira, mengatakan kepada mereka "hari ini Gaza, besok Yerusalem". Yang dia maksud adalah impian pihak Palestina untuk memiliki Yerusalem sebagai ibukota sebuah negara Palestina merdeka.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Ariel Sharon mengatakan kepada sebuah surat kabar Israel bahwa pemerintahnya pada akhirnya kemungkinan akan menyingkirkan

<sup>60</sup> "Seorang Militan Palestina Tewas dalam Bentrokan dengan Pasukan Israel di Luar Kota Nablus", diambil dari <http://www.votnews.com/indonesian/archive/2005-07/2005-07-07-ya05a.htm>, diakses tanggal 7 Juli 2005.

<sup>61</sup> "Netanyahu Mundur Dari Kabinet Israel Karena Penarikan Gaza", diambil dari <http://www.votnews.com/indonesian/archive/2005-08/2005-08-08-ya05e.htm>, diakses tanggal 8 Agustus 2005.

lebih banyak permukiman di Tepi Barat dari yang semula direncanakan.

Dalam wawancara itu, Sharon ditanya apakah Israel akan mundur dari beberapa permukiman kecil di Tepi Barat sebagai tambahan dari empat yang sudah ditetapkan. Dia menjawab bahwa tidak semuanya akan tetap disana dan isu itu akan dibicarakan dalam perundingan di masa depan dengan pihak Palestina. Israel akan memulai penarikan penuh hari Rabu dari 21 permukiman di Gaza.<sup>62</sup>

"Harapan kami untuk menyelesaikan pemindahan para pemukim ini semakin besar setelah dalam seminggu terakhir berhasil membersihkan Gaza. Kami akan segera berangkat ke Sanur dan Homesh sebagaimana telah diputuskan oleh Pemerintah Israel. Mengingat situasinya mungkin akan jauh lebih sulit dari Jalur Gaza, kami telah melakukan sejumlah antisipasi misalnya membuka dialog dengan para pemukim. Mungkin mereka tetap akan melakukan aksi protes, tapi semoga saja tidak lewat cara kekerasan".

Demikian pernyataan juru bicara aparat keamanan Israel sesaat sebelum memasuki Sanur dan Homesh dua kawasan permukiman permukiman kelompok radikal Israel di kawasan Tepi Barat. Prediksinya terbukti benar ketika sejumlah warga Israel melakukan aksi unjuk rasa, mengunci diri dengan perisai dan membakar ban di pintu masuk kota tatkala aparat keamanan Israel datang untuk memindahkan mereka hari ini. Namun aparat keamanan Israel patut menyerah. Setelah melalui proses dialog, dengan bekal bulldozer mereka memindahkan ban-ban yang terbakar dan maju mendesak sekitar 5.500 warga Yahudi untuk segera meninggalkan kedua kota itu.

Penarikan pemukim Yahudi dari Sanur dan Homesh di Tepi Barat ini hanya

<sup>62</sup> "Ribuan Warga Palestina Rayakan Penarikan Israel Dari Jalur Gaza", diambil dari <http://www.javanews.com/index.php?cat=archive/2005-08/2005-08-13/51561.htm>, diakses tanggal 13 Agustus 2005.

berselang sehari setelah Otoritas Israel mengaku telah berhasil memindahkan 8.500 pemukim Yahudi dari 21 pemukiman di Jalur Gaza. Banyak pihak menyambut baik kebijakan penarikan yang digagas Perdana Menteri Israel Ariel Sharon, termasuk dari sekutu terdekatnya Presiden Amerika Serikat George Walker Bush. Dalam pidatonya di hadapan 15 ribuan veteran Amerika, Presiden Bush menyebut penarikan Israel dari Jalur Gaza sebagai langkah berani yang bisa membantu menghidupkan kembali peta jalan damai menuju perdamaian di Timur Tengah.

“Kebijakan Israel ini merupakan satu terobosan bersejarah yang menunjukkan kepemimpinan Perdana Menteri Ariel Sharon. Israel dan Palestina sama-sama memiliki pemerintahan yang berkomitmen menciptakan kemajuan dan perdamaian. Kami tengah bekerja untuk mengembalikan mereka ke peta jalan damai. Palestina sendiri kini tengah menyiapkan dirinya untuk memerangi teroris yang menyerang Israel dan siapapun yang menentang terciptanya negara Palestina yang damai”.

Sayangnya Presiden Palestina Mahmoud Abbas berpendapat sebaliknya. Menurutnya, meskipun kebijakan penarikan ini merupakan langkah penting dalam 38 tahun terakhir, namun tidak akan secepatnya membawa mereka ke arah perdamaian. Pengamat masalah Timur Tengah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Dr. Riza Sihbudi memahami sikap Presiden Mahmoud Abbas. Karena menurut analisisnya penarikan mundur pemukim Yahudi dari kawasan yang memang sebenarnya merupakan wilayah Palestina yang selama ini diduduki Israel, tidak ada hubungannya dengan peta jalan damai yang kini disebut-sebut banyak pihak.

Sebetulnya dalam roadmap itu tidak ada. Bahkan ketika KTT Sharon dan Abbas Februari 2005, Israel terang-terangan menolak mengaitkan itu dengan roadmap. Jadi ini

lebih pada inisiatif sepihak – terutama oleh Sharon. Saya tidak melihat dampak yang sangat jelas terhadap roadmap itu sendiri karena Gaza itu hanya 5% dari total daerah yang diduduki Israel. Gaza secara ekonomis pun tidak memberikan keuntungan apa-apa pada Israel. Jadi tindakan ini hanya memindahkan kekuatan Israel agar lebih ditujukan ke Tepi Barat karena kalau dilihat, secara ekonomis Gaza tidak terlalu menguntungkan Israel bahkan pusat kelompok-kelompok garis keras yang banyak berkuasa disitu dan seringkali membuat kelompok Yahudi sebagai korban. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, penarikan Gaza tidak memberikan keuntungan apapun bagi Palestina. Tapi justru keuntungan besar bagi Israel. Untuk memperbaiki citra, menarik investasi dan membuat Israel lebih berkonsentrasi ke Tepi Barat. Artinya wilayah darat – laut dan perbatasan masih dikuasai Israel. Penarikan ini lebih menjadikan orang di Gaza seperti berada di dalam penjara karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan hubungan dengan Barat menjadi lebih sulit atau terputus. Artinya orang Palestina yang dari Tepi Barat yang ingin masuk ke Gaza akan lebih sulit karena semua dikontrol oleh Israel. Penarikan ini jadi penjara bagi orang Gaza karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa.

Kebijakan penarikan mundur pemukim Yahudi dari Jalur Gaza bisa disebut sebagai inisiatif pribadi PM Ariel Sharon yang meskipun mendapat dukungan luas, tapi tak sedikit pula menuai kritik publik dan anggota kabinetnya. Menteri Keuangan Israel Benjamin Netanyahu sampai memutuskan untuk mengundurkan diri dari Kabinet Sharon karena tidak setuju dengan inisiatif ini.

Prof. Syamsul Amri Baharuddin dari Universitas Kebangsaan Malaysia menilai lepas dari kecaman di dalam negerinya, Ariel Sharon sekali lagi telah membuktikan kepada dunia kemampuan strateginya. “Ini yang saya maksud AS telah berjaya

mempengaruhi atau mendapat dukungan Sharon walaupun ia seorang tokoh yang sangat keras kepala. Yang tidak menyokong itu adalah yang mendapati adalah tidak bertulang belakang. Sedangkan Sharon itu keras kepala tapi apabila logic pada beliau dan ada strategic advantages maka ia akan mendukung kebijakan itu. Saya rasa hal ini penting ke arah menyelesaikan masalah terorisme di dunia”.

Hal senada disampaikan Dr. Riza Sihbudi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI. “Seperti kita ketahui selama ini Sharon adalah orang yang yakin dengan apa yang dia lakukan dan dia selalu memikirkan betul-betul segala kebijakannya. Makanya ia tidak peduli dengan perpecahan di dalam Partai Likud sendiri dan mundurnya Netanyahu tidak banyak berpengaruh ke partai tersebut. Hal ini kelihatan dari hasil polling baru-baru ini dimana 54% warga Israel mendukung kebijakan penarikan Israel dari Jalur Gaza. Ya bahkan survey lain mengatakan 50% orang Israel menilai pihaknya lebih diuntungkan dari penarikan ini”.

Banyak pihak boleh saja menyambut baik kebijakan Israel ini dan merasa perdamaian di kawasan Timur Tengah sudah hampir di depan mata, namun sejumlah pengamat yang kami wawancarai menilai masih terlalu cepat untuk melakukan penilaian atas hal ini. Diperlukan waktu beberapa saat untuk melihat efektif tidaknya kebijakan ini terhadap masa depan perdamaian kawasan Timur Tengah, khususnya Israel – Palestina. Profesor Syamsul Amri Baharuddin dari Universitas Kebangsaan Malaysia.

“Kita harus melihat apa yang berlaku di Gaza sekarang dari dua perspektif. Pertama, perspektif jangka panjang. Kedua, perspektif semasa. Dalam jangka panjang – penarikan keluar rakyat Yahudi dari Gaza ini adalah langkah yang sangat penting untuk menyelesaikan masalah Palestina. Di pihak AS pun berjaya untuk mendorong Israel

menunjukkan kepada dunia Islam bahwa sesuatu yang baik boleh mereka lakukan. Saya tidak tahu ini akan mendatangkan kesan yang positif atau tidak. Kedua apa yang akan berlaku pada orang-orang Yahudi sendiri yang sudah duduk disitu sekian lama. Dua proses ini akan berlangsung serentak dalam tempo seminggu hingga enam bulan mendatang. Jadi di peringkat jangka panjang kita akan dapati persetujuan dsbnya. Di peringkat jangka pendek terutama bagi orang Israel yang menghadapinya maka ia akan menghadapi macam-macam isu. Pihak Palestina akan menunjukkan kegembiraan dan celebration. Ini semua akan menimbulkan persoalan bagi pihak Israel, Palestina maupun AS. Bagaimana hendak mengurus krisis ini dalam keadaan aman, itulah yang penting”.

Pengamat lain Prof. Husein Muthalib dari Universitas Nasional Singapura NUS bahkan menilai masih banyak persoalan lain yang harus segera diselesaikan jika kedua pihak ingin benar-benar mencapai perdamaian. “Kemunduran ini memang sangat dinantikan. Bukan saja upacara atau proses pengembalian bumi atau tanah kepada rakyat Palestina, tetapi proses ini diperhatikan merata dunia karena beberapa kemungkinan yang masih belum jelas untuk masa ini karena baru saja bermula. Pertama orang ingin tahu resiko besar yang diambil PM Israel ini akan membantu beliau atau tidak. Sebab setakat yang kita juga tahu walaupun pengunduran ini diterima secara ramai dan mutlak oleh rakyat Palestina karena mereka ingin agar tanahnya dikembalikan, tapi bangkangan yang diterima PM Israel dari dalam negerinya terlalu luas.

Idealnya menurut Dr. Riza Sihbudi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI menjelaskan kedua pihak, Israel dan Palestina kembali ke peta jalan damai yang memang telah menjadi resolusi Dewan Keamanan PBB. Barulah kemudian perdamaian benar-benar tercipta disana.

“Saya kira harus dikembalikan pada roadmap, jika itu yang dijadikan patokan dan sekaligus Resolusi DK PBB. Ini yang bisa menciptakan perdamaian yang sebenarnya. Substansi utamanya adalah bagaimana agar orang Palestina memiliki negara atau kedaulatan sendiri. Jadi selama itu tidak ada dalam gagasan atau usulan yang dibuat Sharon, saya rasa tidak akan membawa kemajuan apa-apa. Bahkan bisa jadi Sharon ini tidak mengubah apa-apa kecuali sedikit variasi kebijakan. Ini adalah untuk kepentingan ia sendiri”.

Secara objektif patut diakui bahwa kebijakan penarikan pemukin Yahudi dari Jalur Gaza dan juga dari sebagian wilayah Tepi Barat mulai hari ini, memberikan angin segar dalam konflik Israel – Palestina tiga puluh delapan tahun terakhir. Meskipun belum memberi manfaat langsung pada kedua pihak, kebijakan ini setidaknya menunjukkan itikad baik untuk memulai kembali dialog menuju peta jalan damai yang sempat terhenti. Fenomena yang mungkin terjadi pasca kebijakan ini bisa jadi menjadi ujian komitmen kedua pihak untuk benar-benar menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah atau tidak.<sup>63</sup>

PM Israel Ariel Sharon, yang dilanda banyak skandal, mendapat pukulan baru Jumat kemarin. Pukulan itu terjadi saat jajak pendapat yang diselenggarakan koran terbesar di Israel menunjukkan untuk kali pertama mayoritas rakyat Israel ingin dia mundur. Mantan jenderal itu bertekad menyelesaikan badai serangan yang muncul akibat tuduhan-tuduhan korupsi dan kelakuan jahat yang telah dibantah kebenarannya. Namun sebagian besar serangan itu bakal bergantung pada apakah para jaksa yang kini sedang membahas tuduhan pidana terhadap Sharon memutuskan untuk mendakwanya dalam

<sup>63</sup> “Penarikan Mundur Israel dari Jalur Gaza : Bukan Solusi Damai”, diambil dari <http://www.rsi.sg/indonesian/faktor-sajian/view/200508231335001.html>, diakses tanggal 23 Agustus 2005.

beberapa pekan mendatang.

Jajak pendapat di harian Yedioth Ahronoth tersebut memperlihatkan, 53 persen responden yakin Sharon seharusnya mengundurkan diri, sedangkan 43 persen ingin agar dia tetap memegang jabatan. Itu pukulan mengejutkan bagi pemimpin berusia 76 tahun tersebut, yang terpilih melalui kemenangan besar pada 2001 dan 2003.

Orang kepercayaan Sharon menyatakan, semua masalah itu disebabkan oleh para oposan "ekstrem kanan" yang menentang rencana sepihak PM untuk memindahkan permukiman Yahudi di Jalur Gaza dan beberapa lainnya di Tepi Barat. Sharon berencana mengevakuasi permukiman Yahudi tersebut apabila "peta jalan" damai yang didukung AS gagal.

Menurutnya, lawan-lawan politik Sharon berusaha mencemarkan nama baik dan menggulingkan mantan sekutu mereka. Sharon telah memperingatkan Palestina bahwa langkah sepihaknya akan membuat mereka memiliki wilayah lebih kecil dibandingkan yang mereka inginkan untuk membentuk negara merdeka. Setelah menjalani penyidikan dalam dua kasus korupsi terpisah, Sharon mendapat batu sandungan lain pekan ini ketika koran Maariv menudingnya melakukan kesalahan saat mengadakan pertukaran tawanan dengan gerilyawan Hizbullah. Pertukaran tawanan tersebut dianggap tidak seimbang.<sup>64</sup>

Pasukan keamanan Israel mengepung dan menutup kota Kfar Maaron di Israel bagian selatan, untuk mencegah ribuan orang warga Israel yang memprotes penarikan dari Jalur Gaza berbondong-bondong ke permukiman-permukiman Yahudi di Gaza.

Tidak lama setelah kekerasan berkobar Selasa tengah hari, serombongan besar polisi Israel mengunci gerbang ke kota itu, membuat ribuan orang demonstran terjebak di

<sup>64</sup> "Rakyat Israel Ingin PM Sharon Mundur", diambil dari <http://www.satuamerdeka.com/igjaan/010306/0102.htm>, dikases tanggal 4 Maret 2006.

dalam. Lebih dari 20 orang ditahan, dan beberapa orang polisi cedera. Pihak berwenang Israel menyerukan agar para demonstran pulang, dan mengatakan, mereka tidak akan dibiarkan berbaris ke Gaza. Sementara itu, kelompok militan Palestina Hamas dan Gerakan Fatah pimpinan Mahmoud Abbas sepakat menghentikan pertikaian Rabu dini hari waktu setempat. Persetujuan dicapai Sehari setelah kekerasan membuat sekurang-kurangnya 13 orang warga Palestina luka-luka dalam bentrokan di Jalur Gaza.<sup>65</sup>

### III.2. Peran dan dukungan elite politik Israel terhadap *disengagement plan*.

Peranan dan dukungan para elite politik Israel terhadap kebijakan sepihak penarikan mundur dari jalur Gaza dan Tepi Barat dibatasi pada orang-orang terdekat dari PM Sharon yang menjabat dalam posisi tertentu dalam kabinet pemerintahannya. Adapun elite politik yang dimaksudkan adalah Ehud Olmert, Silvan Shalom, Shaul Mofaz, dan Shimon Peres.

#### III.2.a. Ehud Olmert

Olmert adalah Wakil Perdana Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Industri, Perdagangan dan Perburuhan yang bertanggung jawab atas Administrasi Tanah Israel.<sup>66</sup> Olmert dilahirkan di dekat Binyamina yang saat itu berada di bawah Mandat Britania atas Palestina (kini Negara Israel). Kedua orangtuanya berasal dari Harbin, sebuah kota sub-provinsi, ibukota Provinsi Heilongjiang di Tiongkok. Ia lulus dari Universitas Ibrani di Yerusalem dengan gelar dalam psikologi, filsafat dan hukum. Ia juga menjadi pengacara yang sukses di Israel.

Di masa kanak-kanaknya, Olmert menjadi anggota Organisasi Pemuda Beitar dan menghadapi kenyataan bahwa orangtuanya seringkali masuk daftar hitam dan mengalami

<sup>65</sup> "Pasukan Keamanan Israel Menutup Kota Kfar Maimon di Israel Bagian Selatan", diambil dari <http://www.voanews.com/indonesiaarchive/2005-07/2005-07-20-voa3a6in>, diakses tanggal 20 Juni 2005.

<sup>66</sup> "Ehud Olmert", diakses dari [www.jmasset.gov.il](http://www.jmasset.gov.il), tanggal 24 November 2006.

diskriminasi karena mereka berafiliasi dengan Herut, oposisi partai Mapai yang berkuasa. Namun, pada tahun 1970-an hal ini tidak lagi begitu berpengaruh terhadap karier seseorang seperti yang terjadi pada 1950-an, dan Olmert berhasil membuka praktik pengacara yang sukses di Yerusalem bersama rekannya.

Olmert telah menikah dan mempunyai empat orang anak. Selama puluhan tahun beliau menjadi penggemar setia klub sepakbola Beitar Jerusalem. Tahun 1973, Olmert terpilih menjadi anggota Parlemen Israel (Knesset) pada usia 28 tahun, dan terpilih kembali selama tujuh kali berturut-turut. Sebelumnya, beliau mengabdikan diri pada Angkatan Bela Diri (Angkatan Bersenjata) Israel sebagai perwira di satuan Infantri Golani. Ia menjadi Menteri tanpa jabatan yang bertanggung jawab atas urusan minoritas (1988-1990) dan sebagai Menteri Kesehatan (1990-1992). Antara tahun 1981-1988, Olmert menjadi anggota Komite Urusan Luar Negeri dan juga duduk dalam Komite Keuangan, Pendidikan, dan Anggaran Pertahanan.

Pada tahun 1970-an Olmert tersangkut skandal pencemaran yang melibatkan sejumlah pengusaha terkenal Yerusalem, kejahatan terorganisasi, anggota parlemen yang korup dan Jenderal purnawirawan Rechavam Ze'evi. Masalah ini didokumentasikan dalam laporan wartawan investigatif Aryeh Avneri, Ha'tvusa pada 1992. Setelah tuntutan pencemaran Ze'evi ini, Olmert diberitakan meminta dana dari Perbendaharaan Likud untuk dana pembelaannya, meskipun para pengacaranya berasal dari biro hukumnya sendiri. Hal ini dapat disimpulkan sebagai penyogokan atau suap. Semua tuduhan terhadap Olmert akhirnya diselesaikan di luar pengadilan.

Pada periode 1993-2003, Ehud Olmert menjabat sebagai Walikota Yerusalem selama dua masa jabatan. Ia adalah anggota pertama dari Likud ataupun partai-partai



karir politik pria yang pada tahun 1970-an pernah bekerja sebagai wartawan. Olmert merupakan sosok yang setia terhadap PM Ariel Sharon, beliau selalu mendukung setiap kebijakan Sharon, termasuk evakuasi warga Israel dari jalur Gaza yang sebenarnya sangat ditentang oleh Partai Likud.

Olmert dikenal sebagai politisi beraliran keras. Bahkan, dia sangat menentang upaya damai yang dibuat dalam Perjanjian Camp David 1978 dan Perjanjian Oslo 1993. Namun, secara perlahan sikap politik Olmert melunak. Puncaknya pada 2003 dia mencetuskan ide pemisahan warga Israel dari Jalur Gaza.

Olmert memang dikenal dengan sejumlah ide kontroversial. Sebagai deputy PM sejak 2003, Olmert pun punya peranan penting dalam perumusan kebijakan domestik dan luar negeri Israel. Evakuasi warga Israel dari jalur Gaza sebenarnya berasal dari ide Olmert. Ide tersebut dilontarkan Olmert pada artikelnya yang dimuat di harian Yediot Aharonot, Desember 2003. Menurut Ehud Olmert, Israel harus menarik semua pasukan dan warganya dari Tepi Barat dan Jalur Gaza. Olmert menjelaskan bahwa penarikan tersebut menjadi satu-satunya cara bagi Israel untuk bisa menjaga ciri khas keyahudiannya.

Beliau juga mengingatkan, angka kelahiran penduduk Palestina yang sangat tinggi akan menyebabkan jumlah warga Arab di sejumlah wilayah yang dikuasai Israel melebihi jumlah warga Israel. Olmert pun menjelaskan perlu dibuat batas baru dengan menempatkan penduduk Israel sebanyak mungkin. Ide Olmert ini ditentang karena jika diimplementasikan akan menimbulkan persoalan, baik itu bagi warga Israel maupun Palestina. Warga Israel yang sudah puluhan tahun tinggal di jalur Gaza tidak akan mau begitu saja dirclokasi. Begitu pula dengan warga Palestina yang akan menoiak jika batas

baru yang ditetapkan sifatnya sepihak. Namun, di tengah-tengah penolakan terhadap ide Olmert tersebut, pemerintah Israel justru mengadopsinya menjadi kebijakan nasional.

Pada 7 Agustus 2005, Olmert diangkat menjadi penjabat Menteri Keuangan, menggantikan Benjamin Netanyahu, yang mengundurkan diri sebagai protes terhadap rencana pemisahan diri sepihak Israel 2004 (rencana penarikan mundur Israel<sup>1)</sup> dari Jalur Gaza dan Tepi Barat. Olmert menentang penarikan mundur dari tanah yang direbut Israel pada Perang Enam Hari 1967, dan menolak Perjanjian Damai Camp David pada 1978 adalah pendukung vokal penarikan mundur dari Gaza. Setelah pengangkatannya, Olmert berkata:

"Saya menentang Menachem Begin. Saya katakan padanya, itu adalah kesalahan yang historis, betapa berbahayanya kesepakatan itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekarang saya menyesal bahwa beliau sudah tiada sehingga saya tidak dapat secara terbuka mengakui kebijaksanaannya dan kesalahan saya. Dia benar dan saya keliru. Syukurlah kami menarik diri dari Sinai."<sup>68</sup>

Salah satu topik yang merusak posisi Olmert di antara sebagian besar pendukung Likud dan para pejabat politik Israel lainnya adalah perubahan pemikirannya sehubungan dengan konsesi teritorial. Pada masa jabatan kedua PM Ariel Sharon (pemilu tahun 2003), Olmert menjadi wakil perdana menteri dan banyak orang memandangnya sebagai tangan kanan Sharon. Ia adalah pendukung vokal kebijakan pemerintah dan merupakan sekutu paling penting Sharon dalam rencana pemisahan diri sepihak Israel aus jalur Gaza dan sebagian tepi Barat pada September 2005.

Wakil PM Ehud Olmert, sekutu kabinet terdekat Sharon, mengatakan akan mendukung bila penarikan mundur dari Jalur Gaza dan Tepi Barat itu dimajukan,

<sup>68</sup> "Ehud Olmert", diakses dari [www.khoss.com.il](http://www.khoss.com.il), *Op.Cit.*, tanggal 24 November 2006.

dikarenakan terjadinya demonstrasi besar-besaran di Kfar Maimon (perbatasan pemukiman Gaza) dari kelompok ultranasional yang menentang penarikan mundur tersebut.<sup>69</sup>

"Dari sudut pandang hukum, operasi ini bisa dimulai dari 22 Juli 2005. Secara pribadi, saya mendukung penarikan yang lebih cepat setelah adanya demonstrasi dalam beberapa hari terakhir," kata Olmert kepada radio umum Israel. "Para penentang penarikan mundur punya hak untuk mengungkapkan pendapat mereka. Tetapi mengingat cara mereka mengeksploitasi periode transisi menuju penarikan tersebut dengan protes-protes mereka, sehingga mengacaukan kehidupan negeri itu, saya kira pemerintah harus mengubah tanggal tersebut," ujarnya.

Sekitar 50.000 orang ikut dalam demonstrasi tersebut. Pemerintah Israel sendiri mengerahkan sekitar 15.000 polisi dan pasukan diterjunkan untuk mencegah bentrokan lepas kendali. Aksi demo para penentang DP itu telah menimbulkan kekacauan besar-besaran dalam beberapa pekan terakhir. Dalam beberapa kesempatan, para demonstran memblokir jalan-jalan utama di negeri itu. Deputy PM Sharon, Ehud Olmert mengatakan, PM Sharon akan mencari jaminan AS agar Israel tetap bisa melakukan tindakan melawan terorisme secara bebas setelah menarik diri dari Jalur Gaza.<sup>70</sup>

### III.3.b. Shimon Peres

Shimon Peres lahir dengan nama Shimon Persky pada 16 Agustus 1923 di Polandia dan bermigrasi bersama keluarganya di suatu tempat yang sekarang dikenal sebagai negara Israel pada 1934) adalah politisi Israel, mantan perdana menteri, dan

<sup>69</sup> "Penarikan Gaza Bisa Dipercepat", diakses dari <http://www.intipalestina.com/viewall.asp?id=6557>, tanggal 22 Juli 2005.

<sup>70</sup> *Op Cit.*, Kompas, 14 April 2004.

wakil perdana menteri.<sup>71</sup> Peres tercatat sebagai anggota dan kemudian memimpin Partai Buruh dari tahun 1950-an hingga Desember 2005.

Peres tampil sebagai Perdana Menteri Israel ke-8 (1984-1986 dan 1995-1996), Menteri Luar Negeri Israel (2001-2002), dan Wakil Perdana Menteri dalam koalisi di bawah kepemimpinan Ariel Sharon pada awal tahun 2005. Pada 1994, Peres memenangi Nobel Perdamaian bersama dengan Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat dalam Persetujuan Oslo. Peres kemudian menang dalam pemilu nasional, sehingga membuat posisinya di Partai Buruh semakin kuat dan tangguh untuk waktu yang tidak terbatas.

#### Tahun-tahun Kehidupan

Shimon Peres lahir di Wieniawa, Polandia (sekarang Vishniova di Belarusia). Ia lahir dengan nama akhir asli Persky. Pada tahun 1934, semasa masih kecil, ia pindah ke Tel Aviv (Israel) bersama keluarganya. Ia bersekolah di Sekolah Gula di Tel Aviv dan sekolah pertanian di Ben Shemen.

Pada 1947, Peres mengikuti wajib militer di Haganah (pendahulu Pasukan Pertahanan Israel) dan ditunjuk David ben Gurion untuk bertanggung jawab atas urusan personalia dan pengadaan senjata. Pada 1952, Simon Peres diangkat sebagai Deputy Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan dan menjabat Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan pada 1953.

Peres terlibat dalam pembelian senjata untuk negara Israel (usaha beliau berjalan baik karena berhasil memperoleh pesawat tempur jet Dassault Mirage III dari Perancis dan sebuah reaktor nuklir hingga terjadi Krisis Suez pada tahun 1956). Pada 1959, Peres dipilih ke dalam Knesset sebagai anggota Partai Mapai (Partai Buruh Israel). Periode 1959-1965, beliau bertindak sebagai Deputy Menteri Pertahanan hingga terlibat dalam

<sup>71</sup> "Shimon Peres", diakses dari [www.knesset.gov.il](http://www.knesset.gov.il), tanggal 24 November 2006.

Peristiwa I avon bersama Moshe Dayan. Peres dan Dayan meninggalkan Mapai bersama David Ben Gurion untuk membentuk Partai Rafi yang berekonsiliasi dengan Mapai pada 1968. Meskipun tanpa Ben Gurion, Peres terbukti dapat menghasilkan pembentukan Jajaran Buruh.

Pada 1969, Peres ditunjuk sebagai Menteri Absorpsi. Pada 1970, beliau menjabat Menteri Transportasi dan Komunikasi dan setelah menjabat sebagai Menteri Penerangan, beliau diangkat sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 1974 dalam pemerintahan Yitzhak Rabin. Meski tak pernah memenangkan pemilihan umum, Peres dua kali menjadi Perdana Menteri; periode 1984-1986 sebagai bagian persetujuan rotasi dengan anggota Partai Likud (Yitzhak Shamir) dan setelah pembunuhan Perdana Menteri Yitzhak Rabin pada periode 1995-1996.

Peres tetap merupakan pendukung teguh Persetujuan Oslo dan Otoritas Palestina sejak dicetuskan, meskipun ada Intifadhah pertama dan Intifadhah al-Aqsha. Shimon Peres yang berminat dalam bidang nanoelektrik ini mendukung kebijakan sepihak Perdana Menteri Ariel Sharon untuk menarik mundur pasukan Israel dari Jalur Gaza dan memiliki kecenderungan menekankan pada kebijakan yang membahas proses perdamaian.

Shimon Peres mendirikan Peres Center for Peace pada tahun 1997. Beliau juga diangkat Perdana Menteri Ariel Sharon pada periode 2001-2002 sebagai Menteri Luar Negeri dan Wakil Perdana Menteri pada tahun 2005. Shimon Peres menikah dengan Sonya (nama gadis: Gelman) dan memiliki seorang putri, Tzvia (Tziki) Waiden-Peres, seorang ahli linguistik, dan dua orang putra, Yoni (lahir 1952) dan Chemi, pemimpin Pitango Venture Capital, salah satu dana modal usaha terbesar Israeli.

Peres mengarang sejumlah buku, yaitu: *The Next Step* (1965), *David's Sling* (1970), *And Now Tomorrow* (1978), *From These Men: seven founders of the State of Israel* (1979), *Entebbe Diary* (1991), *Yoman Entebbeh* (1991), *The New Middle East* (1993), *Battling for Peace: a memoir* (1995), *For the Future of Israel* (1998), dan *The Imaginary Voyage : With Theodor Herzl in Israel* (1999).

Deputi Perdana Menteri Israel Shimon Peres mengatakan, Israel akan dengan resmi minta bantuan tambahan 2,2 milyar dolar kepada Amerika untuk membantu mendanai penarikan Israel dari Jalur Gaza. Shimon Peres mengatakan hari Senin, Israel akan menggunakan uang itu untuk memindahkan para pemukim Yahudi yang sekarang tinggal di Gaza dan empat permukiman Yahudi yang akan ditutup, di Tepi Barat. Penarikan akan dimulai bulan depan. Harian Haaretz mengatakan, pemerintahan Bush telah menyatakan setuju pada prinsipnya mengenai bantuan itu. Dikatakan, sebuah delegasi Israel akan bertemu di Washington dengan para pejabat Amerika untuk menggarap rincian paket itu. Sebuah laporan bahwa pertemuan itu sudah berlangsung tidak dapat dikukuhkan. Jurubicara Dewan Keamanan Nasional Fred Jones mengatakan kepada VOA, Washington belum menyetujui paket itu karena Israel belum mengajukan permintaan.<sup>72</sup>

Setelah melalui perdebatan cukup panjang, akhirnya Israel berhasil membentuk pemerintahan persatuan nasional setelah tercapai kesepakatan antara Partai Buruh dan Likud. Seiring dengan itu, Israel menghentikan serangan mematikan mereka di Jalur Gaza, bahkan bersedia membebaskan 170 tawanan Palestina.

Partai Buruh dan Likud sepakat membentuk pemerintahan persatuan nasional

<sup>72</sup> "Shimon Peres: Israel Akan Minta Bantuan Tambahan 2,2 Milyar Dolar Kepada AS", diambil dari <http://www.vognews.com/indonesianarchive/2005-07/2005-07-12-voa5.htm>, diakses tanggal 12 Juli 2005.

untuk menyelamatkan rencana Perdana Menteri (PM) Israel Ariel Sharon dalam menarik diri sepenuhnya dari Jalur Gaza. Untuk itu, Israel mengakhiri serangan mereka di Jalur Gaza yang menewaskan 11 warga Palestina dalam sepekan terakhir.

Radio Israel melaporkan, perunding Partai Buruh pimpinan Shimon Peres, yang beraliran kiri-tengah, dan Partai sayap kanan Likud pimpinan Sharon hingga kemarin masih memberikan "sentuhan terakhir" sebelum penandatanganan resmi. Jika komposisi pemerintahan baru ini benar-benar terbentuk, hal itu akan merupakan bentuk kerja sama kelima antara Likud dan Buruh. Komite Sentral Partai Buruh akan mengadakan pertemuan khusus untuk menentukan delapan dari 19 calon anggota parlemen yang akan duduk di kabinet.

Perundingan yang dilakukan itu berjalan cukup alot, terutama setelah penerima Nobel Perdamaian Shimon Peres (81) menuntut posisi sebagai Deputy PM. Sebelumnya, Sharon bersikeras menolak tuntutan itu karena pos tersebut sudah diduduki salah satu loyalisnya, yaitu Ehud Olmert. Namun, menjelang akhir perundingan, Shimon Peres mendapat jaminan untuk mendapatkan kedudukan itu. Dalam arti, Israel akan menciptakan pos baru setingkat Deputy PM di kantor PM. "Sudah selayaknya jika Partai Buruh bergabung dengan koalisi tanpa syarat," katanya.<sup>73</sup>

### III.2.c. Shaul Mofaz

Shaul Mofaz (lahir pada tahun 1948 di Teheran Iran), beliau menjabat sebagai menteri transportasi dan deputy perdana menteri serta mantan menteri pertahanan Israel. Sebelumnya Mofaz menjabat sebagai *Chief of General Staff* ke-16 pada tahun 1998 (masa pemerintahan PM Benyamin Netanyahu tahun 1996-1999 dan masa pemerintahan

<sup>73</sup> "Likud-Buruh Sepakat, Israel Siap Bebaskan 170 Tawanan Palestina", diambil dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0412/20/ln/1447735.htm>, diakses tanggal 20 Desember 2004.

PM Ehud Barak tahun 1999-2001) di angkatan bersenjata Israel (IDF) dan sebagai orang Israel kelahiran Iran pertama yang menduduki jabatan tersebut. Dibawah pemerintahan PM Ariel Sharon, Mofaz menjabat sebagai menteri pertahanan pada tahun 2002 hingga pemerintahan PM Ehud Olmert.<sup>74</sup>

Mofaz bermigrasi ke Israel pada tahun 1957, setelah lulus dari bangku sekolah beliau bergabung dengan *Israel Defence Force* (IDF) pada tahun 1966 dan mengabdikan diri di Brigade Penerjun (*Paratroop Brigade*). Mofaz berpartisipasi dalam Perang Enam Hari tahun 1967, perang Yom Kippur tahun 1973, perang Lebanon tahun 1982, dan tergabung dalam pasukan elite khusus Sayeret Matkal dengan para penerjun dalam operasi Entebbe.

Setelah ditunjuk sebagai komandan brigade infantri pada perang Lebanon tahun 1982, Mofaz mengikuti *US Marine Corps Command and Staff College* di Quantico negara bagian Virginia. Setelah menyelesaikan pendidikannya tersebut Mofaz pada tahun 1986 ditunjuk sebagai komandan di sekolah perwira Israel sebelum beliau menduduki posisinya kembali sebagai komandan brigade penerjun.

Shaul Mofaz menduduki berbagai jabatan senior di kemiliteran, antara lain pada tahun 1988 Mofaz diangkat menjadi brigadir jenderal, pada tahun 1993 beliau berhasil menjadi komandan dari IDF di Tepi Barat, pada tahun 1994 beliau dipromosikan menjadi mayor jenderal dan memimpin korps selatan (*Southern Corps*), tahun 1997 Mofaz diangkat menjadi *Deputy Chief of the General Staff*, dan tahun 1998 beliau menjadi *Chief of the General Staff*.

Masa jabatan Mofaz sebagai kepala staf jenderal diisi dengan perubahan struktur dan keuangan dari angkatan bersenjata Israel. Namun, fenomena yang sangat berarti dalam masa jabatannya adalah Intifadah ke-2 (Intifadah Al Aqsa). Taktik kekerasan yang

<sup>74</sup> Shaul Mofaz, diakses dari [www.knesset.gov.il](http://www.knesset.gov.il), tanggal 11 Desember 2006.

diterapkan Mofaz guna mengatasi masalah Intifadah ini membawa kecaman dari masyarakat internasional, walaupun sebagian besar opini publik Israel mendukung taktik tersebut. Serangan terhadap kota Jenin, serangan-serangan terhadap kota-kota di Jalur Gaza, dan pengisolasian Yasser Arafat di Ramallah dinilai sebagai tindakan yang kontroversial yang telah dilakukan Shaul Mofaz.

Mofaz ikut serta dalam meningkatnya eskalasi kekerasan yang terjadi pada tahun 1999 dan mempersiapkan IDF guna mengatasi berbagai serangan dari gerakan pemberontak di wilayah Jalur Gaza. Beliau mendirikan pos keamanan di Jalur Gaza dan menerapkan taktik penyerangan yang disertai penggunaan buldozer guna mengurangi tingkat kerugian dari pihak IDF. Namun, Mofaz mendapatkan kritikan keras dari para kelompok kiri Israel akan metode yang digunakannya tersebut (khususnya pembongkaran rumah-rumah).

Pada saat krisis pemerintahan PM Ariel Sharon tahun 2002, Mofaz diangkat menjadi menteri pertahanan Israel. Setelah pensiun dari IDF, Mofaz bergabung dengan partai Likud. Mofaz berhaluan garis keras, meskipun beliau mendukung perjanjian dengan otoritas Palestina, Mofaz mendedikasikan dirinya guna menghobisi Arafat dan menyatakan perang terhadap terorisme dimana beliau tidak akan bersikap kompromis terhadap para kelompok militan seperti Hamas, Jihad Islam, dan Brigade Martir Al Aqsa. Mofaz berkayikan bahwa IDF dapat mengatasi dan menghentikan tindakan terror Palestina.

Pasukan Israel dikerahkan di sekitar Jalur Gaza setelah ledakan kekerasan yang menewaskan paling kurang seorang warga sipil Israel dan enam militan Palestina. Menteri Pertahanan Israel Saul Mofaz telah memerintahkan pasukan mempersiapkan

ofensif darat di Gaza, meskipun katanya Otoritas Palestina akan diberi waktu untuk mengekang kaum militan yang telah menembakkan roket ke sasaran Israel. Satu serangan roket menewaskan seorang perempuan Israel dekat Gaza hari Kamis.

Helikopter-helikopter Israel menyerang di Tepi Barat dan Gaza hari Jumat yang menewaskan 6 anggota kelompok militan Hamas, diantaranya empat yang berada di sebuah mobil van yang mengangkut bom-bom buatan rumah. Pasukan keamanan Palestina juga bentrok hari Kamis dengan anggota Hamas di Kota Gaza. Tembakan menembak menewaskan dua warga sipil dan 25 lainnya luka-luka.

Menteri Luar Negeri Amerika Condoleezza Rice berencana mengunjungi kawasan itu pekan depan untuk menekan para pejabat Israel dan Palestina agar bekerjasama dalam rencana penarikan Israel dari Gaza bulan depan.<sup>75</sup> Tindak lanjut keputusan PM Sharon berupa penyerangan terhadap kamp pengungsi di Jebaliya pada bulan Oktober 2004, berdasarkan atas rekomendasi petinggi militernya, guna memperluas operasi militer di Gaza.<sup>76</sup>

Juru bicara pemerintah Israel Avi Pazner mengatakan, serangan dilakukan untuk mencegah serangan granat berpeluncur roket yang kerap dilakukan militan Palestina di kawasan tersebut. Pazner menambahkan, berdasarkan rapat jajaran pemerintah dan militer, ditetapkan bahwa tentara Israel akan terus melakukan penetrasi ke wilayah-wilayah yang diyakini sebagai tempat peluncuran granat. Bahkan Menteri Pertahanan Israel Shaul Mofaz berencana akan menduduki kembali beberapa daerah yang selama ini berada di bawah otoritas Palestina.

<sup>75</sup> "Pasukan Israel Kepung Jalur Gaza Setelah Terjadi Ledakan", diambil dari <http://www.voanews.com/indonesian/archive/2005-07/2005-07-16-voa2.cfm>, diakses tanggal 16 Juli 2005.

<sup>76</sup> "Presiden Putin Desak Israel Hentikan Kekuatan Membabi-Buta", diambil dari Kompas, 30 September 2004.

Kemudian tentara Israel menangkap seorang pemimpin tertinggi Hamas, yang dituduh merencanakan serangkaian serangan mematikan terhadap Israel. Imad Qawasmeh dianggap sebagai Israel bertanggung jawab sebagai otak dua serangan bom bunuh diri di kota Beer Sheva pada bulan Agustus 2004.<sup>77</sup>

Menteri Pertahanan Israel Shaul Mofaz mengungkapkan Imad Qawasmeh ditangkap sebagai hasil dari operasi bersama yang dilakukan angkatan darat dan Shin Beth, pasukan keamanan dalam negeri Israel. Beliau menyatakan, "Saya berharap penangkapannya akan berdampak nancurnya infrastruktur Hamas di Hebron dan mengurangi serangan anti Israel dari wilayah tersebut".

#### III.2.d. Silvan Shalom

Dalam pidato yang disampaikan di Tel Aviv pada bulan April 2005, Menlu Israel Silvan Shalom menegaskan bahwa Israel akan memfokuskan upayanya agar dapat "menembus" hubungan dengan 15 negara Arab. Shalom menambahkan bahwa akan banyak peluang baik di depan Israel selama beberapa bulan mendatang setelah penarikan Israel dari jalur Gaza dan sebagian tepi Barat, dengan dunia Arab. Beliau yakin penarikan mundur tersebut akan menjadi pintu masuk keterbukaan Arab terhadap Israel yang dapat menentukan nasib masa depan hubungan kedua belah pihak.<sup>78</sup>

Sebelum rencana pemisahan saja Israel sudah mulai melakukan kontak dengan sejumlah negara Arab dan Islam untuk melakukan normalisasi hubungan. Dalam pidato yang disampaikan di Tel Aviv, Menlu Israel, Silvan Shalom menegaskan, Israel akan memfokuskan upayanya bisa "menembus" hubungan dengan 15 negara Arab. Sebab, katanya, banyak peluang baik di depan Israel selama beberapa bulan mendatang setelah

<sup>77</sup> "Israel Tangkap Pemimpin Hamas", diambil dari Kompas, 14 Oktober 2004.

<sup>78</sup> "Normalisasi Hubungan Israel - Arab dan Islam: Imbal Balik Penarikan dari Jalur Gaza", diakses dari <http://www.infopalestina.com/yiwvall.asp?id=6696>, tanggal 8 April 2005.

penarikan Israel dengan dunia Arab. Ia yakin penarikan akan jadi pintu masuk keterbukaan Arab-Israel dan ini akan menentukan nasib masa depan.

Media Israel, *Yediot Aharonot* melansir bahwa wakil Menteri Israel, Rohn Presor dan ketua tim politik di departemen luar negeri, Ya'ekti Dyan melakukan kunjungan rahasia ke Maroko untuk membahas hubungan diplomasi antara kedua negara. Harian ini juga mengungkap sejumlah kunjungan rahasia pejabat Israel ke sejumlah negara Arab dalam rangka memulai hubungan diplomasi.

Perlu diingat, Israel memiliki hubungan diplomasi dengan Mesir, Jordania, dan Mauritania secara utuh. Sementara dengan Qatar agar sedikit 'malu-malu'. Oman, Maroko, Tunis telah membekukan hubungan diplomasinya setelah meletus Intifadah. Islamonline, pernah melansir, Israel sejak lama berupaya membangun hubungan diplomasi dengan negara Uni Emirat Arab. Antara Israel dengan Pakistan kini sedang terjadi kontak. Sementara hubungan dengan Indonesia akan dilakukan melalui kedubes Israel di Singapura.<sup>79</sup>

Menteri Amerika, Condallizza Rice yang berkunjung ke kawasan sebanyak dua kali dalam satu bulan antara pertengahan bulan Juni dan Juli tanpa menyinggung sedikitpun dengan situasi tidak jelas pada fase setelah penarikan Israel dari Jalur Gaza. Pemerintah Palestina sendiri menunggu pernyataan Washington. Mungkin karena tekanan Amerika yang memaksa Sharon untuk mengeluarkan pasal dalam proses perdamaian. Padahal Amerika belum memuaskan Ramallah (Palestina). Berikut pasal itu: semua yang penting adalah harapan agar memotivasi Israel untuk sampai dari Jalur Gaza ke Tepi Barat dengan jalan lewat yang aman.

<sup>79</sup> "Normalisasi Hubungan Israel: Arab dan Islam Imbal Balik Penarikan dari Jalur Gaza", diakses dari <http://www.jafopalestina.com/viewall.asp?id:6751>, tanggal 8 April 2005.

Namun statemen yang tertuju kepada pihak Palestina, Sharon dengan tegas berbunyi "Memberangus aktifitas perlawanan untuk menjaga keamanan langkah Israel" dan untuk negara Arab "Negara Arab harus mencegah semua bentuk serangan yang dilakukan aktifitas perdamaian Palestina atas Israel". Jadi, Rice mementingkan untuk mengisolasi perlawanan Palestina dan Arab. Tidak menutup kemungkinan rencana Sharon ini akan "mencekik Jalur Gaza dan menggantungnya bersama penduduknya di awing-awang tanpa harapan politik yang jelas."<sup>80</sup>

Israel mengeluarkan tiga pernyataan resmi yang dilansir Harian Israel Haartez. Pertama, PM Israel, Ariel Sharon menegaskan, kesepakatan dirinya dan Presiden Amerika, George W. Bush bahwa tidak ada hak kembali ke perbatasan wilayah jajahan 1967, tidak ada pengungsi Palestina yang kembali, tidak ada pengosongan permukiman Yahudi yang besar, dan tidak ada hak kembali ke Jerusalem seperti yang diminta bangsa Arab dan Palestina.

Pernyataan kedua lewat Menlu Israel, Silvan Shalom yang mengatakan bahwa kesempatan sekarang adalah melakukan normalisasi hubungan dengan Negara Arab. Secara khusus Shalom meminta kepada Negara Maroko dan Negara-negara teluk untuk membangun hubungan diplomasi dengan Israel. Sikap ketiga disampaikan oleh Menkeu, Netenyahu bahwa Suriah, bukan Israel, seharusnya melepaskan haknya dari dataran tinggi Golan karena Negara ini dianggap sebagai pihak yang lebih lemah.<sup>81</sup>

Para pejabat Israel mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan memajukan rencana penarikan mundur dari Jalur Gaza guna menghindari protes lebih

<sup>80</sup> Muhammad Khalid Al Az'ar, "Masa Depan Suram Pasca Penarikan Israel", diakses dari [http://www.infpalestina.com/viewwall.asp?id\\_6668](http://www.infpalestina.com/viewwall.asp?id_6668), tanggal 1 Agustus 2005.

<sup>81</sup> Munir Syafiq, "Memo Ancaman Israel Untuk Mahmud Abbas", diakses dari [http://www.infpalestina.com/viewwall.asp?id\\_4363](http://www.infpalestina.com/viewwall.asp?id_4363), tanggal 26 Desember 2004.

jauh dari pihak penentang. Penarikan mundur itu saat ini dijadwalkan pada pertengahan Agustus mendatang. Wakil PM Ehud Olmert memberitahu radio Israel hari ini bahwa dia lebih menyukai memajukan proses pemindahan tersebut, setelah para demonstran mencoba melakukan demonstrasi masa di Gaza dalam 3 hari belakangan ini, yang diblokir oleh puluhan ribu tentara. Menurut Olmert, para demonstran tersebut menguras sumber-sumber negara dan mengacaukan kehidupan masyarakat.

Para pemukim Yahudi itu membatalkan demonstrasi mereka, tetapi mengatakan mereka masih akan merencanakan menganjurkan para pendukung memasuki Gaza untuk bergabung dengan para pemukim Yahudi di sana dalam memberikan perlawanan terhadap penarikan mundur tsb. Rencana penarikan mundur tersebut menjadi agenda utama dalam perundingan yang dipersiapkan oleh Menlu AS Condoleezza Rice dengan para pemimpin Israel dan Palestina. Rice akan tiba di kawasan itu kelak hari ini dari lawatannya di Afrika.<sup>82</sup>

Indikasi adanya kemungkinan rekonsiliasi Israel-Palestina pasca Yasser Arafat muncul dalam pertemuan antara Menlu Israel Silvan Shalom dan Menlu Palestina Nabil Shaath di Den Haag, Belanda pada akhir bulan November 2004.<sup>83</sup> Shalom menyatakan, Israel akan berupaya semaksimal mungkin dalam mendukung pemilu Palestina, yang didalamnya termasuk kebebasan akses bagi pemilih menuju lokasi pemungutan suara dan upaya semaksimal mungkin untuk menghilangkan hambatan yang mungkin masih di hadapi Palestina. Shalom menekankan, pasca Arafat merupakan peluang dan harapan terbesar bagi kedua wilayah dalam melanjutkan proses perdamaian, pemilu Palestina

<sup>82</sup> "Israel Mempertimbangkan Memajukan Penarikan Mundur dari Jalur Gaza", diambil dari <http://www.yonopnews.com/indonesia/archive/2005-07/2005-07-21-ya011.htm>, diakses tanggal 21 Juli 2005.

<sup>83</sup> "Israel-Palestina Mulai Membaik, Israel-Suriah Justru Memanas", diambil dari Kompas, 1 Desember 2005.

yang bebas dari hambatan merupakan kunci utama perdamaian di masa depan. Disisi lain, memanasnya hubungan Israel-Suriah muncul setelah Israel menolak tawaran damai tanpa syarat yang diajukan oleh Suriah. Israel tetap menuduh Suriah sebagai ladang teroris dan mendesak mengakhiri pendudukannya di Lebanon.



## BAB IV

### KESIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi PM Ariel Sharon tetap menjalankan kebijakan sepihaknya berupa DP, antara lain:

1. Faktor individu, dimana dengan latar belakang sebagai mantan Jenderal di kemiliteran Israel dan kehidupan masa muda yang sangat keras dengan bergabung dengan Haganah (kelompok teroris) menjadikan sosok PM Sharon sebagai seseorang yang selalu tampil keras kepala dan berusaha sekuat mungkin untuk melaksanakan apa yang dianggapnya baik. Terlihat dengan sikap-sikap PM Sharon dalam mengatasi banyaknya tekanan dari domestik negara Israel, terutama di dalam tubuh kabinet pemerintahannya.

Sebagai PM dari Partai Likud yang berhaluan "kanan", di masa pemerintahannya sejak tahun 2001 ia telah bersikap sangat keras, anti perdamaian, bahkan terkesan bengis terhadap bangsa Palestina. Dapat dicatat, misalnya, kunjungannya ke Masjidil Aqsha di masa awal pemerintahannya untuk menegaskan klaim wilayah Israel dengan sengaja telah memprovokasi rakyat Palestina sehingga memancing intifadah kedua.

Terobosan kontroversial muncul ketika Agustus tahun lalu ia tiba-tiba memerintahkan penarikan mundur pasukan Israel dari Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat. Kebijakannya telah menunjukkan perubahan sikap Sharon yang mendasar berkenaan dengan cita-cita Zionis akan Israel Raya (The Greater Israel) dengan menghapus Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat

dari petanya. Dalam banyak kesempatan, Sharon pun berulang-ulang mempertegas pengakuannya akan eksistensi negara Palestina. Hal ini dipandang sebagai tonggak penting untuk memulai diskusi perdamaian secara lebih konkret.

Meski tampak sangat mengejutkan pada mulanya, pergeseran sikap Sharon sebenarnya dilatarbelakangi realitas kehendak politik publik Israel. Mereka mulai penat dengan suasana yang selalu penuh bayang-bayang teror dan kekerasan dari kelompok garis keras Palestina. Satu-satunya cara lepas dari kondisi itu adalah memulai sikap kompromistik untuk membuka jalan damai. Sharon akhirnya menyadari bahwa mengandalkan kebijakan keras yang digariskan partainya ternyata justru melestarikan lingkaran kekerasan tak berujung pangkal yang tak menguntungkan. Yakin atas dukungan publik, Sharon pun bersikukuh mempertahankan sikapnya meski ditentang habis oleh partainya.

2. Faktor Persepsi, dimana terlihat dengan adanya strategi-strategi yang dapat dinilai bagus guna mencari dukungan guna eksistensi dari DP. PM Sharon merombak kabinet pemerintahannya, menjalin koalisi dengan partai oposisi Buruh guna persetujuan Knesset, mencari dukungan Presiden Bush guna diterimanya proposal beliau di dalam partai Likud, dan mengamandemen DP itu sendiri guna persetujuan kabinet.

Dengan berdasar atas pengamatan PM Ariel Sharon yang meliputi lingkungan domestik dan luar negeri, terutama reaksi terhadap DP, PM Sharon meyakini bahwa proposal yang diajukannya tersebut merupakan

langkah yang jitu guna mengatasi permasalahan Israel selama ini (keamanan, perbatasan wilayah, pengakuan internasional, dan normalisasi hubungan dengan negara Arab).

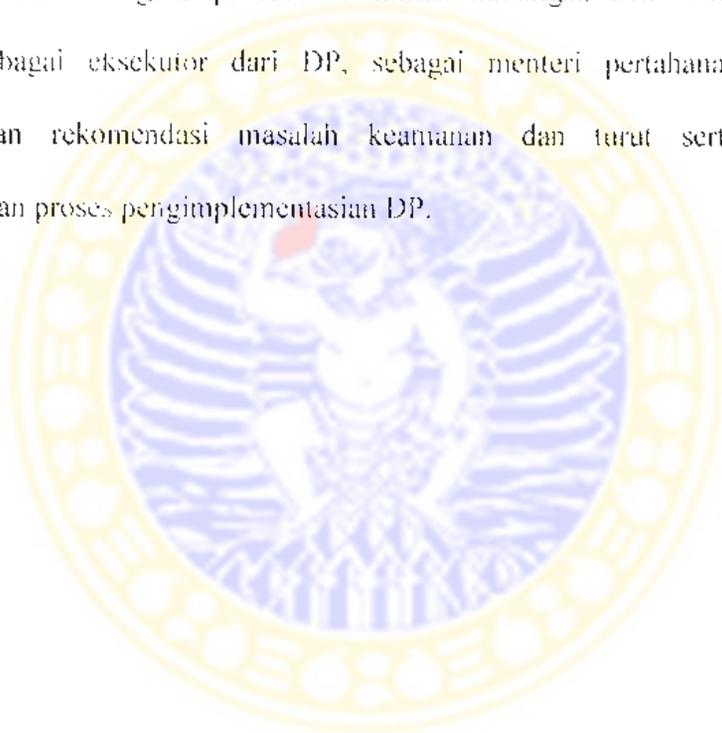
Sejak pertama kali PM Ariel Sharon menyatakan rencana penarikan mundur sepihak Israel dari Jalur Gaza dan Tepi Barat (DP) merupakan sebuah upaya sepihak yang perlu dilakukan guna mengatasi permasalahan keamanan dan ekonomi Israel guna kesejahteraan dan keadamaian negara Israel, yang di sponsori oleh institusi strategi dan politik Israel pada konferensi Herzliya tahun 2004, namun rencana tersebut tidak mendapatkan dukungan dari para menteri-  
n enteri senior di kabinet.

Melihat kondisi yang sedemikian rupa, PM Sharon bersedia menerima persyaratan yang ditawarkan partai Likud, dimana akan diadakan referendum atas rencana penarikan mundur tersebut yang ditentukan dengan voting kabinet. Penolakan atas rencana sepihak penarikan mundur tersebut merupakan pukulan yang amat telak bagi PM Sharon, meskipun begitu beliau menerima hasil referendum yang berdasar atas permintaan partai Likud tersebut dan membuat strategi menugaskan menteri pertahanan Shaul Mofaz mengamandemenkan rencana tersebut guna penerimaan para anggota Likud.

Begitu pula pada saat partai Likud menolak rencananya tersebut, PM Sharon mulai melakukan pendekatan dengan Presiden Amerika Serikat George W. Bush. Diawali dengan pertukaran surat resmi guna memberikan gambaran awal kondisi yang dihadapi PM Sharon, kemudian kunjungan beliau ke Gedung Putih membawakan hasil yaitu berupa dukungan Presiden Bush akan

rencana penarikan mundur sepihaknya, AS melarang pengungsi Palestina kembali ke tanah kelahiran mereka, dan Israel dapat tetap memiliki 6 kota di Tepi Barat. Adapun hasil lain yang didapat berdasarkan pengamatannya tersebut, Israel menjalin hubungannya kembali dengan Uni Eropa.

3. Peran dan dukungan elit politik Israel. Ehud Olmert merupakan pencetus ide cari penarikan mundur sepihak Israel, Silvan Shalom sebagai seorang negosiator dari DP guna proses normalisasi hubungan Isra-Arab, Shaul Mofaz sebagai eksekutor dari DP, sebagai menteri pertahanan Mofaz memberikan rekomendasi masalah keamanan dan turut serta dalam melancarkan proses pengimplementasian DP.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Coulombs, Theodore A. dan Wolf, James H. *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*. Bandung: CV Putra A Bardin, 1999.
- DeConde, Alexander, Burns, Richard Dean, and Lovegall, Fredrick. *Encyclopedia of American Foreign Policy, volume I*. New York: Charles Scribner's Sons, 2002.
- Dougherty, James E. dan Pfaltzgraff Jr., Robert L. *Contending Theories of international Relations*. Philadelphia: JB. Lippincott Co., 1991.
- Effendi, Soflan. "Unsur-unsur Penelitian Survey" dalam Masri Singarimbud dan Soflian Effendi, ed, *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Findley, Paul. *Deliberate Deceptions: Facing the Facts about the US-Israeli Relationship*. New York: Lawrence Hill Books, 1993.
- Harould, J dan Sprouch, Margareth. *Foundation of International Politics*. New Jersey: D. Van Nostrad Company Inc, 1962.
- Husaini, Adian MA. *Man Menang Sendiri: Israel Sang Teroris Yang Pragmatis?*. Jakarta: Pustaka Progressif, 2001.
- Katz, Jacob. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Zionisme (terj.)*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mas'ood, Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Mas'ood, Mochtar. *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*. Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Universitas Gajah Mada, 1989.
- Morgan, Patrick. *Theories and Approaches to International Politics*. Transaction, 1982.
- Murray, Douglas J dan Viotti, Paul R. *The Defence Policies of Nations: A Comparative Study*. London, 1982.
- Nield, Robert. *An Essay on Strategy: As It Affects the Achievement of Peace in a Nuclear Setting*. London: The Macmillan Press Ltd, 1990.
- Nolan, Cathal J. *The Greenwood Encyclopedia of International Relations vol. 4 S-Z*. London: Greenwood Press, 2002.

Papp, Daniel S. *Contemporary International Relations: Frameworks for Understanding, second editon*. New York: Macmillan Publishing Company. 1984.

Rahman, Musthafa Abd. *Ditema Israel: Antara Krisis Politik dan Perdamaian*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.

Riff, Michel. *Kamus Ideologi Politik Modern*. 1995; dalam Husaini, Adrian. "Mau , Menang Sendiri: Israel Sang Teroris Yang Pragmatis". Pustaka Progressif, Jakarta, 2001.

Schoenman, Ralph. *Mimpi Buruk Kemanusiaan: Sisi-sisi Gelap Zionisme (terj.)*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1998; Shamir. *Summing Up: An Autobiography*. 1994; dalam Husaini, Adrian. "Mau Menang Sendiri: Israel Sang Teroris Yang Pragmatis". Jakarta: Pustaka Progressif. 2001.

Sculze, Kirsten E. *The Arab-Israeli Conflict: Seminar Studies in History*. London & New York: Longman, 1999.

Singarimbun, Masri. "Metode dan Proses Penelitian", dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1985.

Snyder, Richard C, Bruck, H.W., and Sapin, Burton. "The Decision-Making Approach to the Study of International Politics", James N. Rosenau (ed), *International Politics and Foreign Policy: A Reader on Research and Theory*. New York: The Free Press, 1969.

Soesastro, Hadi. *Strategi Hubungan Internasional Indonesia di Kawasan Asia Pasifik*. Jakarta: CSIS. 1988.

#### **Koran:**

"AS-Israel Teken Perjanjian Antiekstradisi". *Republika*, 6 Agustus 2002.

"Di Tengah Buramya Wajah Timur Tengah". *Kompas*, 23 Desember 2002.

"Dampak Kemenangan Ariel Sharon". *Republika*, 8 Maret 2003.

"Hezbollah Serang Pos Israel". *Kompas*, 10 Juni 2004.

"Israel Akan Balas Irak". *Republika*, 22 Oktober 2002.

"Israel Akan Lebih Keras pada Palestina". *Suara Pembaharuan*, 28 April 2004.

"Israel Akui Delapan Permukiman Ilegal". *Koran Tempo*, 25 Oktober 2003.

"Israel Antisipasi Bentrok Politik dengan UE". *Media Indonesia*, 15 Oktober 2004.

- "Israel Batasi Akses ke Masjid Al-Aqsa". *Suara Pembaharuan*, 14 Oktober 2004.
- "Israel Caplok Nablus". *Republika*, 5 April 2002.
- "Israel dan Yordania Bahas Jaringan Pipa Minyak di Irak". *Suara Pembaharuan*, 10 April 2003.
- "Israel Kembali Serang Ramallah", *Kompas*, 11 Juni 2002.
- "Israel Khawatirkan Ekstermisme Yahudi". *Media Indonesia*, 6 Juli 2004.
- "Israel Kosongkan Gaza pada Akhir 2005". *Media Indonesia*, 17 April 2004.
- "Israel Membabi Buta di Jalur Gaza, 63 Tewas". *Kompas*, 4 Oktober 2004.
- "Israel-Palestina Mulai Membaik, Israel-Suriah Justru Memanas". *Kompas*, 1 Desember 2005.
- "Israel-Palestina Tolak Berunding". *Republika*, 18 Maret 2002.
- "Israel Peringatkan Suriah dan Iran". *Suara Pembaharuan*, 7 Oktober 2003.
- "Israel Serou Jamung Kamp Pengungsi", diambil dari *Kompas*, 1 Oktober 2004.
- "Israel Serou Ramallah". *Republika*, 2 Desember 2003.
- "Israel Tarik Pasukannya dari Wilayah Palestina". *Kompas*, 16 Maret 2003.
- "Israel Tangkap Pemimpin Hamas". *Kompas*, 14 Oktober 2004.
- "Israel Tolak Pembentukan Negara Palestina". *Kompas*, 7 Oktober 2004.
- "Jalan Kekerasan Pilihan Israel". *Republika*, 20 April 2004.
- "Jejak Berdarah Intifadah". *Koran Tempo*, 5 Oktober 2004.
- "Kamp Pengungsi di Tepi Barat Jadi Sasaran Operasi Israel". *Suara Karya*, 5 Maret 2002.
- "Ketegangan Baru di Al-Aqsa". *Koran Tempo*, 2 September 2003.
- "Langkah Mundur: Partai Likud Tolak Pembentukan Negara Palestina". *Kompas*, 14 Mei 2002.
- "*Life After Arafat*". *Newsweek*, 22 November 2004.
- "Militer, Pemerintah Israel Berselisih soal Palestina". *Media Indonesia*, 31 Oktober 2003.

- "Palestina Peringatkan AS dan Sharon". Kompas, 24 April 2004.
- "Pertemuan Abbas-Sharon tanpa Hasil". Koran Tempo, 19 Juni 2003.
- "Perundingan Israel Palestina Gagal". Suara Pembaharuan, 24 April 2002.
- "Peta Danau di Ujung Tanduk". Koran Tempo, 14 Juni 2003.
- "Polisi Israel Menahan Mustafa Barghouti". Kompas, 29 Desember 2004.
- "Presiden Putin Desak Israel Hentikan Kekuatan Membabi Buta". Kompas, 13 September 2004.
- "Sharon Batal Bertemu Qorei". Republika, 16 Maret 2004.
- "Sharon Berhasil Raih Dukungan Likud". Kompas, 11 Desember 2004.
- "Sharon Pertimbangkan Percepat Pemilu". Media Indonesia, 5 Februari 2004.
- "Sharon Tampik Usul Negara Palestina". Republika, 19 Juni 2002.
- "Sharon Tolak Pengungsi Palestina". Koran tempo, 10 Juni 2003.
- "Keputusan Sharon Disetujui" *Sudut Pemindahan Pemukiman di Gaza*. Kompas, 28 Oktober 2004.

**Internet:**

- Al Azhar, Muhammad Khalid. "Masa Depan Suram Pasca Penarikan Israel", diakses dari <http://www.rahmatulqadri.com/2005/08/01/masa-depan-suram-pasca-penarikan-israel/>, 1 Agustus 2005.
- Al Said, Ibrahim. "*Intifada Hancurkan Masyarakat Zionis*", diakses dari <http://www.intipalestina.com/eng/isa/inf/inf020.htm#intifada%20hancurkan%20masyarakat%20zionis>, 8 Oktober 2005.
- Cordesman, Anthony. "*From Peace to War: Land for Peace or Settlements for War*". DC: Center for Strategic and International Studies. [www.csis.org/csis/03/08/030815a.htm](http://www.csis.org/csis/03/08/030815a.htm), 15 Agustus 2003.
- Hollings, Ernest F. "*Bush's Failed Mideast Policy is Creating More Terrorism*", <http://www.hinoworld.com/news/usa/030825/hollings.html>, 25 Agustus 2004.
- Mosa, Hilmi. "Akhir Mimpi Israel". <http://www.mhs.parehina.com/vs/05/05/05060811.html>, 8 Juni 2005.
- Kahman, Mustafa Abd. "*Isu Anggaran Israel Tahun 2003: Mengempaskan Koalisi Sharon*". Kompas, 8 November 2002, diakses dari <http://www.kompas.com>.



- "Israel Tingkatkan Perumahan di Sektor Tepung-Tuanan Suci Yerusalem", diambil dari <http://www.tribunnews.com/2005/08/14/israel-tingkatkan-perumahan-di-sektor-tepung-tuanan-suci-yerusalem>, 14 Agustus 2005.
- "Kaum Militer Palestina Mengadakan Serangan Mortir ke Sasaran Israel di Jalur Gaza", <http://www.tribunnews.com/2005/07/18/kaum-militer-palestina-mengadakan-serangan-mortir-ke-sasaran-israel-di-jalur-gaza>, 18 Juli 2005.
- "*Knesset Approves Disengagement Plan Law*", <http://www.tribunnews.com/2005/02/16/knesset-approves-disengagement-plan-law>, 16 Februari 2005.
- "Tiga Arab: Antara Harapan dan Keniscayaan", <http://www.tribunnews.com/2001/04/01/tiga-arab-antara-harapan-dan-keniscayaan>, 1 April 2001.
- "Lond-Berahi Sepakat Israel Bilag Bebaskan 170 Tawanan Palestina", diambil dari <http://www.tribunnews.com/2004/12/20/lond-berahi-sepakat-israel-bilag-bebaskan-170-tawanan-palestina>, 20 Desember 2004.
- "Map of Israeli Disengagement", <http://www.tribunnews.com/2006/01/12/map-of-israeli-disengagement>, 12 Januari 2006.
- "*Middle East: Disengagement Plan*", <http://www.tribunnews.com/2004/10/16/middle-east-disengagement-plan>, 16 Oktober 2004.
- "Netanyahu Mundur Dari Kabinet Israel Karena Penarikan Gaza", diambil dari <http://www.tribunnews.com/2005/08/08/netanyahu-mundur-dari-kabinet-israel-karena-penarikan-gaza>, 8 Agustus 2005.
- "Normalisasi Hubungan Israel - Arab dan Islam: Imbal Balik Penarikan di Jalur Gaza", <http://www.tribunnews.com/2005/04/08/normalisasi-hubungan-israel-arab-dan-islam-imbal-balik-penarikan-di-jalur-gaza>, 8 April 2005.
- "Olmert Singa Yahudi: Ahli Waris Sharon", <http://www.tribunnews.com/2006/11/24/olmert-singa-yahudi-ahli-waris-sharon>, 24 November 2006.
- "Pasukan Israel dan Palestina Mulai Ditempaikan di Gaza Untuk Mengamankan Evakuasi", <http://www.tribunnews.com/2005/08/14/pasukan-israel-dan-palestina-mulai-ditempaikan-di-gaza-untuk-mengamankan-evakuasi>, 14 Agustus 2005.
- "Pasukan Israel Memasuki Permukiman Terakhir di Katif, Gaza Selatan", diambil dari <http://www.tribunnews.com/2005/08/21/pasukan-israel-memasuki-permukiman-terakhir-di-katif-gaza-selatan>, 21 Agustus 2005.
- "Pasukan Israel Meminta Pemukim Yahudi Tinggalkan Gaza", <http://www.tribunnews.com/2005/08/17/pasukan-israel-meminta-pemukim-yahudi-tinggalkan-gaza>, 17 Agustus 2005.
- "Pasukan Keamanan Israel Menutup Kota Kfar Maimon di Israel Bagian Selatan", <http://www.tribunnews.com/2005/06/20/pasukan-keamanan-israel-menutup-kota-kfar-maimon-di-israel-bagian-selatan>, 20 Juni 2005.





-----, *www.washingtonpost.com*, diakses 11 Desember 2006.

-----, *www.washingtonpost.com*, diakses 22 Maret 2005.

-----, *www.washingtonpost.com*, diakses 11 Desember 2006.

**Dokumen dan Jurnal:**

Press Statement, *A Performance Based Roadmap to a Permanent Two-State Solution to the Israeli-Palestinian Conflict*, Office of the Spokesman of the State Department, Washington DC, 30 April 2003.

Rais, Amien, *Dampak Perjanjian Interim PLO-Israel terhadap Perdamaian Dunia*, UGM, Yogyakarta, 1993.

Yareov, Nomi Bar, *New Imperatives for Israeli-Palestinian Peace*, Vol.45, No.2, 2003.